



**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH  
( LPPD )**

**KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
INSPEKTORAT**

Jln. Mayor Saur H. Purba Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi

DOLOKSANGGUL

Telp. (0633) 3211016 ; Fax. (0633) 3211016

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Doloksanggul, 18 Maret 2021

INSPEKTUR,

Drs. B.P. SIAHAAN, M.M  
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19631023 198712 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN INSPEKTORAT

Jln. Mayor Saur H. Purba Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi

DOLOKSANGGUL

Telp. (0633) 3211016 ; Fax. (0633) 3211016

---

## LAPORAN HASIL REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2020

Nomor : 700/ 83 /LHR/Inspektorat/III/2021  
Tanggal : 18 Maret 2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Hasil Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020.

---

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 700/58/SPT/Inspektorat/2021 tanggal 15 Maret 2021 untuk melakukan reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

### I. Pendahuluan

#### A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan :
  - (1) Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dilakukan oleh APIP inspektorat daerah.
  - (2) Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk Reviu, yang bertujuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD.
2. Surat Keputusan Bupati Humbag Hasundutan Nomor Tahun 2021 tanggal Januari 2021 tentang Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Di Lingkungan Kabupaten Humbang Hasundutan.
3. Surat Perintah Tugas Nomor : 700/45/SPT/Inspektorat/2021 tanggal 01 Maret 2021 untuk melakukan reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.
4. Surat Perintah Tugas Nomor : 700/58/SPT/Inspektorat/2021 tanggal 15 Maret 2021 untuk melakukan reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.



## B. Ruang Lingkup Reviu

- 1) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
  - a.1. Capaian kinerja makro
  - a.2. Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan
  - a.3. Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.
- 2) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan
  - b.1. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat
  - b.2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau provinsi dari pemerintah daerah provinsi.
- 3) Capaian kinerja Penerapan standar pelayanan minimal
  - c.1 Capaian penerapan standar pelayanan minimal
  - c.2 Kendala penerapan standar pelayanan minimal
  - c.3 ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal

## II. Hasil Reviu

### A. Pencermatan kesesuaian materi dan sistematika Draf LPPD

#### 1) Sistematika

Secara garis besar sistematika dokumen LPPD telah sesuai dengan :

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 serta
- b) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/6931/OTDA tanggal 18 Desember 2020 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2020.

#### 2) Materi

Secara garis besar isi materi dokumen LPPD telah sesuai, namun ada beberapa catatan antara lain :

1. Data Realiasi APBD tidak mencantumkan sumber data
2. Pada Sub 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah, Huruf c Program Pembangunan Daerah ternyata tidak ada rincian dari nama program sesuai dengan dokumen perencanaan jangka menengah
3. Bab II point 2.1. Capaian Kinerja Makro
  - a) Pada Poin Indeks Pembangunan Manusia  
Belum mencantumkan analisa setiap rincian dari 3 dimensi pembangunan manusia sebagai dasar penghitungan data IPM yaitu
    - 1) Tidak diketahui berapa data dari UMUR PANJANG
    - 2) HIDUP SEHAT
    - 3) PENGETAHUAN dan STANDAR HIDUP LAYAKHanya menyebutkan angka kumulatif dari IPM sebesar 68,87 %

#### 4. Bab II poin 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

No	Uraian	Outcome	Output	Tidak ada Data
1	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	83	473	189
2	Indikator Kinerja Kunci Hasil	29	102	16
3	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang	5	16	1
Jumlah seluruhnya .....		117	591	206

indikator kinerja kunci belum ada data sebanyak 206 indikator output

#### B. Pencermatan Data dukung IKK

Pencermatan data dukung dilakukan dengan melakukan penelitian mengenai sumber data, akurasi penghitungan dan kebenaran yang meliputi IKK atas :

- a. Bobot nilai perbidang urusan pemerintahan  
Pembobotan merupakan kewenangan dari Tim Daerah yang merupakan Evaluator gabungan dari BPKP Perwakilan, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan Biro Otonomi Daerah yang dilaksanakan pada saat Evaluasi LPPD Kabupaten Humbang Hasundutan.
- b. Bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang Urusan pemerintahan  
Pembobotan merupakan kewenangan dari Tim Daerah yang merupakan Evaluator gabungan dari BPKP Perwakilan, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan Biro Otonomi Daerah yang dilaksanakan pada saat Evaluasi LPPD Kabupaten Humbang Hasundutan.

### III. Simpulan dan Rekomendasi

#### A. Simpulan

1. Data dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah  
Telah memiliki sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan dan metode dan teknis atas pengumpulan data dapat dijelaskan.
2. Data tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah karena :
  - 1) Data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan Data atas realisasi APBD Tahun Anggaran 2020.
  - 2) Data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data sebanyak 206 data indikator
  - 3) Metode, Teknik pengumpulan dan analisis data tidak dapat dijelaskan Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum mencantumkan analisa setiap rincian dari 3 dimensi pembangunan manusia.
  - 4) Program Pembangunan Daerah tidak ada rincian dari nama program sesuai dengan dokumen perencanaan jangka menengah.

B. Rekomendasi

Agar Tim Penyusun LPPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 melakukan :

1. Koordinasi kepada BPS untuk melengkapi Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan analisa 3 dimensi pembangunan manusia yang terperinci.
2. Melengkapi Isi materi dari Program Pembangunan Daerah dengan rincian dari nama program sesuai dengan dokumen perencanaan jangka menengah.

IV. Penutup

Demikian disampaikan hasil revidi ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Doloksanggul, 18 . Maret 2021

INSPEKTUR,



Drs. B.P. SIAHAAN, M.M  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19631023 198712 1 001



C. CATATAN HASIL REVIU (CHR)

Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Humbang Hasundutan Inspektorat  <b>CATATAN HASIL REVIU KK 03</b>	Disusun Oleh / Tanggal	Lodwyk Pakpahan, S.H. 
	Direviu Oleh / Tanggal	Ganda Tua Napitupulu, S.T. 
	Disetujui Oleh / Tanggal	Drs. Manusun Lumbantorua 

Uraian Catatan Hasil Reviu	Indeks KKR																									
Penyelenggaraan LPPD meliputi :																										
1. Penetapan IKK Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020	01																									
2. Teknik Pengumpulan Data Kinerja Laporan dari OPD, Data BPS dan Data sumber lainnya	01																									
3. Metodologi Pengukuran Kinerja Rumus sesuai yang ditetapkan di Permendagri No 18 Tahun 2020	01																									
4. Analisis, Pembobotan dan Interpretasi Kinerja	01																									
Tidak dilaksanakan Tim Reviu disebabkan hal tersebut merupakan Kewenangan dari Tim Daerah yang merupakan Evaluator gabungan dari BPKP Perwakilan, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan Biro Otonomi Daerah Setdakab Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada saat Evaluasi LPPD Kabupaten Humbang Hasundutan	01																									
Kesesuaian Sistematika dan materi	02																									
1. Sistematika Secara garis besar sistematika dokumen LPPD telah sesuai dengan : 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 serta 2) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/6931/OTDA tanggal 18 Desember 2020 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2020.																										
2. Materi Secara garis besar isi materi dokumen LPPD telah sesuai, namun ada beberapa catatan antara lain : 1. Data Realisasi APBD tidak mencantumkan sumber data 2. Pada Sub 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah, Huruf c Program Pembangunan Daerah ternyata tidak ada rincian dari nama program sesuai dengan dokumen perencanaan jangka menengah 3. Bab II poin 2.1. Capaian Kinerja Makro a) Pada Poin Indeks Pembangunan Manusia Belum mencantumkan analisa setiap rincian dari 3 dimensi pembangunan manusia sebagai dasar penghitungan data IPM yaitu 1) Tidak diketahui berapa data dari UMUR PANJANG 2) HIDUP SEHAT 3) PENGETAHUAN dan STANDAR HIDUP LAYAK Sumber informasi utama atas IPM juga tidak ada. Hanya menyebutkan angka kumulatif dari IPM sebesar 68,87	02																									
4. Bab II poin 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah																										
<table border="1" data-bbox="267 1781 1242 2006"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Outcome</th> <th>Output</th> <th>Tidak ada Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Indikator Kinerja Kunci Keluaran</td> <td>83</td> <td>473</td> <td>189</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Indikator Kinerja Kunci Hasil</td> <td>29</td> <td>102</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang</td> <td>5</td> <td>16</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah seluruhnya .....</td> <td>117</td> <td>591</td> <td>206</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Outcome	Output	Tidak ada Data	1	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	83	473	189	2	Indikator Kinerja Kunci Hasil	29	102	16	3	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang	5	16	1	Jumlah seluruhnya .....		117	591	206	
No	Uraian	Outcome	Output	Tidak ada Data																						
1	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	83	473	189																						
2	Indikator Kinerja Kunci Hasil	29	102	16																						
3	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang	5	16	1																						
Jumlah seluruhnya .....		117	591	206																						
indikator kinerja kunci belum ada data sebanyak 206 indikator output																										



Pengujian verifikasi dan validitas Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah					02
Dilakukan secara sampel terhadap Capaian Kinerja Dinas Pendidikan (DISDIK) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)					
A. Capaian kinerja makro					
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					02
Tahun 2019 sebesar 68,83 Tahun 2020 sebesar 68,87 Peningkatan sebesar 0,06					
2. Angka Kemiskinan					02
Tahun 2019 sebesar 8,75 % Tahun 2020 sebesar 9,36 % Peningkatan sebesar 6.97					
3. Angka pengangguran					02
Tahun 2019 sebesar 0,33 % Tahun 2020 sebesar 0,84 % Peningkatan sebesar 0.51					
4. Pertumbuhan Ekonomi					02
Tahun 2019 sebesar 4.94 % Tahun 2020 sebesar -0.13					
5. Pendapatan Perkapita					02
PDRB Per Kapita (ADHB) (Rp) Tahun 2019 sebesar Rp. 31,291,803 PDRB Per Kapita (ADHB) (Rp) Tahun 2020 sebesar Rp. 31,930,248 Peningkatan sebesar 0,2 %					
6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)					02
Tahun 2018 sebesar 0.291 % Tahun 2019 dan 2020 Belum rilis					
B. Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan					
1. Bobot nilai perbidang urusan pemerintahan					02
Pembobotan merupakan kewenangan dari Tim Daerah yang merupakan Evaluator gabungan dari BPKP Perwakilan, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan Biro Otonomi Daerah Setdakab Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada saat Evaluasi LPPD Kabupaten Humbang Hasundutan.					
2. Bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang Urusan pemerintahan					
Pembobotan merupakan kewenangan dari Tim Daerah yang merupakan Evaluator gabungan dari BPKP Perwakilan, Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan Biro Otonomi Daerah Setdakab Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada saat Evaluasi LPPD Kabupaten Humbang Hasundutan.					
Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah					
Merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi ( Opini BPK. Nilai RB.....					02
- Target kinerja					
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	
1	Terpeliharanya toleransi antar umat beragama	Jumlah konflik antar umat beragama	Jumlah	0	
2	Meningkatnya akses pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (ARLS)	Tahun	10,30	
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun	70	
4	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penurunan angka kemiskinan	Persen	8.90	
5	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Peringkat LPPD	Peringkat (Provinsi)	3	
		Nilai evaluasi AKIP	Predikat	BB	
		Opini BPK	Opini	WTP	
		Persentase Implementasi e-Government	Nilai	2.2	
6	Meningkatnya produksi bahan pangan utama	Persentase pertumbuhan produksi pertanian	Persen	5	



		Persentase pertumbuhan produksi peternakan dan perikanan	Persen	3
7	Meningkatnya pertumbuhan PDRB	Persentase pertumbuhan PDRB	Persen	3.90
8	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	Orang	148.399
9	Meningkatnya infrastruktur jaringan jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	71,16

- Pengukuran capaian kinerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2020			Capaian Kinerja (%)	Interprestasi
			Target	Satuan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Misi Pertama: Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</b>							
1	Terpeliharanya toleransi antar umat beragama	Jumlah konflik antar umat beragama	0	Jumlah	0	100	Baik
<b>Misi Kedua : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam</b>							
2	Meningkatnya akses pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (ARLS)	10,30	Tahun	9,54	92,62	Baik
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	70	Tahun	69,52	99,3	Baik
4	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penurunan angka kemiskinan	8,90	Persen	9,36	105	Sangat Baik
<b>Misi Ketiga : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik</b>							
5	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Peringkat LPPD	3	Peringkat (Provinsi)	-	n/a	Masih dalam proses penilaian
		Nilai evaluasi AKIP	BB	Predikat	-	-	Masih dalam proses penilaian
		Opini BPK	WTP	Opini	-	-	Masih dalam proses penilaian
		Persentase Implementasi e-Government	2.2	Nilai	2,6	118	Sangat Baik
<b>Misi Keempat : Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan</b>							
6	Meningkatnya produksi bahan pangan utama	Persentase pertumbuhan produksi pertanian	5	Persen	-4,199	-83,98	Kurang
		Persentase pertumbuhan produksi peternakan dan perikanan	3	Persen	-8,25	-275	Kurang
7	Meningkatnya pertumbuhan PDRB	Persentase pertumbuhan PDRB	3.90	Persen	-0,13	-3,3	Kurang
8	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	148.399	Orang	100.875	68	Cukup
<b>Misi Kelima :Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah</b>							
9	Meningkatnya infrastruktur jaringan jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik	71,16	Persen	73,19	102	Sangat Baik

- Analisis efisiensi penggunaan sumber daya  
 Belanja Tidak Langsung  
 Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020

NO	BELANJA TIDAK LANGSUNG	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	411.866.855.232	377.185.042.213	91
2	Belanja Hibah	42.728.915.200	41.207.643.200	96
3	Belanja Bantuan Sosial	430.080.000	365.080.000	84
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	175.203.643.593	175.203.643.565	100
5	Belanja Tidak Terduga	47.842.908.408	23.809.818.557	49
JUMLAH		678.072.402.433	617.771.227.535	91

Belanja Langsung  
 Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020

NO	BELANJA LANGSUNG	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	22.479.425.000	21.472.916.012	95
2	Belanja Barang dan Jasa	189.666.178.834	182.672.528.563	96
3	Belanja Modal	131.610.908.084	118.464.935.599	90
JUMLAH		343.756.511.918	322.610.380.174	93

Sehingga total realisasi anggaran Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020 adalah Rp 940.381.607.709 dengan target Rp 1.021.828.914.351 dengan capaian realisasi anggaran adalah 92,02%, dan dapat dilihat pada grafik berikut

- Analisis program kegiatan yang mendukung capaian kinerja.  
 Telah tertuang dalam Bab II Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

1. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan diterima oleh daerah yang provinsi dari pemerintah pusat



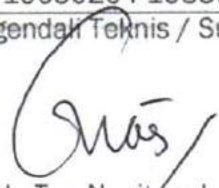




Tidak ada

2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau provinsi dari pemerintah daerah provinsi.

02

- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerima alokasi sebesar Rp. 124.374.983.000 untuk disalurkan sebagai Dana Desa ke 153 Desa se-Kabupaten Humbang Hasundutan yang merupakan Penugasan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah,
- 2) Pemberian dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan bagi 153 desa se-Kabupaten Humbang Hasundutan dengan alokasi Rp. 50.334.355.200.
- 3) Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian menerima alokasi sebesar Rp. 3.000.000.000 untuk Program Revitalisasi Pasar Rakyat Doloksanggul yang merupakan Penugasan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- 4) Dinas Pertanian menerima alokasi sebesar Rp. 3.673.000.000 untuk Peningkatan Produksi dan Nilai tambah Hortikultura yang merupakan Penugasan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- 5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima alokasi sebesar Rp. 35.000.000.000 yang merupakan penugasan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.



Simpulan (antara lain)	
<p>A. Data dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Telah memiliki sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan dan metode dan teknis atas pengumpulan data dapat dijelaskan.</p> <p>B. Data tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data tidak memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan Data atas realisasi APBD Tahun Anggaran 2020.</li> <li>2. Data tidak tersedia pada lembaga yang dinyatakan sebagai sumber data sebanyak 206 data indikator</li> <li>3. Metode, Teknik pengumpulan dan analisis data tidak dapat dijelaskan Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum mencantumkan analisa setiap rincian dari 3 dimensi pembangunan manusia.</li> <li>4. Program Pembangunan Daerah tidak ada rincian dari nama program sesuai dengan dokumen perencanaan jangka menengah.</li> </ol>	
Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui.	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atas analisa 3 dimensi pembangunan manusia.</li> <li>2. Isi materi dari Program Pembangunan Daerah tidak ada rincian dari nama program sesuai dengan dokumen perencanaan jangka menengah.</li> </ol>	
Wakil Penanggungjawab   Drs. Manusun Lumbantoruan NIP. 19650204 198803 1 005	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah   Naek M. Sinambela, S.Sos., M.M. NIP 19691111 19909 1 001
Pengendali Teknis / Supervisor   Ganda Tua Napitupulu, S.P. NIP. 19750318 200502 1 002	Tim Penyusun LPPD   Mikael A. Simatupang, S.STP NIP. 19920407 201406 1 001
Ketua Tim Pereviu   Lodwyk Harraehan Pakpahan, S.H. NIP. 19790525 201001 1 028	
Anggota Tim 1   Sudirman Sinaga, S.T. NIP. 19801112 200904 1 006	
Anggota Tim 2   Lambok Sri Dewi Banjarnahor NIP. 19821015 200701 2 003	



## **KATA PENGANTAR**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan kinerja instansi pemerintah daerah selama satu tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat 1 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 sesuai dengan Indikator yang ditetapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 ini disusun untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Atasan untuk pengembangan kapasitas Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun yang akan datang.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.1.1. PENJELASAN UMUM .....	1
1.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH .....	15
1.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL .....	44
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENY. PEMERINTAHAN DAERAH</b> .....	<b>47</b>
2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO.....	47
2.2. CAPAIAN KINERJA PENY. URUSAN PEMERINTAHAN .....	51
2.2.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN .....	32
1. Pendidikan .....	52
2. Kesehatan .....	55
3. Pekerjaan Umum .....	57
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	63
5. Trantib Umum & Perlindungan Masyarakat .....	65
6. Sosial .....	68
7. Tenaga Kerja.....	70
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	74
9. Pangan .....	75
10. Pertanahan .....	76
11. Lingkungan Hidup.....	78
12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil .....	81
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	82
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .....	81
15. Perhubungan .....	84
16. Komunikasi dan Informatika .....	85
17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	90
18. Penanaman Modal.....	94
19. Kepemudaan dan Olah Raga .....	95
20. Statistik .....	95
21. Persandian .....	96
22. Kebudayaan .....	97
23. Perpustakaan .....	99
24. Kearsipan .....	100
25. Kelautan dan Perikanan .....	102
26. Pariwisata .....	103
27. Pertanian .....	104
28. Perdagangan .....	105
29. Perindustrian .....	110

2.2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL -----	111
1. Pendidikan -----	112
2. Kesehatan -----	111
3. Pekerjaan Umum -----	115
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman -----	118
5. Trantib Umum & Perlindungan Masyarakat -----	119
6. Sosial -----	120
7. Tenaga Kerja-----	121
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak--	122
9. Pangan -----	123
10. Pertanahan -----	124
11. Lingkungan Hidup-----	124
12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil -----	125
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa -----	126
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana----	127
15. Perhubungan-----	128
16. Komunikasi dan Informatika -----	129
17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah-----	130
18. Penanaman Modal-----	130
19. Kepemudaan dan Olah Raga -----	130
20. Statistik -----	131
21. Persandian-----	131
22. Kebudayaan -----	131
23. Perpustakaan -----	131
24. Kearsipan -----	132
25. Kelautan dan Perikanan -----	133
26. Pariwisata-----	133
27. Pertanian-----	133
28. Perdagangan-----	134
29. Industri -----	135
2.2.3. IKK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN -----	137
1. Pencanaan Keuangan-----	137
2. Pengadaan -----	138
3. Kepegawaian -----	139
4. Manajemen Keuangan -----	140
5. Transparansi dan Partisipasi Publik -----	141
2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH -----	142
<b>PENGGABUNGAN IKK OUTPUT DAN IKK OUTCOME -----</b>	<b>208</b>



<b>BAB III</b>	<b>CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN -----</b>	<b>285</b>
	Matriks Capaian Pelaksanaan Tugas Pembantuan -----	288
<b>BAB IV</b>	<b>PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM -----</b>	<b>291</b>
4.1.	Urusan Pendidikan -----	291
4.2.	Urusan Kesehatan -----	293
4.3.	Urusan Pekerjaan Umum-----	297
4.4.	Urusan Perumahan Rakyat -----	298
4.5.	Urusan Trantib Linmas -----	299
4.6.	Urusan Sosial-----	301
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

#### **1.1.1 Penjelasan Umum**

##### **a. Undang-Undang Pembentukan Daerah**

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

##### **b. Data Geografis Wilayah**

Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan berada di jajaran Bukit Barisan dengan keadaan tanah umumnya berbukit dan bergelombang yaitu 69 persen tergolong tanah miring/terjal, 20 persen tanah landai dan hanya 11 persen tanah datar. Terdapat banyak lembah yang terjal dan mempunyai iklim yang sejuk. Kondisi jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah jenis tanah yang berasal dari tuf andesit yang menghasilkan tanah podsolik yang sifatnya sangat erosif dan sebagian kecil tanah litosol yang berada pada DTA Danau Toba dan lahan ini berada pada ketinggian 600-1.300 meter diatas permukaan laut (mdpl).

Kabupaten Humbang Hasundutan berada di bagian tengah wilayah Provinsi Sumatera Utara di bagian Barat kawasan Danau Toba yang terletak pada garis 2° 1' - 2° 28' Lintang Utara (LU) dan 98° 10' -98° 58' Bujur Timur (BT). Kondisi fisik Kabupaten Humbang Hasundutan berada pada ketinggian antara 330-2.075 meter diatas permukaan laut (mdpl).

##### **✓ Batas Administrasi Daerah**

Secara administrasi Kabupaten Humbang Hasundutan berbatasan dengan empat kabupaten yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Samosir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pakpak Bharat;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara.

### c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan dari tahun ke tahun mengalami perubahan naik turun, hal itu disebabkan pemutakhiran data yang semakin akurat sehingga data-data ganda dihapuskan.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Kepala Keluarga
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1	Parlilitan	10.265	10.197	20.462	5.561
2	Pollung	11.030	10.890	21.920	5.333
3	Baktiraja	3.801	3.833	7.684	2.127
4	Paranginan	7.583	7.694	15.277	3.879
5	LintongNihuta	17.176	16.988	34.164	8.403
6	Doloksanggul	25.877	25.918	51.795	12.963
7	Sijamapolang	3.203	3.103	6.306	1.655
8	Onanganjang	5.619	5.739	11.358	3.049
9	Pakkat	11.865	12.225	24.090	6.837
10	Tarabintang	4.128	4.137	8.265	2.193
<b>TOTAL</b>		<b>100.547</b>	<b>100.774</b>	<b>201.321</b>	<b>52.000</b>

Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Humbang Hasundutan

### ❖ Komposisi Penduduk:

#### 1. Struktur Usia

NO.	KELOMPOK UMUR	2018	2019	2020
1	00-04 TAHUN	11.836	20.439	22.446
2	05-09 TAHUN	22.141	24.458	24.779
3	10-14 TAHUN	14.815	24.433	24.028
4	15-19 TAHUN	22.728	19.220	18.152
5	20-24 TAHUN	17.191	13.748	13.517
6	25-29 TAHUN	13.086	11.951	11.693
7	30-34 TAHUN	13.106	12.799	12.663
8	35-39 TAHUN	13.351	12.317	12.184
9	40-44 TAHUN	11.433	10.648	10.565
10	45-49 TAHUN	10.262	9.552	9.304
11	50-54 TAHUN	9.067	8.318	7.917
12	55-59 TAHUN	8.028	7.524	6.957
13	60-64 TAHUN	6.653	5.710	5.021
14	65-69 TAHUN	5.266	4.341	3.556
15	70-74 TAHUN	3.125	3.537	2.642
16	≥ 75 TAHUN	3.394	11.487	15.877
<b>TOTAL</b>		<b>199.424</b>	<b>200.482</b>	<b>201.321</b>

Sumber: Dinas Capilduk Kabupaten Humbang Hasundutan



2. Komposisi Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN	2019	2020
01.	TIDAK/BLM SEKOLAH	43.792	47.974
02.	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	30.574	31.062
03.	TAMAT SD/SEDERAJAT	31.163	28.461
04.	SLTP/SEDERAJAT	34.517	33.124
05.	SLTA/SEDERAJAT	52.040	51.834
06.	DIPLOMA I/II	907	842
07.	AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	2.165	2.194
08.	DIPLOMA IV/STRATA I	5.204	5.701
09.	STRATA-II	116	125
10.	STRATA-III	4	4
	<b>TOTAL</b>	<b>200.482</b>	<b>201.321</b>

Sumber: Dinas Capilduk Kabupaten Humbang Hasundutan

d. Jumlah Kecamatan dan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2036, luas wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 233.769 hektar dan luas perairan Danau Toba 1.494,91 hektar. Secara administrasi terdiri dari 10 Kecamatan, 1 Kelurahan dan 153 Desa. Luas wilayah per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wil. (Ha)	Persentase Luas
1	Pakkat	22	-	37.907,71	16,22
2	Onan Ganjang	12	-	21.296,16	9,11
3	Sijamapolang	10	-	15.682,16	6,71
4	Lintongnihuta	22	-	13.152,78	5,63
5	Paranginan	11	-	5.043,10	2,16
6	Doloksanggul	27	1	21.912,67	9,37
7	Pollung	13	-	31.141,01	13,32
8	Parlilitan	20	-	58.327,10	24,95
9	Tarabintang	9	-	26.866,16	11,49
10	Baktiraja	7	-	2.440,61	1,04
	Danau Toba			1.494,91	0,59
	<b>Jumlah</b>	<b>153</b>	<b>1</b>	<b>235.264,37</b>	<b>100,00</b>

Sumber: RTRW Kabupaten Humbang Hasundutan

**e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah**

No	NAMA OPD/UKPD
1	<b>SEKRETARIAT DAERAH;</b>
	a. Bagian Protokol
	b. Bagian Hukum
	c. Bagian Organisasi
	d. Bagian Tata Pemerintahan
	e. Bagian Ekonomi Pembangunan
	f. Bagian Kesejahteraan Sosial
	g. Bagian Umum
	h. Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
2	Sekretariat DPRD;
3	Inspektorat;
4	Dinas Pendidikan;
5	Dinas Kesehatan;
6	Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang);
7	Dinas PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman);
8	Satuan Polisi Pamong Praja;
9	Dinas Sosial;
10	Dinas Ketenagakerjaan;
11	Dinas Ketahanan Pangan;
12	Dinas Lingkungan Hidup (DLH);
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14	Dinas PMDP2A (Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak);
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
16	Dinas Perhubungan;
17	Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo);
18	Dinas Kopedagin (Koperasi Perdagangan dan Perindustrian);
19	Dinas PMP2TSP (Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu);
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22	Dinas Pertanian;
23	Dinas Peternakan dan Perikanan;
24	Dinas Pariwisata;
25	Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah);

No	NAMA OPD/UKPD
26	BPKPAD (Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah);
27	BKD (Badan Kepegawaian Daerah);
28	Badan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik);
29	BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
30	<b>KECAMATAN:</b>
	a. Doloksanggul
	b. Lintongnihuta
	c. Pakkat
	d. Parlilitan
	e. Pollung
	f. Baktiraja
	g. Paranginan
	h. Onanganjang
	i. Tarabintang
	j. Sijamapolang
	<b>Jumlah Perangkat Daerah</b>
	<b>2 Sekretariat</b>
	<b>22 Dinas</b>
	<b>Unit Kerja</b>
	<b>8 Unit Kerja</b>
	<b>Kecamatan</b>
	<b>10 Kecamatan</b>
	<b>Pegawai Pemerintah</b>
	<b>4.094 ASN</b>

*Sumber: Bagian Organisasi, BKD Kab. Humbang Hasundutan*

#### **f. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah**

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan, oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah selalu berkembang sesuai dengan tuntutan publik yang menginginkan pengelolaan keuangan daerah yang makin transparan dan akuntabel, untuk itu pengelolaan keuangan disesuaikan dengan perkembangan program-program Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan menjadi prioritas dalam Pembangunan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun

anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2020 dilakukan melalui mekanisme perencanaan secara bertahap. Berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 2), maka untuk melaksanakan pembangunan setiap tahunnya dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu satu tahun. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara.

Perencanaan pembangunan didahului dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa/Kelurahan, dilanjutkan Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten. Melaksanakan Forum SKPD Kabupaten untuk membahas prioritas pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan, mengisi Rencana Kerja (Renja) SKPD. Forum SKPD menghasilkan Rancangan Renja SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran SKPD serta prioritas kegiatan berdasarkan sumber pendapatan. Musrenbang Kabupaten menetapkan arah kebijakan, prioritas/kegiatan, plafon/pagu dana berdasarkan tugas dan fungsi SKPD serta



daftar prioritas kegiatan berdasarkan sumber APBD. Hasil Musrenbang Kabupaten dibahas di Forum SKPD dan Musrenbang Provinsi berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Provinsi dan APBN.

#### A. Target dan Realisasi Pendapatan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2020, rekapitulasi target dan realisasi pendapatan daerah untuk setiap kelompok dan jenis pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>70.130.037.834</b>	<b>67.913.047.513</b>	<b>96,84</b>
	Hasil Pajak Daerah	10.287.602.000	9.011.203.725	87,59
	Hasil Retribusi Daerah	5.252.017.815	3.409.795.049	64,92
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.787.003.560	4.180.899.839	61,60
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	47.803.414.459	51.311.148.900	107,34
<b>B</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>764.887.262.000</b>	<b>649.888.031.583</b>	<b>84,97</b>
	Bagi Hasil Pajak	10.905.607.000	10.315.436.224	94,59
	Bagi Hasil Bukan Pajak	2.311.242.000	3.158.012.968	136,64
	Dana Alokasi Umum	543.828.964.000	489.171.029.000	89,95
	Dana Alokasi Khusus	207.841.449.000	147.243.553.391	70,84
<b>C</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>217.428.388.316</b>	<b>221.669.925.124</b>	<b>101,95</b>
	Pendapatan Hibah	41.568.207.600	52.194.123.669	125,56
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	27.331.945.716	25.411.707.455	92,97
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	22.499.781.000	19.689.111.000	87,51
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	126.028.454.000	124.374.983.000	98,69
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.052.445.688.150</b>	<b>939.471.004.220</b>	<b>89,27</b>

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Hasil Pajak Daerah

NO	OBJEK PAJAK	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Pajak Hotel	96.440.000	38.165.000	39,57
2	Pajak Restoran	2.100.000.000	1.431.768.130	68,18
3	Pajak Hiburan	2.112.000	1.000.000	47,35
4	Pajak Reklame	149.050.000	179.349.620	120,33
5	Pajak Penerangan Jalan	3.190.000.000	3.437.945.979	107,77
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2.500.000.000	1.541.392.129	61,66
7	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.650.000.000	1.760.569.067	106,70
8	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	600.000.000	621.013.800	103,50
<b>JUMLAH</b>		<b>10.287.602.000,00</b>	<b>9.011.203.725,00</b>	<b>97,27</b>

b. Hasil Retribusi Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	50.600.000,00	12.972.000,00	25,64
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	400.000.000,00	201.150.000,00	50,29
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.250.000.000,00	739.969.000,00	59,20
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60.000.000,00	50.000.000,00	83,33
5	Dinas Lingkungan Hidup	156.000.000,00	133.999.000,00	85,90
6	Dinas Perhubungan	150.915.000,00	172.527.000,00	114,32
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	220.000.000,00	198.938.896,00	90,43
8	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	715.000.000,00	700.935.000,00	98,03
9	Dinas Pariwisata	200.000.000,00	78.788.000,00	39,39
10	Dinas Pertanian	1.500.000.000,00	868.891.125,00	57,93
11	Dinas Peternakan dan Perikanan	300.000.000,00	98.090.000,00	32,70
12	Sekretariat Daerah Kabupaten	100.000.000,00	0,00	-
13	Kantor Camat Doloksanggul	19.504.700,00	29.288.380,00	150,16
14	Kantor Camat Lintongnihuta	55.243.405,00	53.483.250,00	96,81
15	Kantor Camat Ononganjang	5.469.500,00	16.335.000,00	298,66
16	Kantor Camat Pakkat	23.811.350,00	17.364.710,00	72,93
17	Kantor Camat Parlilitan	8.821.000,00	5.645.700,00	64,00
18	Kantor Camat Pollung	1.320.000,00	1.150.000,00	87,12
19	Kantor Camat Paranginan	7.488.500,00	11.188.488,00	149,41
20	Kantor Camat Baktiraja	22.390.860,00	12.572.500,00	56,15
21	Kantor Camat Sijamapolang	4.353.500,00	6.507.000,00	149,47
22	Kantor Camat Tarabintang	1.100.000,00	0,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>5.252.017.815,00</b>	<b>3.409.795.049,00</b>	<b>131,59</b>

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

NO	OBJEK BAGIAN LABA USAHA DAERAH	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PT. Bank Sumut	6.787.003.560,00	4.180.899.839,00	61,60
<b>JUMLAH</b>		<b>6.787.003.560,00</b>	<b>4.180.899.839,00</b>	<b>61,60</b>

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

NO	OBJEK LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	77.000.000,00	514.044.800,00	667,59
2	Penerimaan Jasa Giro	6.555.000.000,00	2.056.464.566,00	31,37
3	Penerimaan Bunga Deposito	7.800.000.000,00	5.566.013.328,00	71,36
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	137.500.000,00	368.229.444,51	267,80
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	385.605.000,00	596.139.686,21	154,60
6	Pendapatan Dari Pengembalian	385.000.000,00	466.896.913,00	121,27
7	Pendapatan BLUD	22.343.269.459,00	34.178.230.703,00	152,97
8	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	275.533.126,00	-
9	Pendapatan Dana JKN	10.120.040.000,00	7.289.596.333,00	68,11
<b>JUMLAH</b>		<b>47.803.414.459,00</b>	<b>51.311.148.899,72</b>	<b>107,34</b>

2. Dana Perimbangan

a. Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

NO	OBJEK BAGI HASIL PAJAK	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	5.850.791.000,00	684.182.100,00	11,69
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	5.054.816.000,00	6.167.625.913,00	122,01
3	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan	0,00	384.696.300,00	0,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan bagian dari Pemerintah Pusat yang dibagi rata ke daerah	0,00	3.078.931.911,00	68,11
<b>JUMLAH</b>		<b>10.905.607.000,00</b>	<b>10.315.436.224,00</b>	<b>94,59</b>

No	Obyek Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	690.962.000,00	397.608.600,00	57,54
2	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000,00	788.276.289,00	156,78
3	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	123.776.000,00	86.763.394,00	70,10
4	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	0,00	152.993.963,00	-
5	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	138.118.000,00	134.870.850,00	97,65

No	Obyek Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
6	Bagi Hasil dari Penerimaan dari Sektor Pertambangan Umum	855.596.000,00	1.248.709.628,00	145,95
7	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	0,00	348.790.244,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>2.311.242.000,00</b>	<b>3.158.012.968,00</b>	<b>136,64</b>

b. Dana Alokasi Umum

NO	DANA ALOKASI UMUM	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Dana Alokasi Umum	543.828.964.000,00	489.171.029.000,00	89,95
<b>JUMLAH</b>		<b>543.828.964.000,00</b>	<b>489.171.029.000,00</b>	<b>89,95</b>

c. Dana Alokasi Khusus

No	DANA ALOKASI KHUSUS	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	DAK Bidang Pendidikan	32.607.890.000,00	31.165.287.880,00	95,58
2	DAK Bidang Kesehatan	20.539.141.000,00	19.498.502.672,00	94,93
3	DAK Bidang Air Minum	5.168.835.000,00	4.677.099.010,00	90,49
4	DAK Bidang Sanitasi	2.956.986.000,00	3.933.980.257,00	133,04
5	DAK Bidang Pertanian	0,00	1.120.000.000,00	0,00
6	DAK Bidang Jalan	23.186.341.000,00	0,00	-
7	DAK Penugasan	31.873.668.000,00	998.079.219,00	3,13
8	DAK Non Fisik	88.363.701.000,00	82.760.374.353,00	93,66
9	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3.090.230.000,00	3.090.230.000,00	100,00
10	DAK Bidang Sosial	54.657.000,00	0,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>207.841.449.000,00</b>	<b>147.243.553.391,00</b>	<b>70,84</b>

d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No	JENIS LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	41.568.207.600,00	52.194.123.669,00	125,56
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	27.331.945.716,00	25.411.707.455,00	92,97
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	22.499.781.000,00	19.689.111.000,00	87,51
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	126.028.454.000,00	124.374.983.000,00	98,69
<b>JUMLAH</b>		<b>217.428.388.316,00</b>	<b>221.669.925.124,00</b>	<b>101,95</b>



## B. Target dan Realisasi Belanja

### 1. Belanja Tidak Langsung

NO	BELANJA TIDAK LANGSUNG	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	415.379.290.232,02	377.185.042.213,00	90,80
2	Belanja Hibah	43.536.500.000,00	41.207.643.200,00	94,65
3	Belanja Bantuan Sosial	430.080.000,00	365.080.000,00	84,89
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	182.227.340.693,00	175.203.643.565,00	96,15
5	Belanja Tidak Terduga	4.124.300.000,00	23.809.818.557,00	577,31
<b>JUMLAH</b>		<b>645.697.510.925,02</b>	<b>617.771.227.535,00</b>	<b>95,68</b>

### 2. Belanja Langsung

NO	BELANJA LANGSUNG	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	24.209.015.000,00	21.472.916.012,00	88,70
2	Belanja Barang dan Jasa	257.001.098.682,75	182.672.528.563,50	71,08
3	Belanja Modal	195.625.937.074,22	118.464.935.599,00	60,56
<b>JUMLAH</b>		<b>476.836.050.756,97</b>	<b>322.610.380.174,50</b>	<b>67,66</b>

### 3. Alokasi Belanja untuk setiap OPD

No	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	316.492.151.509,91	293.070.591.951,50	92,60
2	Dinas Kesehatan	90.540.769.503,34	80.789.290.555,00	89,23
3	Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul	68.240.272.755,91	71.260.303.717,00	104,43
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	106.434.481.578,52	48.267.970.585,00	45,35
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	36.386.025.956,45	26.703.907.209,00	73,39
6	Satuan Polisi Pamong Praja	9.690.399.157,51	8.665.064.305,00	89,42
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.337.702.932,84	3.909.248.072,00	73,24
8	Dinas Sosial	5.564.656.771,04	3.654.743.934,00	65,68
9	Dinas Ketenagakerjaan	3.655.441.683,27	2.341.571.987,00	64,06
10	Dinas Ketahanan Pangan	3.245.088.637,41	2.681.536.678,00	82,63
11	Dinas Lingkungan Hidup	8.176.675.947,01	5.969.247.327,00	73,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.299.720.614,50	3.969.114.994,00	74,89
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	6.734.193.384,30	4.902.848.355,00	72,81
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.838.293.296,38	7.825.137.003,00	88,54
15	Dinas Perhubungan	8.775.338.892,15	4.856.425.216,00	55,34
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.394.812.810,49	4.327.062.244,00	67,67

17	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	10.077.419.780,93	4.473.093.416,00	44,39
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	3.729.096.452,53	2.633.025.597,00	70,61
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.362.434.616,63	2.112.276.496,00	48,42
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.721.333.246,45	2.742.971.093,00	73,71
21	Dinas Pariwisata	14.367.026.576,29	3.755.870.728,00	26,14
22	Dinas Pertanian	30.732.136.110,54	15.294.600.907,00	49,77
23	Dinas Peternakan dan Perikanan	9.974.610.763,64	4.396.461.441,00	44,08
24	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9.391.864.894,00	8.942.496.584,00	95,22
25	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	591.027.751,00	513.700.873,00	86,92
26	Sekretariat Daerah Kabupaten	32.449.939.710,74	20.383.572.304,00	62,82
27	Sekretariat DPRD Kabupaten	18.812.464.801,87	10.927.121.940,00	58,08
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.698.222.873,95	2.192.188.116,00	81,25
29	Kantor Camat Doloksanggul	4.839.220.294,70	4.445.408.866,00	91,86
30	Kantor Camat Lintongnihuta	2.652.865.499,44	2.464.949.551,00	92,92
31	Kantor Camat Onanganjang	3.220.089.862,50	2.838.022.772,00	88,13
32	Kantor Camat Pakkat	2.697.393.084,44	2.487.837.476,00	92,23
33	Kantor Camat Parlilitan	3.078.816.171,04	2.681.994.677,00	87,11
34	Kantor Camat Pollung	2.623.302.621,28	2.339.411.466,00	89,18
35	Kantor Camat Paranginan	1.963.702.496,87	1.743.465.369,00	88,78
36	Kantor Camat Baktiraja	2.087.157.884,35	1.399.594.500,00	67,06
37	Kantor Camat Sijamapolang	2.361.630.624,11	1.824.468.635,00	77,25
38	Kantor Camat Tarabintang	2.255.132.780,76	1.990.434.431,00	88,26
39	Inspektorat Daerah Kabupaten	6.962.725.903,73	5.252.209.441,00	75,43
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.740.055.930,31	4.397.409.665,00	76,61
41	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	243.768.806.191,28	249.278.276.094,00	102,26
42	Badan Kepegawaian Daerah	7.569.059.327,59	5.676.681.139,00	75,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.122.533.561.681,99</b>	<b>940.381.607.709,50</b>	<b>83,77</b>

4. Alokasi Belanja sesuai dengan Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN /SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
<b>A</b>	<b>Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>	<b>638.686.460.165,51</b>	<b>536.321.120.328,50</b>	<b>83,97</b>
<b>I</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>316.492.151.509,91</b>	<b>293.070.591.951,50</b>	<b>92,60</b>
1	Dinas Pendidikan	316.492.151.509,91	293.070.591.951,50	92,60
<b>II</b>	<b>Kesehatan</b>	<b>158.781.042.259,25</b>	<b>152.049.594.272,00</b>	<b>95,76</b>
1	Dinas Kesehatan	90.540.769.503,34	80.789.290.555,00	89,23
2	Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul	68.240.272.755,91	71.260.303.717,00	104,43
<b>III</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>106.434.481.578,52</b>	<b>48.267.970.585,00</b>	<b>45,35</b>
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	106.434.481.578,52	48.267.970.585,00	45,35
<b>IV</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>	<b>36.386.025.956,45</b>	<b>26.703.907.209,00</b>	<b>73,39</b>
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	36.386.025.956,45	26.703.907.209,00	73,39
<b>V</b>	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	<b>15.028.102.090,35</b>	<b>12.574.312.377,00</b>	<b>83,67</b>
1	Satuan Polisi Pamong Praja	9.690.399.157,51	8.665.064.305,00	89,42
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.337.702.932,84	3.909.248.072,00	73,24
<b>VI</b>	<b>Sosial</b>	<b>5.564.656.771,04</b>	<b>3.654.743.934,00</b>	<b>65,68</b>
1	Dinas Sosial	5.564.656.771,04	3.654.743.934,00	65,68
<b>B</b>	<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar</b>	<b>69.469.845.262,05</b>	<b>48.366.499.520,00</b>	<b>69,62</b>
<b>I</b>	<b>Tenaga Kerja</b>	<b>3.655.441.683,27</b>	<b>2.341.571.987,00</b>	<b>64,06</b>
1	Dinas Ketenagakerjaan	3.655.441.683,27	2.341.571.987,00	64,06
<b>II</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>757.296.008,00</b>	<b>132.501.000,00</b>	<b>17,50</b>
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	757.296.008,00	132.501.000,00	17,50
<b>III</b>	<b>Pangan</b>	<b>3.245.088.637,41</b>	<b>2.681.536.678,00</b>	<b>82,63</b>
1	Dinas Ketahanan Pangan	3.245.088.637,41	2.681.536.678,00	82,63
<b>IV</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	<b>8.176.675.947,01</b>	<b>5.969.247.327,00</b>	<b>73,00</b>
1	Dinas Lingkungan Hidup	8.176.675.947,01	5.969.247.327,00	73,00
<b>V</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Capil</b>	<b>5.299.720.614,50</b>	<b>3.969.114.994,00</b>	<b>74,89</b>
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.299.720.614,50	3.969.114.994,00	74,89
<b>VI</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>5.976.897.376,30</b>	<b>4.770.347.355,00</b>	<b>79,81</b>
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	5.976.897.376,30	4.770.347.355,00	79,81
<b>VII</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>8.838.293.296,38</b>	<b>7.825.137.003,00</b>	<b>88,54</b>
1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.838.293.296,38	7.825.137.003,00	88,54
<b>VIII</b>	<b>Perhubungan</b>	<b>8.775.338.892,15</b>	<b>4.856.425.216,00</b>	<b>55,34</b>

NO	URUSAN /SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Dinas Perhubungan	8.775.338.892,15	4.856.425.216,00	55,34
<b>IX</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>	<b>6.220.663.810,49</b>	<b>4.271.297.244,00</b>	68,66
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.220.663.810,49	4.271.297.244,00	68,66
<b>X</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>	<b>5.842.697.580,93</b>	<b>3.858.139.030,00</b>	66,03
1	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	5.842.697.580,93	3.858.139.030,00	66,03
<b>XI</b>	<b>Penanaman Modal</b>	<b>3.729.096.452,53</b>	<b>2.633.025.597,00</b>	70,61
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	3.729.096.452,53	2.633.025.597,00	70,61
<b>XII</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>4.362.434.616,63</b>	<b>2.112.276.496,00</b>	48,42
1	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.362.434.616,63	2.112.276.496,00	48,42
<b>XIII</b>	<b>Statistik</b>	<b>92.949.000,00</b>	<b>55.765.000,00</b>	60,00
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	92.949.000,00	55.765.000,00	60,00
<b>XIV</b>	<b>Persandian</b>	<b>81.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	-
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	81.200.000,00	0,00	-
<b>XV</b>	<b>Kebudayaan</b>	<b>694.718.100,00</b>	<b>147.143.500,00</b>	21,18
1	Dinas Pariwisata	694.718.100,00	147.143.500,00	21,18
<b>XVI</b>	<b>Perpustakaan</b>	<b>3.565.511.346,45</b>	<b>2.683.780.593,00</b>	75,27
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.565.511.346,45	2.683.780.593,00	75,27
<b>XVII</b>	<b>Kearsipan</b>	<b>155.821.900,00</b>	<b>59.190.500,00</b>	37,99
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	155.821.900,00	59.190.500,00	37,99
<b>C</b>	<b>Urusan Pilihan</b>	<b>58.613.777.550,48</b>	<b>23.914.743.962,00</b>	40,80
<b>XV</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>	<b>731.117.000,00</b>	<b>547.900.300,00</b>	74,94
1	Dinas Peternakan dan Perikanan	731.117.000,00	547.900.300,00	74,94
<b>XVI</b>	<b>Pariwisata</b>	<b>13.672.308.476,29</b>	<b>3.608.727.228,00</b>	26,39
1	Dinas Pariwisata	13.672.308.476,29	3.608.727.228,00	26,39
<b>XVI</b>	<b>Pertanian</b>	<b>39.975.629.874,19</b>	<b>19.143.162.048,00</b>	47,89
1	Dinas Pertanian	30.732.136.110,54	15.294.600.907,00	49,77
2	Dinas Peternakan dan Perikanan	9.243.493.763,64	3.848.561.141,00	41,64
<b>XVII</b>	<b>Perdagangan</b>	<b>4.234.722.200,00</b>	<b>614.954.386,00</b>	14,52
1	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	4.234.722.200,00	614.954.386,00	14,52
<b>D</b>	<b>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang</b>	<b>355.763.478.703,95</b>	<b>331.779.243.899,00</b>	<b>93,26</b>
<b>I</b>	<b>Administrasi Pemerintahan</b>	<b>91.722.831.351,05</b>	<b>67.174.667.560,00</b>	<b>73,24</b>
1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	9.391.864.894,00	8.942.496.584,00	95,22
2	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	591.027.751,00	513.700.873,00	86,92
3	Sekretariat Daerah Kabupaten	32.449.939.710,74	20.383.572.304,00	62,82
4	Sekretariat DPRD	18.812.464.801,87	10.927.121.940,00	58,08

NO	URUSAN /SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Kabupaten			
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.698.222.873,95	2.192.188.116,00	81,25
6	Kantor Camat Doloksanggul	4.839.220.294,70	4.445.408.866,00	91,86
7	Kantor Camat Lintongnihuta	2.652.865.499,44	2.464.949.551,00	92,92
8	Kantor Camat Onanganjang	3.220.089.862,50	2.838.022.772,00	88,13
9	Kantor Camat Pakkat	2.697.393.084,44	2.487.837.476,00	92,23
10	Kantor Camat Parlilitan	3.078.816.171,04	2.681.994.677,00	87,11
11	Kantor Camat Pollung	2.623.302.621,28	2.339.411.466,00	89,18
12	Kantor Camat Paranginan	1.963.702.496,87	1.743.465.369,00	88,78
13	Kantor Camat Baktiraja	2.087.157.884,35	1.399.594.500,00	67,06
14	Kantor Camat Sijamapolang	2.361.630.624,11	1.824.468.635,00	77,25
15	Kantor Camat Tarabintang	2.255.132.780,76	1.990.434.431,00	88,26
<b>II</b>	<b>Pengawasan</b>	<b>6.962.725.903,73</b>	<b>5.252.209.441,00</b>	<b>75,43</b>
1	Inspektorat Daerah Kabupaten	6.962.725.903,73	5.252.209.441,00	75,43
<b>III</b>	<b>Perencanaan</b>	<b>5.740.055.930,31</b>	<b>4.397.409.665,00</b>	<b>76,61</b>
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.740.055.930,31	4.397.409.665,00	76,61
<b>IV</b>	<b>Keuangan</b>	<b>243.768.806.191,28</b>	<b>249.278.276.094,00</b>	<b>102,26</b>
1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	243.768.806.191,28	249.278.276.094,00	102,26
<b>V</b>	<b>Kepegawaian</b>	<b>7.569.059.327,59</b>	<b>5.676.681.139,00</b>	<b>75,00</b>
1	Badan Kepegawaian Daerah	7.569.059.327,59	5.676.681.139,00	75,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.122.533.561.681,99</b>	<b>940.381.607.709,50</b>	<b>83,77</b>

### C. Pengelolaan Pembiayaan dan Investasi Daerah

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%
Pendapatan	1.052.445.688.150,00	939.471.004.219,72	(112.974.683.930,28)	89,27
Belanja T.A 2020	1.122.533.561.681,99	940.381.607.709,50	(182.151.953.972,49)	83,77
<b>Surplus/(defisit)</b>	<b>(70.087.873.531,99)</b>	<b>(910.603.489,78)</b>	<b>69.177.270.042,21</b>	<b>1,30</b>
<b>Pembiayaan</b>				
Penerimaan Pembiayaan	72.087.873.531,99	139.666.646.699,50	67.578.773.167,51	193,74
Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>70.087.873.531,99</b>	<b>137.666.646.699,50</b>	<b>67.578.773.167,51</b>	<b>196,42</b>
<b>SILPA Tahun Anggaran Berkenaan</b>	<b>0,00</b>	<b>136.756.043.209,72</b>	<b>136.756.043.209,72</b>	<b>-</b>



## **1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah**

### **a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah**

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan. Beberapa Permasalahan yang dihadapi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

#### **❖ Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

##### **1. Urusan Pendidikan**

Permasalahan dibidang pendidikan antara lain

- a. Nilai Ujian Nasional SMP masih rendah ;
- b. Rendahnya kompetensi guru;
- c. Rendahnya kompetensi manajerial Kepala Sekolah;
- d. Rendahnya kinerja Pengawas Sekolah sebagai supervisol pendidikan;
- e. Sekitar 12 % guru SD / SMP dan 77 % Tutor PAUD belum memiliki kualifikasi S1 /A-IV;
- f. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan prasekolah
- g. Kekurangan guru dan penyebaran guru belum merata;
- h. Kurangnya alat/bahan praktek penunjang pembelajaran;
- i. Kurangnya pemanfaatan sarana penunjang pembelajaran yang dimiliki satuan pendidikan.

##### **2. Urusan Kesehatan**

Permasalahan dibidang kesehatan antara lain :

- a. Masih rendahnya masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat;
- b. Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan;
- c. Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan (SDM) belum memenuhi standar;
- d. Belum terpenuhinya 5 jenis ketenagaan disetiap puskesmas;
- e. Belum seluruhnya masyarakat memiliki JKN yang sudah peserta (70,43%);

- f. Masih rendahnya kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan.

### **3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permasalahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain :

- a. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas PUPR Kabupaten Humbang Hasundutan;
- b. Belum dimutakhirkannya data base sistem Informasi Jalan dan Jembatan dalam bentuk Sistem Informasi Geografis (SIG);
- c. Kekurangan dan keterbatasan peralatan kebinamargaan serta banyaknya peralatan yang sudah tua dan rusak;
- d. Kekurangan dan keterbatasan fasilitas Laboratorium kebinamargaan;
- e. Profesionalisme dan kualitas kontraktor yang belum memadai baik yang dilihat dari hasil PQ dan proses pelaksanaan proyek;
- f. Tidak meratanya lokasi Quarry, Stone Crusher, dan AMP di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- g. Rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya rencana Tata Ruang yang baik;
- h. Tonasi kendaraan yang melebihi kapasitas keles jalan;
- i. Belum optimalnya penyediaan jaringan irigasi untuk lahan pertanian sesuai dengan kewenangan kabupaten;
- j. Belum optimalnya bangunan irigasi untuk sistem irigasi semi teknik;
- k. Masih lemahnya sistem informasi/data base jaringan irigasi untuk mengoptimalkan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- l. Keterbatasan anggaran APBD untuk pembangunan dan pemeliharaan dan peningkatan insfrastruktur PUPR.

### **4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain :

- a. Belum terlayannya air minum yang layak bagi sebagian masyarakat Humbang Hasundutan;
- b. Belum terlayannya sarana sanitasi yang layak bagi sebagian masyarakat Humbang Hasundutan;
- c. Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- d. Masih adanya sarana dan prasarana bangunan gedung dan kondisi tidak Baik;
- e. Bangunan yang belum memenuhi standar peraturan Bangunan Gedung;
- f. Masih adanya jalan lingkungan permukiman dalam kondisi tidak baik;
- g. Zonasi pendistribusian air bersih belum optimal;
- h. Belum seluruhnya sumber air memiliki instalasi Pengolahan Air (IPA);
- i. Belum adanya laboratorium penguji kualitas air;
- j. Konsentrasi Penanganan kawasan Kumah belum optimal;
- k. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengurusan IMB;
- l. Kurangnya anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman.

## **5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

### **a. Permasalahan di bidang ketentraman Dan Ketertiban Umum antara lain :**

1. Kurang optimalnya penyelenggaraan pengelolaan, pengadministrasian urusan ketatausahaan Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah;
3. Masih rendahnya pendataan terhadap Pelanggaran Produk Hukum Daerah di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan;

4. Masih lemahnya koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya dalam menangani masalah gangguan kamtibmas;
5. Belum optimalnya ketersediaan POS Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

**b. Permasalahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik**

1. Rendahnya partisipasi ormas dalam menjalankan fungsi dan organisasi;
2. Rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilu;
3. Rendahnya penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik;
4. Kurang maksimalnya penanganan konflik Ideologi, Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya.

**c. Permasalahan di bidang penanggulangan bencana daerah antara lain**

1. Masih rendahnya kualitas aparatur dalam penanggulangan bencana;
2. Kurangnya Jumlah aparatur BPBD;
3. Belum tersedianya regulasi yang mengatur penanggulangan bencana seperti perda Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontijensi serta Kajian Resiko Bencana (KRB);
4. Terbatasnya sarana prasarana yang tersedia;
5. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana ;
6. Kurangnya Kemandirian masyarakat dalam hal penanggulangan bencana;
7. Terbatasnya anggaran dalam penanggulangan bencana;
8. Potensi ancaman baru belum terpetakan dengan baik.

## **6. Urusan Sosial**

Permasalahan di bidang Sosial antara lain :

1. Kurangnya Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Program Pembangunan Bidang Sosial;
3. Tingginya Jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan;
4. Meningkatnya penyandang masalah sosial;
5. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin tinggi;
6. Buruknya kondisi kesejahteraan sosial masyarakat;
7. Kondisi perekonomian nasional yang belum pulih sepenuhnya.

### **❖ Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

#### **1. Urusan Ketenagakerjaan**

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan antara lain :

- a. Rendahnya Kompetensi tenaga kerja;
- b. Perluasan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;
- c. Rendahnya penyerapan Tenaga Kerja di Perusahaan;
- d. Belum maksimalnya pemenuhan hak-hak pekerja.

#### **2. Urusan Ketahanan Pangan**

Permasalahan di bidang Ketahanan Pangan antara lain :

- a. Belum adanya gedung cadangan pangan pemerintah daerah sebagai penyangga pangan jika terjadi krisis pangan;
- b. Harga Bahan Pangan pokok masih belum stabil terutama pada saat musim panen raya, musim paceklik dan menjelang hari besar keagamaan nasional;
- c. Kurangnya data keluar masuk pangan antara wilayah sehingga sangat menghambat dalam penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah;



- d. Penanganan daerah rawan pangan Khususnya pemberdayaan masyarakat desa miskin belum maksimal;
- e. Belum tercapainya skor konsumsi, ketersediaan, mutu, keragaman pangan dan keseimbangan gizi sesuai dengan Pola Pangan Harapan (PPH) ideal;
- f. Masih kurangnya pola konsumsi pangan masyarakat yang tidak beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- g. Masih banyaknya pangan segar yang belum terjamin mutu dan keamanannya yang beredar di masyarakat;
- h. Masih rendahnya pelaku-pelaku usaha yang menyediakan keragaman makanan yang bergizi.

### **3. Urusan Lingkungan Hidup**

Permasalahan di bidang Lingkungan Hidup antara lain :

- a. Meningkatnya luas lahan kritis;
- b. Kualitas air dan udara tercemar ringan;
- c. Penanganan dan pengelolaan sampah belum tertangani secara ramah lingkungan.

### **4. Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil**

Permasalahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Capil antara lain :

- a. Minimnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Dinas Dukcapil
- b. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukannya;
- c. Kurangnya fasilitas peralatan teknologi informasi;
- d. Jauhnya jarak tempuh masyarakat ke kantor Dukcapil dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan;
- e. Masih terbatsnya jaringan komunikasi di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- f. Kurangnya kordinasi lintas OPD dan instansi lainnya;
- g. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan teknologi informasi;
- h. Belanko dari Kemendagri sering tidak tersedia;

- i. Penerbitan administrasi pendudukan ada yang terlambat karena falidasi dari Kemendagri (Data kependudukan tidak tunggal) dan sifatnya menunggu.

#### **5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahn di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain :

- a. Pemahaman masyarakat tentang hidup sehat dan lingkungan sehat;
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia Penyelenggara Pemerintahan Desa tentang Tugas Pokok dan Fungsi yang mengakibatkan tidak terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat;
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia Anggota Kelembagaan Masyarakat di Desa;
- d. Kurangnya Sumber Daya Manusia Para Penyelenggara Pemerintahan Desa dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta transparansi pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

#### **6. Urusan Pengendalian Penduduk dan KB**

Permasalahan di bidang Pengendalian Penduduk dan KB antara lain :

- a. Rata-rata jumlah anak perkeluarga di Humbang Hasundutan masih tinggi 4,1 dibandingkan dengan tujuan nasional yaitu 2 anak;
- b. Pemakaian kontrasepsi modern khususnya MKJP 32,28% masih rendah dibandingkan dengan sasaran Kabupaten 44,4%;
- c. Persentase unmet need masih tinggi 11,57% (PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani karena beberapa faktor) dibandingkan dengan sasaran kabupaten 10,02%;
- d. Masih rendahnya cakupan anggota kelompok ketahanan keluarga yang menjadi peserta KB;
- e. Cakupan penyediaan data informasi keluarga belum 100%.

## **7. Urusan Perhubungan**

Permasalahan di bidang perhubungan antara lain :

- a. Kemacetan lalu lintas terutama pada saat hari pekan;
- b. Tidak lengkapnya dokumen perizinan angkutan umum;
- c. Masih banyaknya kendaraan angkutan umum yang tidak laik jalan;
- d. Masih kurangnya sarana lalu lintas.

## **8. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan di bidang Komunikasi dan Informatika antara lain :

- a. Belum tersedianya sistem informasi yang terintegrasi;
- b. Rendahnya keterbukaan informasi public pemerintahan daerah yang akuntabel;
- c. Minimnya ketersediaan kualitas data statistik sektoral;
- d. Minimnya tingkat keamanan data dan informasi pemerintahan daerah;
- e. Rendahnya akuntabilitas kinerja ASN.

## **9. Urusan Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian**

Permasalahan di bagian Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian antara lain :

- a. Kurangnya minat para pengusaha koperasi dan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya di bidang pertanian;
- b. Kurangnya permodalan koperasi dan UMKM di Bidang Pertanian;
- c. Revitalisasi Pasar yang belum optimal.

## **10. Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu**

Permasalahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu antara lain :

- a. Belum tersedianya data dan informasi komoditi unggulan daerah yang akurat sebagai materi pendukung perbaikan iklim investasi yang berdaya saing;

- b. Belum adanya forum yang mempertemukan pengusaha ,  
UMKM dan pemerintah untuk membahas kegiatan  
Penanaman Modal;
- c. Materi/bahan promosi masih bersifat umum (belum  
detail, akurat, komprehensif dan up to date) sehingga  
promosi belum efektif dan efisien dalam menjaring  
penanaman modal;
- d. Belum tersedianya regulasi yang mengatur tentang  
pemberian kemudahan fasilitas , insentif;
- e. Masih minimnya kemampuan SDM dalam mendukung  
pengembangan penanaman Modal;
- f. Masih perlu peningkatan sarana infrastruktur untuk  
mendukung dan menarik minat investor untuk  
menambah modal;
- g. Masih rendahnya kesadaran penanam Modal dalam  
menyampaikan laporan kegiatan usaha;
- h. Belum maksimalnya pemanfaatan dan pengembangan  
sistem aplikasi pelayanan perijinan dan Non Perizinan;
- i. Belum adanya Rencana Detail Tata Ruang untuk  
mendukung pengembangan penanaman modal;
- j. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian  
pelaksanaan perizinan Penanaman Modal.

## **11. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Permasalahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga antara  
lain :

- a. Kurangnya fasilitas dan pembinaan terhadap pemuda  
baik dalam bidang pertanian, penanggulangan bencana,  
tanggap lingkungan, inovasi dan kreatifitas;
- b. Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda masih terbatas.  
Tersendatnya kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan  
pemuda antara lain disebabkan belum optimalnya peran  
organisasi kepemudaan;
- c. Kegiatan olahraga belum membudaya ditengah-tengah  
masyarakat;
- d. Terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana  
olahraga;

- e. Kurangnya penghargaan sebagai motivasi bagi insan olahraga yang berdedikasi dan atlet berprestasi.

## **12. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan**

Permasalahan di bidang perpustakaan dan kearsipan antara lain :

- a. Keterbatasan sarana prasarana;
- b. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM aparatur;
- c. Rendahnya kepatuhan pencipta arsip (OPD/Unit Kerja) tentang pengelolaan kearsipan;
- d. Rendahnya minat baca masyarakat;
- e. Terbatasnya sumberdana, sumber dana pengelolaan perpustakaan dan kearsipan hanya dari APBD;
- f. Belum tersedia jabatan fungsional arsiparis pada OPD/Unit Kerja;
- g. Terbatasnya alokasi anggaran unit kearsipan pada setiap OPD/Unit Kerja;
- h. Belum tersedia ruangan unit kearsipan pada setiap OPD/Unit Kerja;
- i. Belum tersedia petugas khusus pengelola perpustakaan sekolah pada umumnya pengelola perpustakaan para guru.

### **❖ Urusan Pilihan**

#### **1. Urusan Pariwisata**

Permasalahan di Pariwisata antara lain:

- a. Terbatasnya jumlah dan tenaga terampil di bidang kepariwisata;
- b. Terbatasnya anggaran;
- c. Kurangnya kordinasi dengan lintas sektor dan stakeholder lainnya;
- d. Kurangnya pengenalan masyarakat khususnya para remaja kebudayaannya sendiri;
- e. Kurangnya pemahaman sadar wisata bagi masyarakat, sehingga kemitraan masih rendah
- f. Kurangnya kualitas pengelolaan objek wisata di Kabupaten Humbang Hasundutan;



- g. Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata;
- h. Aksesibilitas menuju objek wisata belum optimal;
- i. Terbatasnya restoran dan penginapan yang representative;
- j. Belum bergilirnya Potensi Atraksi Budaya.

## **2. Urusan Pertanian**

Permasalahan di bidang pertanian antara lain :

- a. Masih luasnya lahan kosong yg dapat di jadikan lahan pertanian;
- b. Keterbatasan sarana prasarana dalam pencetakan lahan baru;
- c. Penurunan kualitas lahan;
- d. Rata-rata kepemilikan lahan yg sempit;
- e. Sumber Daya Manusia;
- f. Alokasi anggaran Dinas Pertanian masih kecil berkisar 1-2% dari total APBD tahun berjalan.

## **3. Urusan Perternakan dan Perikanan**

Permasalahan di bidang Pertenakan dan Perikanan antara lain:

- a. Rendahnya SDM petani peternak dan pembudi daya ikan dalam managemen dan pelaksanaan peternakan, kesehatan hewan dan perikanannya;
- b. Kuantitas dan kualitas SDM aparat belum maksimal;
- c. Peternak dan pembudi daya ikan di Kabupaten Humbang Hasundutan masih didominasi usaha sekala kecil;
- d. Pemanfaatan lahan untuk peternakan dan perikanan masih terbatas;
- e. Harga produk ternak yang relatif fluktuatif;
- f. Kenaikan harga produksi tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan ternak/ikan;
- g. Petani peternak belum melaksanakan sepenuhnya anjuran dalam upaya pencegahan penanganan penyakit hewan dalam kegiatan usaha peternakan dan perikanannya;

- h. Terdapatnya tempat pemotongan hewan diluar Rumah Potong Hewan (RPH) milik Pemerintah Daerah, sehingga tidak terpantaunya proses pemotongan hewan dan tidak dilakukannya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong yang menjamin bahwa daging yang dihasilkan memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) untuk dikonsumsi;
- i. Masih adanya gangguan penyakit hewan yang penyebabnya terhambatnya pencapaian produksi peternakan, dengan penyakit yang dominan yaitu cacingan pada sapi, scabies pada ternak kerbau, sapi dan babi dan Newcastle disease (ND), ngorok (CRD) pada unggas;
- j. Kurangnya ketersedianya bibit ikan, ternak unggul dan Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- k. Belum adanya *Mesterplan* pengembangan ternak dan perikanan;
- l. Sarana dan prasarana pendukung peternakan, kesehatan hewan dan perikanan masih terbatas;
- m. Belum optimalnya layanan Kesehatan Hewan terutama dalam melakukan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu;
- n. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan hewan.

#### ❖ **Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang**

##### **1. Urusan Administrasi Pemerintahan**

Permasalahan di bidang Administrasi Pemerintahan antara Lain :

- a. Urusan sekretariat Daerah Kabupaten
  - 1. Mempertajam fungsi-fungsi Sekretariat Daerah yaitu membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap tugas perangkat Daerah serta layanan administrasi;
  - 2. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota Sekretariat Daerah;

3. Peningkatan dukungan anggaran, sarana dan prasarana kantor, serta sumber daya aparatur, baik aspek intelektual administrasi dan manajemen melalui kegiatan pelatihan-pelatihan;
  4. Mengkoordinasikan rencana kegiatan dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal.
- b. Urusan sekretariat DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan
1. Penetapan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang di tuangkan dalam Peraturan Bupati belum menggunakan tim penilai/tim appraisal;
  2. Kebutuhan akan kompetensi berbagai bidang ilmu pengetahuan dalam mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRD;
  3. Kebutuhan Akan Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang cukup tinggi;
  4. Dinamika perubahan peraturan perundang undangan.

## **2. Urusan Pengawasan**

Permasalahan dibidang pengawasan antara lain :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia/APIP termasuk penetapan Jabatan Fungsional Pengawas;
2. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pengawasan;
3. Peningkatan Sistem Pengendalian Inter pada SKPD;
4. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan;
5. Kesadaran SKPD terhadap tindak lanjut pemeriksaan;
6. Peningkatan perencanaan pada SKPD berkaitan dengan pelaksanaan revidi;
7. Peningkatan Koordinasi, komunikasi antara SKPD dengan Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah.

### **3. Urusan Perencanaan Pembangunan**

Permasalahan di bidang perencanaan pembangunan antara lain :

1. Kurangnya kompetensi aparatur di Bappeda baik secara kualitatif dan kuantitatif;
2. Belum optimalnya kualitas pelaksanaan tahapan perencanaan bottom-up;
3. Belum bersinergi dan inkonsistensi dokumen perencanaan;
4. Data-data perencanaan belum optimal secara kualitas dan belum terintegrasi sebagai data permanen;
5. Belum optimalnya fungsi monitoring, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
6. Nilai akuntabilitas kinerja Bappeda maupun OPD lainnya masih rendah.

### **4. Urusan Keuangan**

Permasalahan di bidang Keuangan antara lain :

1. Belum tersedianya Sistem pengelolaan keuangan dan asset daerah terintegrasi;
2. Paradigma perencanaan dan penganggaran yang belum efisien sehingga berdampak terhadap rendahnya kualitas belanja;
3. Regulasi dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah belum memadai;
4. Belum tertipnya pengelolaan dan pemanfaatan asset daerah;
5. Belum tersedianya data objek/subjek pajak yang akurat;
6. Kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah belum memadai.

### **5. Urusan Kepegawaian**

Permasalahan di bidang kepegawaian antara lain :

1. Menurunnya disiplin PNS;
2. Rendahnya kompetensi ASN;
3. Pelayanan kepegawaian belum optimal.

## **b. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH**

### **1. VISI**

Visi Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016-2021 adalah “ **MEWUJUDKAN HUMBANG HASUNDUTAN YANG HEBAT DAN BERMENTALITAS UNGGUL**”.

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

#### **a. HUMBANG HASUNDUTAN**

Seluruh wilayah dan unsur masyarakat yang bermukim di Kabupaten Humbang Hasundutan. Unsur masyarakat terdiri dari pemerintah, perusahaan dan perorangan.

#### **b. HEBAT**

Akronim kata mengandung arti setiap huruf yaitu H= Humbang Hasundutan Na Martuhan Jala Maduma (Peningkatan keimanan, kesejahteraan dan kualitas SDM dan Sumber Daya Alam); E = Eme na godang tano na bidang (Mewujudkan ketahanan pangan); B = Bahen murah arga ni pupuk (penyediaan saprodi dan alsintan); A = Asa sinur na pinahan gabe na niula (peningkatan ekonomi kerakyatan); T= Ture dalan tu huta sahat tu balian asa langku na ni ula dohot tiga-tiga (peningkatan kualitas infrastruktur).

Dengan demikian kata HEBAT berarti Humbang Hasundutan harus setara bahkan terdepan dari kabupaten-kabupaten besar lainnya di Indonesia yang selama ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia yaitu dalam hal kemakmuran, tatakelola, dan mental unggul. Dari segi kemakmuran, Humbang Hasundutan akan meningkatkan kemakmuran warganya sehingga setara dengan kemakmuran kabupaten-kabupaten lain yang sudah terlebih dahulu maju di Indonesia. Dari segi tata kelola, Humbang Hasundutan akan melaksanakan pemerintahan yang bermartabat dan berwibawa dimana setiap kegiatan akan dilakukan melalui perencanaan yang benar, pemilihan orang yang tepat untuk melaksanakan setiap kegiatan, penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan jadwal kebutuhan dan keadaan lingkungan, serta melakukan pengawasan agar setiap kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.



Humbang Hasundutan akan memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki masyarakat dalam pembangunan. Ini juga berarti pelibatan anggota masyarakat dalam berbagai pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat ini tentu saja didahului oleh peningkatan mutu sumber daya manusia melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan yang akan diselenggarakan oleh sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan yang akan dibangun oleh Pemerintah Humbang Hasundutan.

Seluruh potensi alam akan dimanfaatkan pada tingkat pendayagunaan tertingginya. Seluruh potensi alam akan digali dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang dan jasa, dan tentu saja dengan memperhatikan lingkungan.

Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan adil dan merata sehingga seluruh wilayah Humbang Hasundutan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memiliki infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pembangunan infrastruktur yang adil adalah pembangunan yang disesuaikan dengan kontribusi yang diberikan oleh setiap wilayah dan pembangunan infrastruktur yang merata adalah pembangunan yang dinikmati oleh seluruh wilayah Humbang Hasundutan.

**c. BERMENTAL UNGGUL**

Warga Humbang Hasundutan harus bermental unggul. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan menempah warganya menjadi manusia-manusia yang bermental besar dan kuat, yang tidak mudah menyerah, tidak mengeluh, tidak menuntut terlalu banyak, dan tidak cengeng, melainkan menjadi pekerja keras, ulet, dan berjiwa besar.

## **2. MISI**

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Humbang Hasundutan ditetapkan Misi yaitu :

### **1. MENINGKATKAN IMAN DAN TAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Pembangunan Humbang Hasundutan harus dilandasi oleh iman yang kuat serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan iman akan dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana ibadah, peningkatan pendidikan agama dan moral, serta pemberdayaan para tokoh dan pemuka agama. Kerukunan dan saling mendukung antar agama yang berbeda akan ditingkatkan. Pembangunan iman juga akan dilakukan melalui penetapan iman dan taqwa sebagai landasan bagi semua peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

### **2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM**

Warga Humbang Hasundutan terdiri dari berbagai jenis sumber daya yang melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbeda dimana yang paling banyak adalah sumber daya manusia pertanian. Pemerintah Humbang Hasundutan akan meningkatkan mutu seluruh jenis sumber daya manusia tersebut melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan tersebut dilaksanakan di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lain akan dibangun dalam jumlah yang cukup untuk mendidik dan melatih seluruh sumber daya manusia yang ada di Humbang Hasundutan. Mutu sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan tersebut akan ditingkatkan terus-menerus agar dapat menghasilkan sumber daya yang bermutu tinggi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian Humbang Hasundutan yang berkelas nasional.

Kualitas sumber daya manusia ini juga akan ditingkatkan melalui pembangunan sistem dan sarana kesehatan serta peningkatan mutu petugas-petugas layanan kesehatan. Rumah sakit dan puskesmas akan diperbesar dan diberdayakan dan mutunya akan ditingkatkan setiap saat.

Humbang Hasundutan mempunyai sumber daya alam yang jumlahnya sangat besar termasuk budaya dan pariwisata. Humbang Hasundutan akan menggali seluruh potensi sumber daya alam tersebut dan kemudian mendayagunakannya secara optimal agar Humbang Hasundutan dapat meningkatkan produksi untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi.

Wilayah Humbang Hasundutan sangat mendukung pengembangan industri pariwisata terutama pariwisata alam dan budaya. Berbagai obyek wisata alam akan digali dan dikembangkan dan didayagunakan agar menjadi tujuan wisata yang dapat memberikan penerimaan yang besar. Humbang Hasundutan juga mempunyai budaya yang layak untuk dikembangkan yang akan dijual kepada wisatawan. Pagelaran seni dan budaya daerah akan dirancang dan dikemas dalam bentuk yang layak jual.

### **3. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang terbuka, terarah, dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan menyelenggarakan pemerintahan yang bebas dari korupsi yaitu melalui pelaksanaan pengawasan yang ketat dan menyeluruh. Pemilihan para peyelenggara pemerintahan juga dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat dan kesesuaian keahlian. Penentuan prioritas pembangunan dilakukan dengan berpedoman kepada sasaran pembangunan dan disesuaikan dengan visi Kabupaten Humbang Hasundutan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan akan ditingkatkan. Penegakan hukum juga akan ditingkatkan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan seluruh kegiatan pemerintahan.

### **4. MENINGKATKAN KEDAULATAN PANGAN DAN EKONOMI KERAKYATAN**

Masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan harus memiliki kedaulatan pangan yang tinggi dimana masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan harus dapat menghasilkan sendiri pangan yang mereka butuhkan dan mereka tidak akan

bergantung kepada daerah-daerah lain. Karena wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari tanah-tanah pertanian, dan karena pertanian adalah mata pencaharian utama warga Humbang Hasundutan secara turun-temurun, karakteristik warga tersebut adalah petani-petani tradisional. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan meningkatkan produktivitas lahan pertanian melalui penyediaan bibit, pupuk, dan pestisida, pembangunan sistem pengairan yang cukup, pelaksanaan penyuluhan, pembangunan sistem informasi pertanian, serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan juga akan membangun industri olahan berbahan baku barang-barang hasil pertanian.

Perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan harus dicirikan oleh ekonomi kerakyatan dan untuk itu Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan mengembangkan koperasi, dan usaha-usaha kecil dan menengah serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi agar masyarakat menyadari keunggulan ekonomi kerakyatan.

## **5. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH**

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan membangun seluruh sarana dan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian. Pembangunan tersebut akan meliputi pembangunan jalan, jembatan, sistem pengairan, permukiman, air, listrik, telepon, sanitasi, dan sebagainya. Tidak ada potensi ekonomi yang menganggur karena ketidakcukupan sarana dan prasarana infrastruktur. Tidak akan ada lagi daerah terpencil atau terisolasi. Pembangunan tersebut akan dilakukan dengan mempedomani rencana tata ruang wilayah Humbang Hasundutan yang sudah ditetapkan. Keseimbangan sistem akan mendapat perhatian utama.

Pembangunan dilakukan untuk setiap warga Humbang Hasundutan sehingga tidak ada wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan yang tidak terjangkau pembangunan, yang dilakukan melalui pengembangan wilayah yang terencana

dengan baik. Setiap unsur atau lapisan masyarakat akan diperlakukan sama dan diberi hak yang sama untuk menikmati pembangunan. Pemilihan lokasi pembangunan akan dilakukan dengan mengutamakan pemerataan dengan tetap memelihara keadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan ekonomi antar warga Kabupaten Humbang Hasundutan

**c. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH**

Visi yang dirumuskan oleh Kabupaten Humbang Hasundutan menggambarkan tingkat prestasi yang diharapkan akan terwujud dalam kurun waktu 2016–2021. Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan kepada pencapaian visi tersebut yaitu Humbang Hasundutan yang hebat dan bermental unggul.

Visi tersebut diwujudkan dengan melaksanakan misi-misi melalui kebijakan-kebijakan yang didukung strategi-strategi yang dirumuskan dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019.

Visi dan misi Kabupaten Humbang Hasundutan yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2016–2021 tersebut akan menjadi pedoman untuk semua kegiatan pemerintahan sehingga Kabupaten Humbang Hasundutan akan menjadi salah satu kabupaten terbaik di Provinsi Sumatera Utara dalam waktu 5 tahun dengan 5 (lima) karakter utama yaitu:

1. Kabupaten penyelenggara pemerintahan yang berhasil meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kabupaten penyelenggara pemerintahan yang berhasil meningkatkan mutu sumber daya manusia dan sumber daya alam.
3. Kabupaten penyelenggara pemerintahan yang berhasil melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.
4. Kabupaten penyelenggara pemerintahan yang berhasil meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan.

5. Kabupaten penyelenggara pemerintahan yang berhasil meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan adalah petani, peternak, pedagang, dan pelaku wisata yang memiliki adat-istiadat dan budaya yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu serta masyarakat beragama yang memelihara kerukunan, kebersamaan, dan kesetaraan.

#### **a. Kebijakan Umum**

Pada RPJMD 2016 – 2021 Kabupaten Humbang Hasundutan dirumuskan kebijakan-kebijakan umum yang dimaksudkan untuk:

##### **1. Peningkatan Iman dan Taqwa Masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa**

Pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan harus dilandasi oleh iman yang kuat serta ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan iman akan dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana ibadah, peningkatan pendidikan agama dan moral, serta pemberdayaan para tokoh dan pemuka agama. Kerukunan dan saling mendukung antar agama yang berbeda akan ditingkatkan. Pembangunan iman juga akan dilakukan melalui penetapan iman dan taqwa sebagai landasan bagi semua peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

##### **2. Peningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam**

Warga Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari berbagai jenis sumber daya yang melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbeda dimana yang paling banyak adalah sumber daya manusia pertanian. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan meningkatkan mutu seluruh jenis sumber daya manusia tersebut melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan tersebut dilaksanakan di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lain akan dibangun dalam jumlah yang cukup untuk mendidik dan melatih seluruh sumber

daya manusia yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan. Mutu sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan tersebut akan ditingkatkan terus-menerus agar dapat menghasilkan sumber daya yang bermutu tinggi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian Kabupaten Humbang Hasundutan yang berkelas nasional.

Mutu sumber daya manusia ini juga akan ditingkatkan melalui pembangunan sistem dan sarana kesehatan serta peningkatan mutu petugas-petugas layanan kesehatan. Rumah sakit dan puskesmas akan diperbesar dan diberdayakan dan mutunya akan ditingkatkan setiap saat.

Kabupaten Humbang Hasundutan mempunyai sumber daya alam yang jumlahnya sangat besar termasuk budaya dan pariwisata. Kabupaten Humbang Hasundutan akan menggali seluruh potensi sumber daya alam tersebut dan kemudian mendayagunakannya secara optimal agar Humbang Hasundutan dapat meningkatkan produksi untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi.

Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan sangat mendukung pengembangan industri pariwisata terutama pariwisata alam dan budaya. Berbagai obyek wisata alam akan digali dan dikembangkan dan didayagunakan agar menjadi tujuan wisata yang dapat memberikan penerimaan yang besar. Kabupaten Humbang Hasundutan juga mempunyai budaya yang layak untuk dikembangkan yang akan dijual kepada wisatawan. Pagelaran seni dan budaya daerah akan dirancang dan dikemas dalam bentuk yang layak jual.

### **3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang terbuka, terarah, dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pemerintah Humbang Hasundutan akan menyelenggarakan pemerintahan yang bebas dari korupsi yaitu melalui pelaksanaan pengawasan yang ketat dan menyeluruh. Pemilihan para peyelenggara pemerintahan juga dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat dan kesesuaian keahlian. Penentuan prioritas pembangunan dilakukan dengan berpedoman kepada sasaran



pembangunan dan disesuaikan dengan visi Humbang Hasundutan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan akan ditingkatkan. Penegakan hukum juga akan ditingkatkan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan seluruh kegiatan pemerintahan.

#### **4. Meningkatkan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Kerakyatan**

Masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan harus memiliki kedaulatan pangan yang tinggi dimana masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan harus dapat menghasilkan sendiri pangan yang mereka butuhkan dan mereka tidak akan bergantung kepada daerah-daerah lain.

Karena wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan terdiri dari tanah-tanah pertanian, dan karena pertanian adalah mata pencaharian utama warga Kabupaten Humbang Hasundutan secara turun-temurun, karakteristik warga tersebut adalah petani-petani tradisional. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan meningkatkan produktivitas lahan pertanian melalui penyediaan bibit, pupuk, dan pestisida, pembangunan sistem pengairan yang cukup, pelaksanaan penyuluhan, pembangunan sistem informasi pertanian, serta pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan juga akan membangun industri olahan berbahan baku barang-barang hasil pertanian.

Perekonomian Kabupaten Humbang Hasundutan harus dicirikan oleh ekonomi kerakyatan dan untuk itu Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan mengembangkan koperasi, dan usaha-usaha kecil, dan menengah serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi agar masyarakat menyadari keunggulan ekonomi kerakyatan.

#### **5. Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan akan membangun seluruh sarana dan prasarana infrastruktur

yang dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian. Pembangunan tersebut akan meliputi pembangunan jalan, jembatan, sistem pengairan, permukiman, air, listrik, telepon, sanitasi, dan sebagainya. Tidak ada potensi ekonomi yang menganggur karena ketidakcukupan sarana dan prasarana infrastruktur. Tidak akan ada lagi daerah terpencil atau terisolasi. Pembangunan tersebut akan dilakukan dengan mempedomani rencana tata ruang wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan yang sudah ditetapkan. Keseimbangan sistem akan mendapat perhatian utama.

Pembangunan dilakukan untuk setiap warga Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga tidak ada wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan yang tidak terjangkau pembangunan, yang dilakukan melalui pengembangan wilayah yang terencana dengan baik. Setiap unsur atau lapisan masyarakat akan diperlakukan sama dan diberi hak yang sama untuk menikmati pembangunan. Pemilihan lokasi pembangunan akan dilakukan dengan mengutamakan pemerataan dengan tetap memelihara keadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan ekonomi antar warga Kabupaten Humbang Hasundutan

Keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan dijamin dengan menetapkan kebijakan operasional 2016–2021 sebagai berikut:

1. **Melanjutkan.** Melanjutkan program-program pembangunan yang sudah selesai dilaksanakan pada periode yang lalu, yaitu merumuskan program-program baru.
2. **Menuntaskan.** Menuntaskan program-program pembangunan yang belum tuntas pada periode yang lalu.
3. **Memberi dukungan.** Memberi dukungan kepada program-program pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan lembaga pendidikan & penelitian.
4. **Reposisi.** Merumuskan dan menerapkan strategi-strategi baru untuk program pembangunan yang pelaksanaannya mengalami hambatan.

5. **Reorientasi.** Merumuskan program-program baru yang bersifat terobosan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan yang harus dilaksanakan bersama seluruh pemangku kepentingan dengan dukungan masyarakat.

#### **b. Program Pembangunan Daerah**

Program pembangunan daerah untuk melaksanakan misi Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mewujudkan visinya tahun 2016–2021 terdiri dari 124 program yang dikelompokkan atas 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 15 urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 urusan pemerintahan pilihan dan selebihnya urusan pemerintahan penunjang.

#### **d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan**

Tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020 adalah “Pemantapan Pembangunan Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Kualitas SDM Untuk Mewujudkan Humbang Hasundutan Hebat”. Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran dari proses tahapan ke empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021. Prioritas yang disusun dan yang akan dilaksanakan juga merupakan jawaban atas isu-isu strategis dan permasalahan yang berkembang saat ini. Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, dan capaian kinerja yang di rencanakan dalam RPJMD, identifikasi isus strategis dan masalah krusial, rancangan kerangka ekonomi daerah setara kranjka pendanaan.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD tahun 2020 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Dengan memperhatikan SPM dan arah kebijakan daerah yang mendukung prioritas nasional, prioritas pembangunan

dalam rangka mendukung isi dan misi pembangunan Kabupaten Humbang Hasundutan yang dijabarkan dalam beberapa fokus pembangunan Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

❖ **Ekonomi Kerakyatan**

Upaya peningkatan ekonomi kerakyatan dilaksanakan dengan berbagai upaya, antara lain :

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman pertanian yang berkelanjutan, terutama melalui penyediaan benih unggul bermutu dan penyediaan pupuk organik (lanjutan);
2. Meningkatkan produksi perikanan darat melalui penyediaan benih Ikan dan penyediaan bibit unggul ternak dengan memberdayakan Balai Benih Ikan (BBI) di Desa Pusuk dan Rura Aek Sopang (lanjutan);
3. Repormasi Koperasi dan pendirian koperasi-koperasi yang tetap aktif;
4. Membangun dan meningkatkan peran koperasi sebagai pusat kegiatan ekonomi desa (lanjutan);
5. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (lanjutan);
6. Peningkatan perekonomian masyarakat dengan pemanfaatan potensi pertanian yang dimiliki;
7. Mengoptimalkan komoditi unggulan daerah yang dipasarkan di tingkat nasional dan internasional;
8. Menciptakan dukungan iklim investasi.

❖ **Pariwisata**

Upaya Peningkatan Pariwisata (lanjutan) dilaksanakan dengan berbagai upaya antara lain :

1. Pembenahan objek-objek wisata dan pencarian atau pembuatan objek wisata baru dengan melibatkan peran serta generasi muda melalui pengembangan seni dan budaya;
2. Pengembangan destinasi pariwisata;

3. Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan objek-objek wisata di Kabupaten Humbang Hasundutan (lanjutan);
4. Pengembangan Pemasaran Pariwisata kabupaten Humbang Hasundutan;
5. Pengembangan kemitraan pariwisata;
6. Pengembangan pariwisata pertanian (agrowisata, ekowisata);
7. Pelestarian dan peningkatan daya dukung lingkungan;
8. Pengelolaan Kekayaan dan keragaman budaya;
9. Pengembangan kerjasama dengan pihak terkait (stakeholder) tentang pengelolaan kekayaan budaya;
10. Merancang festival-festival/event wisata baru.

❖ **Infrastruktur**

Upaya peningkatan infrastruktur (lanjutan) dilaksanakan dengan berbagai upaya antara lain :

1. Keterbatasan sumber pendanaan pembangunan yang harus di dukung dengan investasi pihak swasta dan mencari sumber-sumber pendanaan lainnya serta optimalisasi dan efisiensi melalui peningkatan kerja sama pembangunan antar daerah;
2. Percepatan pembangunan infranstruktur di pedesaan;
3. Meningkatkan kualitas jalan mantap antar desa, antar kecamatan, dan dalam kota sesuai dengan klasifikasi jalan (lanjutan);
4. Pembangunan Jalan dan Jembatan diwilayah kabupaten;
5. Tersedianya infrastruktur cakupan layanan daerah irigasi dan rawa serta pemanfaatan air tanah (lanjutan);
6. Pengembangan dan pengelolaan System Irigasi Partisipatif (PPSIP) (lanjutan);
7. Infrastruktur penyediaan air baku;
8. Percepatan pembangunan perumahan dan permukiman;
9. Membuka dan meningkatkan kualitas jalan dari permukiman masyarakat kelahan areal pertanian (lanjutan);

10. Pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman (lanjutan);
11. Pembangunan terminal dan dermaga.

❖ **Pendidikan**

Upaya Peningkatan Pendidikan (lanjutan) dilaksanakan dengan berbagai upaya, antara lain :

1. Memfokuskan peningkatan pencapaian target indikator pendidikan (angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka kelulusan, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar untuk tingkat SD dan SMP);
2. Pemerataan jangkauan pelayanan dan mutu pelayanan dasar pendidikan, serta mengoptimalkan cakupan layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran khususnya di perdesaan, kawasan tertinggal, kawasan terpencil;
3. Peningkatan dan pemerataan akses di semua jenis dan jenjang pendidikan dalam rangka penguatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun pada Tahun 2021 secara gratis (lanjutan);
4. Meningkatkan jumlah dan mutu sarana dan prasarana pendidikan (lanjutan);
5. Pembinaan /Pelatihan peningkatan kompetensi tenaga pendidik di Kabupaten Humbang Hasundutan.

❖ **Kesehatan**

Upaya Peningkatan Kesehatan dilaksanakan dengan berbagai upaya, antara lain :

1. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan (lanjutan);
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap Layanan kesehatan dasar yang gratis bagi masyarakat di Puskesmas, Pustu dan Puskesmasdes (lanjutan);
3. Pengoptimalan cakupan layanan kesehatan dasar dan kualitas pelayanan kesehatan di pusat-pusat pelayanan

kesehatan masyarakat sampai ketingkat desa dan pelosok;

4. Peningkatan kualitas RSUD menjadi Tipe B;
5. Peningkatan kualitas PUSKESMAS yang memenuhi standar sarana, prasarana, alat dan Sumber Daya Manusianya;
6. Peningkatan Kualitan dan Kuantitas SDM untuk medis, paramedis, elektromedik dan hukum.

❖ **Tata Kelola Pemerintahan (Implementasi e-government)**

Upaya mewujudkan Tata Kelola Pemerintah (Implementasi e-government) dilaksanakan dengan berbagai upaya antara lain :

1. Meningkatkan Kualitas Penataan SDM aparatur yang kompeten, proporsioal dan profesional (lanjutan);
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan melalui pemantapan regulasi dan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan (lanjutan);
3. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah melalui penerapan e-goverment meliputi e-perijinan, e-perencanaan dan e-keuangan (lanjutan);
4. Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan secara permanen;
5. Penerapan Sistem pengendalian Intern pemerintah;
6. Penerapan aplikasi kepegawaian berdasarkan e-kinerja;
7. Penerapan merit system untuk pengangkatan jabatan;
8. Penguatan Aparatur pengendali Intern Pemerintah (APIP);
9. Peningkatan kenyamanan dan kepastian hukum berinvestasi.

### **1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun sebagai alat Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan



dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib di pemerintah daerah.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan agenda prioritas yang diberikan kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan. Atas dasar pentingnya penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Humbang Hasundutan maka pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Humbang Hasundutan.

Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal mempunyai tugas untuk menyusun rencana aksi penerapan SPM, pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik, menindaklanjuti pengaduan masyarakat sampai dengan pelaporan yang ditujukan ke Kementerian terkait untuk mendapatkan evaluasi dan perbaikan kedepannya.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim Penerapan SPM berpedoman pada Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Humbang Hasundutan. Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberikan dasar melaksanakan program dan kegiatan pada perangkat daerah untuk menganggarkan pelayanan dan menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat melalui SPM.

Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah antara lain:

- a. Pendidikan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan;
- b. Kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial.

## **BAB II**

### **CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **2.1 Capaian Kinerja Makro**

##### **a. Indeks Pembangunan Manusia**

IPM merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia disuatu wilayah sekaligus dapat menjadi pembanding disparitas pembangunan manusia antar wilayah dengan indikator yang dianggap relevan untuk mewakili kualitas hidup manusia.

Kemajuan pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut. IPM tidak hanya mengukur pembangunan dari aspek ekonomi saja, tetapi juga mengukur pembangunan dari aspek non-ekonomi. Oleh karena itu, dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengevaluasi program pembangunan dan memberikan arah dalam menentukan prioritas program. Indeks ini merupakan agregasi dari tiga dimensi pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh indikator angka harapan hidup saat lahir menunjukkan capaian yang bagus. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Standar hidup layak yang diukur melalui indikator Pendapatan Nasional Bruto perkapita.

Status IPM Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara berada pada kategori sedang dengan nilai pada tahun 2020 sebesar 68,87, atau tumbuh 0,06 persen (meningkat 0,04 poin) dibandingkan tahun sebelumnya.

##### **b. Angka Kemiskinan**

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Untuk Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020 angka kemiskinan berada di angka 9,36%.

### **c. Angka Pengangguran**

Sesuai dengan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), tingkat penganggur terbuka terdiri dari empat komponen yaitu: *Pertama*, mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan, *Kedua*, mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha, *Ketiga*, mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan *Keempat*, mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan survey yang dilakukan BPS Kabupaten Humbang Hasundutan angka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020 adalah 0,84%.

### **d. Pertumbuhan Ekonomi**

Perekonomian Humbang Hasundutan yang diukur berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2018 mencapai Rp 5,23 triliun, sedangkan berdasarkan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 3,94 triliun. Perekonomian Humbang Hasundutan pada tahun 2019 bila dibandingkan tahun 2018 tumbuh 4,94 persen. Pertumbuhan yang positif terjadi pada semua lapangan usaha. Selama periode 2016-2018, kabupaten Humbang Hasundutan berhasil mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang baik. Tahun 2016 ekonomi bertumbuh 5,00 persen kemudian naik menjadi 5,02 persen di tahun 2017 dan masih meningkat di 2018. Hal ini menunjukkan atmosfer perekonomian di Humbang Hasundutan tergolong stabil dan baik. Ditelaah lebih rinci, lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi selama tahun 2018 adalah Jasa Lainnya dengan nilai pertumbuhan 7,07 persen di tahun 2018, diikuti lapangan usaha Real Estate yang tumbuh sebesar 7,06 persen Kemudian lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor dengan pertumbuhan 6,08 persen. Di sisi lain lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah adalah Pengadaan Listrik dan Gas 2,21 persen.

Pertumbuhan ekonomi secara nasional mengalami penurunan, hal ini diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada seluruh elemen masyarakat. Termasuk di Kabupaten Humbang

Hasundutan yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi dibawah angka 0 (nol). Untuk pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019, Kabupaten Humbang Hasundutan berada di angka 4,94% sedangkan pada tahun 2020 mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan berada pada angka minus 0,13. Perlambatan Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh banyak faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat, termasuk akibat dari pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap roda perekonomian di Kabupaten Humbang Hasundutan.

#### **e. Pendapatan Perkapita**

PDRB Perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB Perkapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB Perkapita dapat digunakan sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari seluruh proses produksi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat kemakmuran di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan. Tingkat kemakmuran wilayah maksudnya karena belum memperhitungkan komponen-komponen lain seperti penyusutan, pajak tidak langsung neto dan pendapatan neto yang mengalir dari dan ke daerah lain. PDRB Perkapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB ADHB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Tahun 2020 PDRB perkapita Kabupaten Humbang Hasundutan bernilai 31,9 juta rupiah. Artinya pada tahun 2020 pendapatan yang mungkin didapatkan oleh setiap penduduk di Kabupaten Humbang Hasundutan dari hasil produksi adalah 29,30 juta rupiah setahun. Nilai tersebut bukanlah angka mutlak pendapatan yang asli didapatkan setiap penduduk melainkan merupakan perkiraan pendapatan dari hasil proses produksi. Angka tersebut naik 2,1% dari keadaan Tahun 2019 senilai 31,2, Tahun 2018 senilai 29,3, Tahun 2017 senilai 27,47 juta rupiah, tahun 2016 dengan nilai 25,83 juta rupiah, tahun 2015 senilai 24,11 juta rupiah dan tahun 2014 senilai 22,37 juta rupiah.

#### f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Pada tahun 2018, masyarakat kabupaten Humbang Hasundutan memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 7,142 juta rupiah per tahun, meningkat 218 ribu rupiah atau 2,94 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga didapatkan data untuk ketimpangan pendapatan (Ratio Gini) di Kabupaten Humbang Hasundutan **0,291%**. Sesuai dengan kriteria ketimpangan Gini ratio, terdapat indikator sebagai berikut:

- Gini Ratio < 0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- $0,4 \leq GR \leq 0,5$  dikategorikan ketimpangan sedang Moderat
- $GR > 0,5$  dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Maka secara angka yang dapat dihitung, Kabupaten Humbang Hasundutan dalam kategori Ketimpangan rendah karena lebih kecil dari angka 0,4.

Data yang disajikan diatas merupakan kondisi pada tahun 2018. Untuk tahun 2019 dan 2020 belum dirilis oleh BPS Kabupaten Humbang Hasundutan.

Secara grafik dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel indikator kinerja makro Kabupaten Humbang Hasundutan

NO	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2019	Capaian Kinerja Tahun 2020	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	68.83	68,87	0,06
2	Angka Kemiskinan	8.75%	9.36%	6.97
3	Angka Pengangguran	0.33%	0.84%	0.51
4	Pertumbuhan Ekonomi	4.94 %	- 0.13	-
5	Pendapatan Perkapita			
	PDRB Per Kapita (ADHB) (Rp)	31,291,803	31,930,248	0.2
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.291 % (2018)	Belum rilis	

Sumber : BPS Kabupaten Humbang Hasundutan

## **2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap dapat dilihat pada tabel Indikator Kinerja Kunci Hasil dan Indikator Kinerja Kunci Keluaran setiap urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:



### 2.2.1. Indikator Kinerja Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1	2	3		4	5	6
1	Pendidikan	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	31	DisDik	
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	DisDik	
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	DisDik	
		4	Jumlah Kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	484	DisDik	
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	540	DisDik	
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	11	DisDik	
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah	1	DisDik	
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	253	DisDik	
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	DisDik	
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	DisDik	
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	27.914	DisDik	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket	
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	14.485	DisDik	
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.482	DisDik	
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	742	DisDik	
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.791	DisDik	
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	955	DisDik	
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	426	DisDik	
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	208	DisDik	
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	336	DisDik	
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	215	DisDik	
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	837	DisDik	
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	508	DisDik	
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	165	DisDik	
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D -IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	41	DisDik	
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	65	DisDik	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	148	DisDik	
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	0	DisDik	
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	DisDik	
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	DisDik	
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	48	DisDik	
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	28	DisDik	
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	23	DisDik	
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	0	DisDik	
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	3	DisDik	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
2	Kesehatan	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1	RSUD	
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	1	RSUD	
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12	Dinkes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	302	Dinkes	
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12	Dinkes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	302	Dinkes	
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12	Dinkes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	302	Dinkes	
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	182	Dinkes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	450	Dinkes	
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	222	Dinkes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	47	Dinkes	
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	182	Dinkes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standart	194	Dinkes	
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	183	Dinkes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	194	Dinkes	
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	182	Dinkes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	194	Dinkes	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	182	Dinkes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	194	Dinkes	
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	182	Dinkes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	194	Dinkes	
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12	Dinkes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	12	Dinkes	
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12	Dinkes	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	12	Dinkes	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
3	Pekerjaan Umum	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (ha)	29.68 Ha	PUPR	
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (m)	3.100 m	PUPR	
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten (ha)	8.25 Ha	PUPR	
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kabupaten (m)	7.200 m	PUPR	
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten	332.98 ltr/detik	PUPR	
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten	399.58 ltr/detik	PUPR	
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten	450	PUPR	
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	89%	PUPR	
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	14 %	PUPR	
		3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	100 %	PUPR	
		1	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten	ada	Bapeda	
		2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kabupaten	0	PKP	
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaran SPAM	0	PKP	
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0	PKP	
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	0	PKP	
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	40.392	PKP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket	
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	820	PKP		
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	43.409	Lindup		
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	52	Lindup		
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Tidak ada	Lindup		
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic	Tidak ada	Lindup		
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\Sigma$ rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septi	40.392	84 %	PKP
				$\Sigma$ rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun	48.326		
		8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\Sigma$ rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	19.366	41 %	Lindup
				$\Sigma$ rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/ha	40.392		
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\Sigma$ rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	1.143	2.4 %	PKP
				$\Sigma$ rumah di wilayah pengembangan SPALDT	48.326		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\Sigma$ rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat	15.982	79.84 %	PKP
				$\Sigma$ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	20.017		
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\Sigma$ jumlah sarana pengangkutan yang tersedia	1	50 %	Lindup
				$\Sigma$ jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota	2		
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\Sigma$ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia	Tidak ada	0 %	Lindup
				$\Sigma$ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan	Tidak ada		
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\Sigma$ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD	Tidak ada	0 %	PKP
				$\Sigma$ jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota	Tidak ada		
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\Sigma$ jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot	52	0 %	Lindup
				$\Sigma$ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	Data dinkes		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		1 Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0	PKP	
		2 Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	57	PKP	
		3 Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	100	PKP	
		4 Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Belum ada	PKP	
		5 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Belum ada	PKP	
		6 Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	1 unt	PKP	Imi gra si
		7 Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	72 unt	PKP	
		8 Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	72 unt	PKP	
		1 Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	891.96 km	PUPR	
		2 Panjang jalan yang dibangun	2.250 m	PUPR	
		3 Panjang jembatan yg dibangun	20 m (1 Unit)	PUPR	
		4 Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	17.058 m	PUPR	
		5 Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	PUPR	
		6 Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	17.058 m	PUPR	
		7 Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	PUPR	
		8 Panjang jalan yang dipelihara	118.9 m3	PUPR	
		9 Panjang jembatan yang dipelihara	98.5 m	PUPR	
		1 Jumlah Pelatihan Tenaga ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	10	PUPR	
		2 Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	15	PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		3 Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	0	PUPR	
		4 Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0	PUPR	
		5 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	0	PUPR	
		6 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak ada	PUPR	
		7 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak ada	PUPR	
		8 Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tidak ada	PUPR	
		9 Tersedianya data dan profil OPD sub -urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Tidak ada	PUPR	
		10 Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Tidak ada	PUPR	
		11 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Tidak ada	PUPR	
		12 Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Tidak ada	PUPR	
		13 Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		14 Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	PUPR	
		15 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	PUPR	
		16 Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	PUPR	
		17 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	PUPR	
		18 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Tidak ada	PUPR	
		19 Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	PUPR	
		20 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Tidak ada	PUPR	
		21 Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Tidak ada	PUPR	
		22 Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	PUPR	
		23 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	PUPR	
		24 Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	PUPR	
		25 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket	
4	Perumahan Rakyat	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	PKP		
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	PKP		
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	PKP		
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	PKP		
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	PKP		
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	PKP		
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	PKP		
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	PKP		
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	PKP		
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	PKP		
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	PKP		
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	PKP		
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	PKP		
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	PKP		
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	PKP		
		1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	82.75 ha	PKP		
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	237 unt	PKP		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket	
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	20.64 ha	PKP		
		1	Jumlah rumah di kab/kota	48.326	PKP		
		2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	6.490	PKP		
		3	Jumlah rumah tidak layak huni	6.246	PKP		
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	4.246	PKP		
		5	Rasio rumah dan KK	<i>Jumlah KK</i>	52.000	107 %	Capil PKP
				<i>Jumlah total unit rumah</i>	48.326		
		6	Jumlah rumah pembangunan baru	0	PKP		
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	5 Perumahan	PKP		
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	244 Unit	PKP		
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	244 Unit	PKP		
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	244 Unit	PKP		
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	PKP		
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	56 Unit	PKP		
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	2 Pengembang	PKP		
		8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	2 Pengembang	PKP		
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	4 Pengembang	PKP		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket		
5	Trantibum Linmas	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani		7	Sat PP		
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		0	Sat PP		
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		7	Sat PP		
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		1	Sat PP		
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		Ada	Sat PP		
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal		Lengkap	Sat PP		
		1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	<b>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</b>	1 Dokumen	100 %.	BPBD	
				<b>Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan</b>	1 Dokumen			
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	<b>Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</b>	48.078	58.2 %	BPBD	
				<b>Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</b>	82.470			
		1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	<b>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</b>	Belum Disusun	Suket	BPBD	
				<b>Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan</b>	Belum Disusun			BPBD
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	<b>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</b>	Tidak ada	Suket	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
			<i>Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan</i>	Tidak ada		BPBD	
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	<i>Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan</i>	4.244	5.2 %	BPBD
			<i>Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana</i>	82.470			
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	<i>Jumlah warga negara yang ikut pelatihan</i>	4.169	5.1 %	BPBD
				<i>Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</i>	82.470		
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	<i>Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops</i>	32.659	40 %	BPBD
				<i>Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</i>	82.470		
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	<i>Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan</i>	32.659	40 %	BPBD
				<i>Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</i>	82.470		
		1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	<i>Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana</i>	0	0 %	BPBD
				<i>Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana</i>	0		
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	<i>Jumlah Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana</i>	25	76 %	BPBD
				<i>Jumlah Seluruh Penetapan Status darurat bencana</i>	33		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	<i>Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana</i>	13	43 %	BPBD		
		<i>Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana</i>	30				
4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	<i>Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi</i>	31	100 %	BPBD		
		<i>Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana</i>	31				
1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota			3	Sat PP		
2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan			4	Sat PP		
3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan			12 Per Pos Kecamatan	Sat PP		
4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa			0	Sat PP		
5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi			14	Sat PP		
6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran			0	Sat PP		
7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran			0	Sat PP		
8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran			0	Sat PP		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
6	Sosial	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1.429	Dinsos	
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	644	Dinsos	
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0	Dinsos	
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	3	Dinsos	
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2	Dinsos	
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	0	Dinsos	
		7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	Dinsos	
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	30	Dinsos	
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	60	Dinsos	
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	0	Dinsos	
		11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0	Dinsos	
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	Dinsos	
		13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dinsos	
		14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	67	Dinsos	
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	0	Dinsos	
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	0	Dinsos	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket	
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	Dinsos	
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	335	Dinsos	
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	3	Dinsos	
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	3	Dinsos	
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	0	Dinsos	
		1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	59	Dinsos	
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	32	Dinsos	
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	Dinsos	
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	Dinsos	
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	Dinsos	
		6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	67	Dinsos	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket		
7	Ketenaga kerjaan	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota			ada	Naker		
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja			0%	Naker		
		3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota			Tidak ada	Naker		
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	<b>Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun n</b>		6 Kegiatan	75 %	Naker	
				<b>keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n</b>		8 Kegiatan			
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	<b>Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n</b>		10 Org	100 %	Naker	
				<b>jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n</b>		10 Org			
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	<b>Jumlah instruktur pd tahun n</b>		10	10 %	Naker	
				<b>jumlah peserta pelatihan pada tahun n</b>		96			
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	<b>Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n</b>		8 LPK	100 %	Naker	
				<b>jmlh seluruh LPK pada tahun n</b>		8 LPK			
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	<b>Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n</b>		8 LPK	100 %	Naker	
				<b>jumlah LPK yang terdata pada tahun n</b>		8 LPK			
		6	Jumlah penganggur yang dilatih			96 org	Naker		
7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	<b>Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n</b>		96 Org	100 %	Naker			
		<b>Jumlah orang yang dilatih pada tahun n</b>		96 Org					

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		8	Persentase penyerapan lulusan	<i>Jumlah lulusan yang bekerja pda tahun n</i>	96 Org	100 %	Naker
				<i>jumlah lulusan pada tahun n</i>	96 Org		
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi	<i>Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n</i>	96 Org	100 %	Naker
				<i>jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n</i>	96 Org		
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	$\Sigma$ CPMI dilatih	Tidak ada	0%	Naker
$\Sigma$ CPMI terdaftar	Tida ada						
11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)			0	Naker		
		1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	<i>Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas tahun n</i>	213 Badan Usaha	63 %	Naker
				<i>jumlah perusahaan pada tahun n</i>	338 Badan Usaha		
		2	Data tingkat produktivitas total	<i>Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja)</i>	BPS	0	
		1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	<i>Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n</i>	4	13 %	Naker
				<i>Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih</i>	40		
		2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	<i>Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n</i>	Tidak ada	0 %	Naker
				<i>Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB</i>	Tidak ada		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		5	Naker	
		4	<b>Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah</b>		213	473 %	Naker
			<b>jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)</b>		40		
		5	<b>Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan</b>		213	63.01 %	Naker
			<b>jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor</b>		338		
		6	<b>Jumlah perusahaan yang berselisih</b>		Tidak ada	0 %	Naker
			<b>jumlah perusahaan pada tahun n</b>		Tidak ada		
		7	Jumlah mogok kerja		0	Naker	
		8	Jumlah penutupan perusahaan		0	Naker	
		9	Jumlah perselisihan kepentingan		0	Naker	
		10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		0	Naker	
		11	Jumlah perselisihan PHK		1	Naker	
		12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		1	Naker	
		13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		0	Naker	
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan		0	Naker	
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial		0%	Naker	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket	
		1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	0	Naker		
		2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	275	Naker		
		3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	0	Naker		
		4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	Naker		
		5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0	Naker		
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	Naker		
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	0	Naker		
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	Naker		
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\Sigma CPM/CTKI$ yang mendapatkan sosialisasi	0	Naker	
			$\Sigma CPMI/CTKI$				
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		0		
		11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\Sigma$ fasilitasi PMI yang dipulangkan	0	0 %	Naker
				$\Sigma$ PMI yang pulang	0		
		12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\Sigma$ PMI TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	0 %	Naker
				$\Sigma$ PMI/TKI	0		
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\Sigma$ PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan	0	0 %	Naker
				$\Sigma$ PMI/TKI purna dan keluarganya	0		
		14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\Sigma$ LTSA yang terbentuk	0	0 %	Naker
				Jumlah daerah kantong PMI/TKI	0		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket		
8	P2PA	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		0	PMDP2A		
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota		0	PMDP2A		
		1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		0	PMDP2A		
		2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		1	PMDP2A		
		3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	<i>jumlah korban kekerasan anak yang dilayani</i>	6	100%	PMDP2A	
				<i>jumlah korban kekerasan anak di tingkat Kabupaten</i>	6			
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		0	PMDP2A		
		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)		0	PMDP2A		
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan		1	SADA AHMO		
		2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih		0	PMDP2A		
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		0	PMDP2A		
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		1	PMDP2A		
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		0	PMDP2A		
		6	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi		0	PMDP2A		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	<i>Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan</i>	11	100%	PMDP2A
				<i>jumlah korban kekerasan terhadap perempuan</i>	11		
9	Pangan	1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan		1	Ketapang	
		2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya		0	Ketapang	
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal		0	Ketapang	
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang		0	Ketapang	
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan		0	Ketapang	
		6	Tertanganinya kerawanan pangan		0	Ketapang	
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan		0	Ketapang	
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar		0	Ketapang	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
10	Pertanahan	1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati	<i>Jumlah izin lokasi yang diterbitkan+ jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)</i>	1	100%	Data Izin yg diterbitkan
				<i>Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun</i>	1		
		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	<i>Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absente</i>	Tidak ada	100%	Data Izin yg diterbitkan
				<i>Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform</i>	Tidak ada		
		3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	<i>Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee</i>	Tidak ada	100%	Bag Tapem
				<i>Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek</i>	Tidak ada		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		4	Dokumen Izin membuka tanah	<i>Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui+jumlah Izin Membuka Tanah yang ditolak</i>	Tidak ada	100%	Data Izin yg diterbitkan
				<i>Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun</i>	Tidak ada		
		1	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik</i>	Tidak ada	100%	Data Izin yg diterbitkan
				<i>Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun</i>	Tidak ada		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket	
11	Lingkungan Hidup	1	Hasil perhitungan provinsi terhadap :			80	Lindup	
			a. Indeks Kualitas Air (IKA)			85.68		
			b. Indeks Kualitas Udara (IKU)			64.51		
		2	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	<i>Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah</i>		1 TPA	Lindup	
				<i>Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah</i>		1 TPST		
				<i>Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan</i>		42 Unit	Lindup	
				1 PDU, 1 Bank Sampah, 7 Truk sampah, 2 Truk Armroll, 19 Motor sampah roda 3 10 Counteiner sampah 1 mobil tinja 1 mobil tangki air				
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	<i>Izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten</i>		10	91 %	Lindup
<i>jumlah usulan permohonan yang teregistrasi</i>				11				
2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	<i>Jumlah PPLHD yang ada</i>		Tidak ada	0 %	Lindup		
		<i>jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten</i>		3				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten	<i>Jmlh MHA yg diakui</i>	1	33.3 %	Lindung
				<i>jmlh usulan MHA</i>	3		
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	<i>Jmlh MHA yg mendapatkan pelatihan</i>	0	0 %	Lindung
				<i>jmlh MHA yg ada</i>	0		
		5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	<i>jmlh lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat/rencana</i>	0	0 %	Lindung
				<i>target lembaga kemasyarakatan yg akan diberikan diklat</i>	0		
		6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	<i>Pengaduan masyarakat yg ditangani</i>	1	100 %	Bagian Hukum
				<i>total jumlah pengaduan masyarakat yang teregristrasi (Bagian Hukum)</i>	1		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
12	Urusan Wajib Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil	1	Penerbitan akta perkawinan	<i>Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan</i>	2.057	98.88 %	Dukcapil
				<i>Peristiwa perkawinan yang dilaporkan</i>	2.081		
		2	Penerbitan akta perceraian	<i>Jumlah akta perceraian yang diterbitkan</i>	25	83.33 %	Dukcapil
				<i>Peristiwa perceraian yang dilaporkan</i>	30		
		3	Penerbitan Akta Kematian	<i>Jumlah akta kematian yang diterbitkan</i>	1.277	98.22 %	Dukcapil
				<i>Peristiwa kematian yang dilaporkan</i>	1.300		
		4	Penyajian Data Kependudukan	<i>Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten kota dalam satu tahun</i>	81.563	40.78 %	Dukcapil
				<i>2 tahun</i>	156.214		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
13	Pemberdayaan masyarakat desa	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	29	PMDP2A	
		2	Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya	124	PMDP2A	
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	369	PMDP2A	
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	53	PMDP2A	
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	29	PMDP2A	
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	124	PMDP2A	
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	369	PMDP2A	
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	53	PMDP2A	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket		
14	Pengendalian penduduk dan KB	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di Perda kan		Ada (Perbup)	P2KB		
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		23.65	P2KB		
		3	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ <p>ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun</p>	3.18	P2KB		
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	<i>Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)</i>	6.240 Orang (1.560 x 4 Orang)	39.65%	P2KB	
				<i>Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)</i>	15.739 Orang			
		5	Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program KKBPK		28	P2KB		
		1	Persentase fasilitasi kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	<i>Jumlah Faskes yang siap melayani KB MKJP</i>	21	84 %	P2KB	
				<i>Jumlah Faskes</i>	25			
		2	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	<i>Jumlah peserta KB Aktif</i>	10.054	55.2 %	P2KB	
				<i>Jumlah PUS</i>	18.215			
3	Pemerintah daerah kabupaten yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	<i>Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif</i>		13	P2KB			



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		4	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	<i>Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern</i>	623	22.5 %	P2KB
				<i>Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan</i>	2.763		
		1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		1.504	8.24 %	P2KB
					18.200		
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	<i>Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI</i>	2.652	32.7 %	P2KB
				<i>Jumlah keluarga PBI</i>	8.093		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
15	Perhubungan	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan Tipe C	<i>Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia</i>	1	100%	Dishub
				<i>Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan angkutan jalan</i>	1		
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	<i>Jumlah kendaraan yang diuji per tahun</i>	0	0	Dishub
				<i>Jumlah kendaraan wajib uji</i>	1.124		
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	<i>Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan</i>	3	100 %	Dishub
				<i>Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten</i>	3		
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	<i>Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota</i>	1.162	27 %	Dishub
				<i>Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota</i>	4.340		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket	
16	Kominfo	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	<i>Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo</i>	30 OPD	100%	Kominfo	
				<i>Jumlah Perangkat Daerah</i>	30 OPD			
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	<i>Jumlah perangkat daerah yang menggunakan internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo</i>	30 OPD	100%	Kominfo	
				<i>Jumlah Perangkat Daerah</i>	30 OPD			
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah			ada	Kominfo	
1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	<i>Jlh kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemda yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No. 5/2015</i>	11	100 %	Kominfo			
		<i>Jlh kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah</i>	11					

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	<i>Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</i>	30 OPD	100 %	Kominfo
				<i>Jumlah perangkat daerah</i>	30 OPD		
		3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	<i>Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</i>	30 OPD	100 %	Kominfo
				<i>Jumlah perangkat daerah</i>	30 OPD		
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	<i>Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik</i>	4	100 %	Kominfo
				<i>Jumlah layanan</i>	4		
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	<i>Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik</i>	2	6 %	Kominfo
				<i>Jumlah layanan</i>	30		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	<i>Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</i>	0	0 %	Kominfo
				<i>Jumlah sistem elektronik</i>	0		
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	<i>Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah</i>	0	0 %	Kominfo
				<i>Jumlah layanan publik dan layanan administrasi</i>	0		
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	<i>Jumlah OPD yang menggunakan layanan pusat data pemerintah</i>	11 OPD	34 %	Kominfo
				<i>Jumlah perangkat daerah</i>	30 OPD		
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	<i>Jumlah PD yang menyimpan data di pusat data pemerintah</i>	11 OPD	34 %	Kominfo
				<i>Jumlah perangkat daerah</i>	30 OPD		
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	<i>Jumlah PD yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya</i>	11 OPD	34 %	Kominfo
				<i>Jumlah perangkat daerah</i>	30 OPD		
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	<i>Jumlah data yang dapat berbagi pakai</i>	0	0 %	Kominfo
<i>Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah</i>	0						

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket	
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	<i>Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city</i>	18 OPD	60 %	Kominfo	
				<i>Jumlah perangkat daerah</i>	30 OPD			
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	<i>Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo</i>	0	0 %	Kominfo	
				<i>Jumlah ASN pengelola TIK</i>	24 Orang			
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government			Tidak Ada	Kominfo	
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	<i>Komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemda Provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah</i>	89	100 %	Kominfo	
				<i>Komunitas masyarakat atau mitra komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten</i>	89			
				<i>Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (Strakom)</i>	524			
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	<i>Konten informasi terkait program dan</i>	837	62.60 %	Kominfo	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
				<i>kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten</i>				
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	<i>Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (Strakom) dan SOP</i>	524	62.60 %	Kominfo	
				<i>Diseminasi dan layanan informasi publik</i>	837			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
17	Koperasi dan UKM	1	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan</i>	3	33.33 %	Kopedagin
				<i>Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam</i>	9		
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan</i>	0	0 %	Kopedagin
				<i>Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan</i>	0		
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi</i>	99	63.87 %	Kopedagin
				<i>Jumlah koperasi yang ada</i>	155		
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya</i>	10	83.33 %	Kopedagin
				<i>Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada</i>	12		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	5	3.23 %	Kopedagin
				<i>Jumlah koperasi yang ada</i>	155		
		6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkooperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkooperasian</i>	8	0.01 %	Kopedagin
				<i>Jumlah anggota koperasi yang ada</i>	40.856		
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkooperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan</i>	7	4.52 %	Kopedagin
				<i>Jumlah koperasi yang ada</i>	155		
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Tidak ada			Kopedagin
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat nomor induk koperasinya</i>	14	9.03 %	Kopedagin
				<i>Jumlah koperasi yang ada</i>	155		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan</i>	0	0 %	Kopedagin
			<i>Jumlah koperasi yang ada</i>	155			
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran</i>	3	1.94 %	Kopedagin
				<i>Jumlah koperasi yang ada</i>	155		
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha</i>	4	2.58 %	Kopedagin
				<i>Jumlah koperasi yang ada</i>	155		
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan</i>	3	1.93 %	Kopedagin
				<i>Jumlah koperasi yang ada</i>	155		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		1	rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	<i>Jumlah pertumbuhan wirausaha baru</i>	16	1.29 %	Kopedagin
				<i>Jumlah wirausaha yang ada</i>	1.237		
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	<i>Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)</i>	Tidak Ada	0 %	Kopedagin
				<i>Jumlah usaha mikro yang ada</i>	Tidak Ada		
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	<i>Jumlah usaha mikro yang bermitra</i>	1	0.08 %	Kopedagin
				<i>Jumlah usaha kecil yang ada</i>	1.237		
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi</i>	8	0.65 %	Kopedagin
				<i>Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk</i>	1.229		
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran</i>	21	1.70 %	Kopedagin
				<i>Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran</i>	1.229		
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan</i>	12	0.97 %	Kopedagin
				<i>Jumlah usaha mikro yang ada</i>	1.237		
		7	Persentase usaha mikro yang diberikan	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha</i>	0	0 %	Kopedagin
				<i>Jumlah usaha mikro yang ada</i>	1237		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket	
18	Penanaman Modal	1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten	<i>Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor</i>	0	PMP2TSP	
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	<i>Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal (ada/tidak)</i>	0	PMP2TSP	
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	<i>Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun</i>	0	PMP2TSP	
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	<i>Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting</i>	0	PMP2TSP	
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	<i>Jumlah kegiatan pameran penanaman modal</i>	0	PMP2TSP	
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	<i>Jumlah Kegiatan penerimaan misi penanaman modal</i>	0	PMP2TSP	
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	<i>Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal</i>	402 Pemohon	PMP2TSP	
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	<i>Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan</i>	316	PMP2TSP	
		9	Laporan realisasi penanaman modal	<i>Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten</i>	3,780,092,844,944.00	PMP2TSP	
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	<i>Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal</i>	2 Orang	PMP2TSP	
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	<i>Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal</i>	92	PMP2TSP	
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah	<i>Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/jumlah permintaan data dan informasi yang diterima</i>	19/23 82%	PMP2TSP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket		
19	Pemuda dan Olah raga	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	PORA			
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	PORA			
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	0	PORA			
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	PORA			
		1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan	14	PORA			
		2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	0	PORA			
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	PORA			
20	Statistik	1	Tersedianya buku profil daerah	Tidak Ada	Kominfo			
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Tidak Ada	Kominfo			
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	2	Kominfo			
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	2	Kominfo			
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Tidak Ada	Kominfo			
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	<i>Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral</i>	1	100%	Kominfo	
				<i>Jumlah kegiatan statistik sektoral</i>	1			
7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	<i>Jumlah metadata indikator statistik sektoral</i>	2	100%	Kominfo			
		<i>Jumlah indikator statistik sektoral</i>	2					

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
21	Persandian	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	<i>Jumlah kegiatan strategis teramankan</i>	1 Kegiatan	100 %	Kominfo
				<i>Jumlah kegiatan strategis yang ada</i>	1 Kegiatan		
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	<i>Jumlah SE yang menerapkan SMK 1 dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian</i>	1 Sertifikat Elektronik	100 %	Kominfo
				<i>Jumlah SE yang ada</i>	1 Sertifikat Elektronik		
		3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	<i>Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah</i>	1 Sertifikat Elektronik	100 %	Kominfo
				<i>Jumlah SE yang ada</i>	1 Sertifikat Elektronik		
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	<i>Jumlah titik teramankan</i>	30 OPD	100 %	Kominfo
				<i>Jumlah titik pada PHKS</i>	30 OPD		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket	
22	Kebudayaan	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	<i>Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)</i>	17	Dispar	
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	<i>Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)</i>	17	Dispar	
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	<i>Jumlah objek dimanfaatkan</i>	17	Dispar	
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	<i>Jumlah SDM ditingkatkan kompetensi + Jumlah SDM disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola</i>	0	Dispar	
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	<i>Jumlah CB ditetapkan - Jumlah CB dihapuskan</i>	0	Dispar	
		6	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	<i>Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar</i>	0	Dispar	
		7	Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	<i>Jumlah CB diberikan izin ke luar provinsi</i>	0	Dispar	
		8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	<i>Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)</i>	0	Dispar	
		9	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	<i>Jumlah CB dimanfaatkan</i>	0	Dispar	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket	
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	<i>Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)</i>	0	Dispar	
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	<i>Jumlah pengunjung museum</i>	0	Dispar	
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	<i>Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan museum</i>	0	Dispar	
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	<i>Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk</i>	0	Dispar	
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten	<i>Jumlah pembentukan tim ahli CB</i>	0	Dispar	
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	<i>Jumlah ahli CB yang disertifikasi</i>	0	Dispar	
		16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	<i>Jumlah sdm CB + Jumlah sdm Museum</i>	0	Dispar	
		17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	<i>Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)</i>	0	Dispar	
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	<i>Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)</i>	0	Dispar	
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	<i>Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat</i>	0	Dispar	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket	
23	Perpustakaan	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	<i>Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)</i>	7.040	4 % (Pembanding Usia 5-59 thn)	Perpusip		
				<i>Jumlah penduduk di wilayahnya</i>	177.140				
		2	Persentase keterampilan memanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	<i>Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite</i>	2.935	1,7 % (Pembanding Usia 5-59 thn)	Perpusip		
				<i>Jumlah penduduk di wilayahnya</i>	177.140				
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	<i>Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya</i>	65	0.03 % (Pembanding Usia 5-59 thn)	Perpusip		
				<i>Jumlah penduduk di wilayahnya</i>	177.140				
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	<i>Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan</i>	40	20.30 %	Perpusip		
				<i>Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya</i>	197				
		5	Jumlah Pemasarakatan Gemar Membaca di Masyarakat				0	Perpusip	
		1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya				0	Perpusip	
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa				0	Perpusip	
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)				0	Perpusip	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
24	Kearsipan	1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	<i>Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</i>	200	66.70 %	Perpusip	
				<i>Jumlah seluruh arsip aktif</i>	300			
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	<i>Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip</i>	800	66.70 %	Perpusip	
				<i>Jumlah seluruh arsip inaktif</i>	1200			
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	<i>Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik</i>	50	33.30 %	Perpusip	
				<i>Jumlah seluruh arsip statis</i>	150			
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	<i>Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</i>	0	0 %	Perpusip	
				<i>Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi</i>	1500			
		1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK			0	Perpusip	
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK			70	Perpusip	
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi			80	Perpusip	
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK			50	Perpusip	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	50	Perpusip	
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	80	Perpusip	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket	
<b>URUSAN PILIHAN</b>								
25	Perikanan	1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)			Tidak Ada	Disnakan	
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	<i>Jumlah TPI yang operasional</i>	Tidak Ada	0 %	Disnakan	
				<i>Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten</i>	Tidak Ada			
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan			Tidak Ada	Disnakan	
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)			208 Pembudidaya	Disnakan	
		5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi			400.000 ekor/Benih	Disnakan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket		
26	Pariwisata	1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi			38	Dispar		
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata			38	Dispar		
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota			Tidak ada	Dispar		
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			72	Dispar		
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri			25	Dispar		
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota			Tidak ada	Dispar		
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri			266	Dispar		
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (120/tenaga kerja)*100			928	Dispar		
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	<b>Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan</b>		120	100%	Dispar	
				<b>Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan</b>		120			
10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat			5 Kec	Dispar				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket		
27	Pertanian	1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan		34 Jenis	Distan			
		2	Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan		145 unit	Distan			
		3	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian		21	Distan			
		4	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan		142	100%	Distan		
				Jumlah prasarana yang dibangun		12				
		5	Persentase jumlah usulan usaha pertanian	Jumlah usulan yang difasilitasi		21	100%	Distan		
				Jumlah usulan usaha pertanian		21				
		1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	<b>Jumlah area yang dapat ditanggulangi</b>		10 Kecamatan		100%	Disnakan	
				<b>Luas area terkena bencana</b>		10 Kecamatan				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
28	Perdagangan	1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan	<i>Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja</i>	0	0 %	Kopedagin
				<i>Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar</i>	0		
			b. Toko swalayan	<i>Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja</i>	0	0 %	Kopedagin
				<i>Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar</i>	0		
		2	Persentase penerbitan TDG	<i>Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja</i>	0	0 %	Kopedagin
				<i>Jumlah permohonan penerbitan TDG</i>	0		
		3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	<i>Jumlah penerbitan TDG</i>	0	0 %	Kopedagin
		4	Persentase Penerbitan STPW yang tepat waktu				
a	Penerima waralaba dari waralaba dalam		<i>Jumlah STPW untuk penerima</i>	0	0	Kopedagin	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran				Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
			negeri	<i>waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</i>				
				<i>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri</i>	0			
		b	Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	<i>Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</i>	0	0	Kopedagin	
				<i>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri</i>	0			
		c	Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	<i>Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang</i>	0	0	Kopedagin	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
				<i>terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</i>			
				<i>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri</i>	0		
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	<i>Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kab Kota</i>	0	0 %	Kopedagin
				<i>Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer</i>	0		
		6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	<i>Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1 x 24 jam)</i>	0		
				<i>Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar</i>	0	0%	Kopedagin

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ <p>K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya  a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)</p> <p>b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)</p>	0.5+0.5	100 %	
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	<i>Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok</i>	0	0 %	Kopedagin
		1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = a/b \times c \times 100\%$ <p>X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan  a = Jumlah pupuk yang disalurkan  b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK)  c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)</p>		$\frac{X = 9.261}{10.328} \times 100\%$ <p>89.66%</p>	Distan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	<b>Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan</b>	254	51.2 %	Kopedagin
				<b>Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab Kota</b>	496		
		2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	<b>Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku</b>	0	0 %	Kopedagin
				<b>Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan</b>	0		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran			Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket	
29	Perindustrian	1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	<b>Jumlah realisasi izin yang diterbitkan</b>	Tidak ada	0%	Kopedagin	
				<b>Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk</b>	Tidak ada			
		1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA			0 %	Kopedagin	
		1	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan		1 1	100%	Kopedagin	
		1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	<b>Jumlah realisasi izin yang diterbitkan</b>	Tidak ada	0%	Kopedagin	
				<b>Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk</b>	Tidak ada			
		1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	<b>Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota di SIINas</b>	0	0%	Kopedagin	
				<b>Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota</b>	687			

### 2.2.2. Indikator Kinerja Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber data	Ket
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		92.63 %	Disdik
			<i>Jumlah anak usia 5–6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD</i>	10.049		
			<i>Jumlah anak usia 5–6 tahun pada provinsi yang bersangkutan</i>	10.850		
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		99.62 %	Disdik
			<i>Jumlah anak usia 7–12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar</i>	25.326		
			<i>Jumlah anak usia 7–12 tahun pada provinsi yang bersangkutan</i>	25.422		
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		97.97 %	Disdik
			<i>Jumlah anak usia 13–15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama</i>	15.103		
			<i>Jumlah anak usia 13–15 tahun pada provinsi yang bersangkutan</i>	15.416		
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		1.58 %	Disdik
			<i>Jumlah anak usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan</i>	1		
			<i>Jumlah anak usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan</i>	63		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber data	Ket	
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan		0.0725 %	RSUD	
			<i>Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan</i>	146			
			<i>Jumlah Penduduk di kabupaten/kota</i>	201.321			
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi		100%	Dinkes	
			<i>Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi</i>	1			
			<i>Jumlah RS di kabupaten/kota</i>	1			
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		63.06 %	Dinkes	
			<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i>	2.349			
			<i>Jumlah ibu hamil di kabupaten</i>	3.725			
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		77.4 %	Dinkes	
			<i>Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan</i>	2.754			
			<i>Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota</i>	3.556			
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		76.94 %	Dinkes	
			<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>	2.736			
			<i>Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota</i>	3.556			
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		65.17 %	Dinkes	
			<i>Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>	10.951			
			<i>Jumlah balita di kabupaten/kota</i>	16.803			
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		47.99 %	Dinkes	
			<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>	13.700			
			<i>Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota</i>	28.548			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber data	Ket
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		67.46 %	Dinkes
			<i>Jumlah orang usia 15–59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</i>	71.542		
			<i>Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota</i>	106.050		
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		68.3 %	Dinkes
			<i>Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</i>	21.660		
			<i>Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota</i>	31.721		
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		61.63 %	Dinkes
			<i>Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	28.301		
			<i>Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota</i>	45.924		
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		69.46 %	Dinkes
			<i>Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	844		
			<i>Jumlah penderita DM di kabupaten/kota</i>	1.215		
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		57.5 %	Dinkes		
	<i>Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	154				
	<i>Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota</i>	268				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber data	Ket
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		74 %	Dinkes
			<i>Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	387		
			<i>Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota</i>	522		
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		73.1 %	Dinkes
			<i>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</i>	4.059		
			<i>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota</i>	5.547		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber data	Ket
3	Pekerjaan Umum	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota			
			<i>Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)</i>	15.48 Ha	52.15%	PUPR
			<i>Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)</i>	29.68 Ha		
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten				
		2	<i>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)</i>	30.000 m2	36.36 %	PUPR
			<i>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)</i>	82.500 m2		
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi			
		3	<i>Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi danelihara (ha)</i>	13.554 ha	63.70 %	PUPR
			<i>luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota</i>	21.279 ha		
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber data	Ket
			<i>Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten</i>	38.466 RT		
			<i>Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten</i>	48.326 RT		
			<b>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</b>			
		5	<i>Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD</i>	43.409	90 %	PKP
			<i>Jumlah rumah di Kabupaten</i>	48.326		
			<b>Rasio kepatuhan IMB Kabupaten</b>			
		6	<i>Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya</i>	642	100%	PKP
			<i>Jumlah IMB yang berlaku</i>	642		
			<b>Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota</b>			
		7	<i>Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap</i>	691.47 km	77.52 %	PUPR
			<i>Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten</i>	891.96 km		
			<b>Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi</b>			
		8	<i>Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis</i>	10	66.66 %	PUPR
			<i>Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten</i>	15		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber data	Ket
		9	<b>Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi</b>	100%	PUPR	
	<i>Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi</i>		157			
	<i>Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasan</i>		157			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber data	Ket
4	Perumahan	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota		0 %	PUPR
			<i>Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n</i>	0		
			<i>Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n</i>	0		
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota		0%	PKP
			<i>Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni</i>	0		
			<i>Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan</i>	0		
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani		88.61 %	PKP
			<i>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)</i>	73.33 ha		
			<i>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha</i>	82.75 ha		
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		18.04 %	PKP
			<i>Jumlah unit rumah tidak layak huni</i>	8.720		
			<i>Jumlah total unit rumah kabupaten/kota</i>	48.326		
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		0.5 %	PKP
			<i>Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU</i>	244		
			<i>Jumlah unit rumah kab/kota</i>	48.326		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber data	Ket	
5	Trantibumlinmas	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		87.5 %	SAT PP	
			<i>Jumlah pengaduan yang ditangani</i>				7
			<i>Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk</i>				8
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		17.2 %	SAT PP	
			<i>Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan</i>				6
			<i>Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi</i>				35
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		48.078	BPBD	
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		4.244	BPBD	
		5	<i>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</i>		31	BPBD	
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100%	SAT PP	
			<i>Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah</i>				59
			<i>Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota</i>				59
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		10 Menit	SAT PP	
<i>Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran</i>							

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber data	Ket	
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	15 %	Dinsos		
			<i>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i>				90
			<i>Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis</i>				1.356
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	52 %	Dinsos		
			<i>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran</i>				159
<i>Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota</i>	306						

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber data	Ket		
7	Ketenaga kerjaan	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		0%	Naker		
			<i>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD</i>					Tidak Ada
			<i>jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota</i>					Tidak Ada
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		100%	Naker		
			<i>Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi</i>					96 Org
			<i>Jumlah tenaga kerja keseluruhan</i>					96 Org
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		1.479.642.22	BPS Naker		
			<i>PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)</i>					4.135.600.000
			<i>jumlah tenaga kerja</i>					2.795 Org
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		63%	Naker		
			<i>Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak</i>					213
			<i>Jumlah perusahaan</i>					338
		5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota		0%	Naker		
			<i>Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan</i>					0
			<i>Jumlah pencaker yang terdaftar</i>					0

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber data	Ket
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		0%	PMDP2A
			Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	Refocusing		
			Jumlah seluruh belanja langsung di APBD	Refocusing		
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota		0.0079%	PMDP2A
			Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	6		
			Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	75.046		
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		0.0049 %	PMDP2A
			Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	5		
			Jumlah penduduk perempuan	100.101		
9	Pangan	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)		685.3 %	Ketapang
			Jumlah cadangan pangan	170.330 ton		
			Jumlah kebutuhan pangan	24.855 ton		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber data	Ket
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		100 %	PKP
			<i>Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi</i>	10 Ha		
			<i>Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi</i>	10 Ha		
		2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum		100 %	PKP
			<i>Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum</i>	7		
			<i>Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum</i>	7		
		3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal		44.60 %	PKP
			<i>Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi</i>	250.300		
			<i>Luas izin lokasi yang diterbitkan</i>	561.14		
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		100%	PKP
			<i>Jumlah penerima tanah obyek landreform dngan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha</i>	Tidak ada		
			<i>Jumlah penerima tanah obyek landreform</i>	Tidak ada		
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat		100 %	PKP
			<i>Luas tanah yang telah dimanfatatkan berdasarkan izin membuka tanah</i>	Tidak ada		
			<i>Luas izin membuka Tanah yang diterbitkan</i>	Tidak ada		
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		100%	PKP
			<i>Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani</i>	Tidak ada		
			<i>Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan</i>	Tidak ada		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber data	Ket
11	Lingkungan Hidup	1	IKLH Kabupaten = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%) IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	80+85.68+64.51	75.51 %	Lindup
			Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota			
		2	<i>Total volume sampah yang dapat ditangani</i>	12.650.381		
			<i>total volume timbunan sampah kabupaten</i>	20.825.367		
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota		100%	Lindup
			<i>Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan,dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten</i>			
<i>usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan</i>			10			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber data	Ket		
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1	Perekaman KTP Elektronik		96.88 %	Dukcapil		
			<i>jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP</i>					126.662
			<i>Jumlah penduduk 17 tahun ke atas</i>					130.747
		2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		27.60 %	Dukcapil		
			<i>Jumlah anak usia 0–17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA</i>					18.919
			<i>Jumlah anak usia 0–17 tahun</i>					72.090
		3	Kepemilikan akta kelahiran		67.87 %	Dukcapil		
			<i>Jumlah anak usia 0–18 tahun yang sudah memiliki akta lahir</i>					51.088
			<i>Jumlah anak usia 0–18 tahun</i>					75.272
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		34.28 %	Dukcapil		
			<i>Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama</i>					12
			<i>Jumlah OPD</i>					35

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber data	Ket	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase Pengembangan Desa Tertinggal	91%	PMDP2A		
			<i>Jumlah desa tertinggal yang memiliki kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun</i>				66
			<i>Jumlah desa tertinggal (per awal tahun - n)</i>				72
		2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	100%	PMDP2A		
			<i>Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun</i>				81
<i>Jumlah desa berkembang (per awal tahun - n)</i>	75						

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber data	Ket	
14	Pengendalian Penduduk dan KB	1	<b>TFR (Angka Kelahiran Total)</b>				
			$TFR \equiv 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i \quad ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total</p> <p>ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur</p> <p><math>b_i</math> = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur <math>i</math> pada tahun tertentu</p> <p><math>p_i</math> = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur <math>i</math> pada pertengahan tahun yang sama</p> <p><math>I</math> = kelompok umur (<math>i=1</math> untuk kelompok umur 15-19, <math>i=2</math> untuk kelompok umur 20-24, ..., <math>i=7</math> untuk kelompok Umur 45-49)</p> <p><math>k</math> = Bilangan Konstanta biasanya 1000</p>	<p>5 (3,18 + 61,59 + 155,10 + 162,98 + 103,96 + 29,61 + 6,45)</p> <p>2614,3 per 1000 wanita usia 15-49 thn</p>	2.61 %	P2KB	
			<b>Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR))</b>				
		2	<i>Jumlah peserta KB aktif modern</i>	18.215	67.5 %	P2KB	
			<i>Jumlah pasangan usia subur</i>	26.982			
			<b>Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)</b>				
		3	<i>Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani</i>	5.050	18.7 %	P2KB	
			<i>Jumlah Pasangan Usia Subur</i>	26.982			

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber data	Ket	
15	Perhubungan	<p><b>Rasio Konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</b></p> <p><b>1. Rasio Konektivitas Kabupaten :</b>            (IK1 x bobot angkutan jalan)+ ( IK2 x bobot angkutan sungai,danau)            * IK1 = Jumlah trayek yang perintis ditambah trayek AKAP            Jumlah trayek perintis 7 dan trayek AKAP 2            * bobot angkutan jalan = wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan ( bobot SDP = 70.            * IK2 = Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi 3            * bobot angkutan sungai,danau = wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan ( bobot SDP = 70.            Jadi Rasio Konektivitas Kabupaten = ( 9 x 70 ) + ( 3 x 70) = 780            Persentase = 780/100 = 78 %</p>	780	7.8 %	Dishub	
		<p><b>2 Kinerja Lalu Lintas Kabupaten (V/C Ratio di Jalan Kabupaten)</b></p> <p>V/C Ratio di Jalan Kabupaten</p> <p><b>a. Kapasitas Jalan</b>            Faktor yang mempengaruhi kapasitas jalan adalah :            - Lebar jalur atau Lajur            Untuk jalan Kabupaten lebar jalur jalan 3 s.d 4,5 m            - Median/pemisah jalan            Untuk pemisah jalan hanya ada dipusat kota dengan menggunakan pulo-pulo jalan dan marka jalan.            - Hambatan bahu/kerb jalan            Lebar bahu jalan sangat mempengaruhi kapasitas pengguna jalan, karena bahu jalan bisa digunakan untuk parkir.</p> <p><b>b. Tipe Jalan</b>            Jalan yang ada di Kabupaten Humbang semuanya dua jalur</p>	20/116.64	17.2	Dishub	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber data	Ket
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		100%	Kominfo
			<i>Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</i>	30 OPD		
			<i>Jumlah OPD</i>	30 OPD		
		2	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi		100 %	Kominfo
			<i>Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</i>	16		
			<i>Jumlah layanan publik</i>	16		
		3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten		45.14 %	Kominfo
			<i>Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Kabupaten</i>	85.852		
			<i>Jumlah penduduk</i>	190.186		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber data	Ket
17	Koperasi dan UKM	1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	99	63.78%	Kopedagin
			<i>Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset</i>			
			<i>Jumlah seluruh koperasi</i>			
		2	Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	705	56.99%	Kopedagin
			<i>Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha</i>			
			<i>Jumlah usaha kecil keseluruhan</i>			
18	Penanaman Modal	1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten	90.955.058.736.00	9.49 %	PMP2TSP
			<i>(Jumlah investasi tahun n – jumlah investasi tahun n-1) di Kabupaten</i>			
			<i>jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten</i>			
19	Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah raga	1	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	274	0.6%	PORA
			<i>Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupeten</i>			
			<i>Jumlah pemuda (16-30 tahun) di Kabupaten</i>			
		2	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2.150	4.9%	PORA
			<i>Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten</i>			
			<i>Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kabupaten</i>			
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Tidak ada	Tidak ada	PORA		
	<i>Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional</i>					



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber data	Ket		
20	Statistik	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %	Kominfo			
		1	<i>Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</i>				30 OPD	
			<i>Jumlah OPD</i>				30 OPD	
		2	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah		100%	Kominfo		
				<i>Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah</i>				30 OPD
				<i>Jumlah OPD</i>				30 OPD
21	Persandian	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah		100%	Kominfo			
		1	<i>Jumlah nilai area per keamanan informasi</i>				1 Wilayah	
			<i>Jumlah area penilaian</i>				1 Wilayah	
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya		34 %	Dispar			
		1	<i>Jumlah cagar budaya yang dilestarikan</i>				17	
			<i>Jumlah cagar budaya yang terdata</i>				50	
23	Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat		0	Perpusip			
		1	<i>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat</i>				Belum dilakukan survey	
		2	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat		0	Perpusip		
				<i>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)</i>				Belum dilakukan survey

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber data	Ket
24	Kearsipan	<b>Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan 59 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)</b>	41.675	Perpusip	
		$T = (a + I + s + j) / 4$ <p>T = Tingkat ketersediaan arsip  a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip  i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip  s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik  j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p>			
		<b>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat</b>	55%	Perpusip	
$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ <p>T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban  m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK  b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK  g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK  a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK  c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK  I = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>					

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber data	Ket	
25	Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari Kabupaten	1.737,36	Disnakan		
26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0%	Dispar		
			<i>Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1</i>				72-450 = -378
			<i>Jumlah wisatawan tahun n-1</i>				450
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	0%	Dispar		
			<i>Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1</i>				0
			<i>Jumlah wisatawan tahun n-1</i>				100.803
		3	Tingkat Hunian Akomodasi	7.7%	Dispar		
			<i>Jumlah Kamar yang terjual</i>				4.626
			<i>Jumlah Kamar yang tersedia</i>				59.495
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	141.60	Dispar		
<i>Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku</i>							
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	11.4%	Dispar				
	<i>Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD</i>						
27	Pertanian	1	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	6,2 ton/Ha	Distan		
			<i>Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (ton)</i>				251.172.59
			<i>Luas panen (ha)</i>				40.866.20
		2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	43.20 %	Nakkan		
			<i>Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya</i>				2.798 – 4.007 = 1.209
<i>Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)</i>	2.798						

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber data	Ket		
28	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	0	0%	Kopedagin		
			<i>Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan</i>				0	
			<i>pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten</i>				0	
		2	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	9.261	23.18 %	Distan		
			<i>Realisasi</i>					9.261
			<i>RDKK</i>					39.950.77
		3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	254	51.2 %	Kopedagin		
			<i>Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan</i>					254
			<i>Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten</i>					496

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber data	Ket
29	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	687	0.145 %	Kopedagin
			<i>Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n–jumlah industri kecil dan menengah tahun n–1</i>			
			<i>Jumlah indutri kecil dan menengah tahun n–1</i>			
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	0	0 %	Kopedagin
			<i>Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut</i>			
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1	100 %	Kopedagin
			<i>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</i>			
			<i>Jumlah izin yang dikeluarkan</i>			
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1	100 %	Kopedagin
			<i>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</i>			
			<i>Jumlah izin yang dikeluarkan</i>			
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota		0%	Kopedagin

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil		Capaian Kinerja	Sumber data	Ket
			<i>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</i>	0		
			<i>Jumlah izin yang dikeluarkan</i>	0		
			<b>Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini</b>			
		6	<p>1) Keterkinian informasi industri :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)</li> <li>- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)</li> <li>- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)</li> </ul> <p>2) Kelengkapan informasi industri meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)</li> <li>- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)</li> </ul> <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)</p>		Ada	Kopedagin

### 2.2.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket	
1	2	3		4	5	6	
1	Perencanaan Keuangan	1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan		69.3%	BPKPAD	
			<i>Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan</i>	586.982.890.832.24			
			<i>Jumlah APBD</i>	846.625.270.758.24			
		2	Rasio PAD		30.1%	BPKPAD	
			<i>Jumlah PAD</i>	12.420.998.774			
			<i>Jumlah PDRB Non Migas</i>	41.356.000.000			
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Level 2	INSP	
			<i>Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP</i>				
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		Level 3	INSP	
			<i>Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP</i>				
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)		4.96 %	BPKPAD	
			<i>Jumlah belanja urusan pemerintahan–transfer expenditures</i>	42.029.180.617			
<i>Jumlah belanja APBD</i>	846.625.270.758.24						
6	Opini Laporan Keuangan		WTP	INSP			

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
2	Pengadaan	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama		0%	UKPBJ
			<i>Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n</i>	Tidak ada		
			<i>Jumlah kontrak keseluruhan tahun n</i>	Tidak ada		
		2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif		31,4%	UKPBJ
			<i>Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif</i>	114		
			<i>Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif</i>	363		
		3	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan		42.14%	UKPBJ
			<i>Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan</i>	200,923,000,000.00		
			<i>Total belanja langsung</i>	476.836.050.756.97		



No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
3	Kepegawaian	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		1.95%	BKD
			<i>Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas</i>	825		
			<i>Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah</i>	423		
		2	Rasio pegawai Fungsional (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan		0.02 %	BKD
			<i>Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)</i>	28		
			<i>Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</i>	1.257		
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		100 %	BKD
			<i>Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi</i>	28		
			<i>Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</i>	28		

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
4	Manajemen Keuangan	1	<b>Budget Execution : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD</b>		90.38%	BPKPAD
			<i>Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi</i>	765.177.964.144.50		
			<i>Total belanja APBD dikurangi satu</i>	846.625.270.758.24		
		2	<b>Revenue Mobilization : Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD</b>		87.59%	BPKPAD
			<i>Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi</i>	9.011.203.725		
			<i>Total PAD dalam APBD dikurangi satu</i>	10.287.602.000		
		3	<b>Assets Management</b>		100%	BPKPAD
			1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Ya		
			2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)			
			3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)			
		4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)				
		4	<b>Cash Management : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya</b>		15.70 %	BPKPAD
<i>Nilai realisasi SiLPA</i>	139.666.646.699					
<i>Total belanja anggaran tahun sebelumnya</i>	889.421.437.951					

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci		Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	1	Informasi Ketersediaan Informasi tentang Sumber Daya yang Tersedia Untuk Pelayanan (Information on Resources Available to Frontline Service Delivery Units)	98 %	Kominfo		
			<i>Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses website Pemda</i>				772.500.000
			<i>Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses website Pemda</i>				761.215.762
		2	Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah (Public Access Fiscal Information)	100%	Kominfo		
			<i>Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda</i>				59
<i>Total jumlah dokumen yang telah dirinci</i>	59						

## 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

### a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah membuat perjanjian kinerja tahun 2020 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 – 2021 . Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah ditetapkan dan **telah diintegrasikan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021**. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan
1	2	3	4	5
<b>Misi Pertama: Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</b>				
1	Terpeliharanya toleransi antar umat beragama	Jumlah konflik antar umat beragama	0	Jumlah
<b>Misi Kedua : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam</b>				
2	Meningkatnya akses pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (ARLS)	10,30	Tahun
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	70	Tahun
4	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penurunan angka kemiskinan	8.90	Persen
<b>Misi Ketiga : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik</b>				
5	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Peringkat LPPD	3	Peringkat (Provinsi)
		Nilai evaluasi AKIP	BB	Predikat
		Opini BPK	WTP	Opini
		Persentase Implementasi e-Government	2.2	Nilai
<b>Misi Keempat : Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan</b>				
6	Meningkatnya produksi bahan pangan utama	Persentase pertumbuhan produksi pertanian	5	Persen
		Persentase pertumbuhan produksi peternakan dan perikanan	3	Persen
7	Meningkatnya pertumbuhan PDRB	Persentase pertumbuhan PDRB	3.90	Persen
8	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	148.399	Orang
<b>Misi Kelima :Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah</b>				
9	Meningkatnya infrastruktur jaringan jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik	71,16	Persen

**b. Pengukuran Target Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja**

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020 telah melaksanakan kinerja yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 yang terdiri **9 sasaran dan 13 indikator**

**sasaran** yang diharus diwujudkan pada tahun 2020, hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Pengukuran Kinerja Pemerintah**  
**Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2020			Capaian Kinerja (%)	Interprestasi
			Target	Satuan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Misi Pertama: Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</b>							
1	Terpeliharanya toleransi antar umat beragama	Jumlah konflik antar umat beragama	0	Jumlah	0	100	Baik
<b>Misi Kedua : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam</b>							
2	Meningkatnya akses pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (ARLS)	10,30	Tahun	9,54	92,62	Baik
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	70	Tahun	69,52	99,3	Baik
4	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penurunan angka kemiskinan	8,90	Persen	9,36	105	Sangat Baik
<b>Misi Ketiga : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik</b>							
5	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Peringkat LPPD	3	Peringkat (Provinsi)	-	n/a	Masih dalam proses penilaian
		Nilai evaluasi AKIP	BB	Predikat	-	-	Masih dalam proses penilaian
		Opini BPK	WTP	Opini	-	-	Masih dalam proses penilaian
		Persentase Implementasi e-Government	2,2	Nilai	2,6	118	Sangat Baik
<b>Misi Keempat : Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan</b>							
6	Meningkatnya produksi bahan pangan utama	Persentase pertumbuhan produksi pertanian	5	Persen	-4,199	-83,98	Kurang
		Persentase pertumbuhan produksi peternakan dan perikanan	3	Persen	-8,25	-275	Kurang

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2020			Capaian Kinerja (%)	Interprestasi
			Target	Satuan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Meningkatnya pertumbuhan PDRB	Persentase pertumbuhan PDRB	3.90	Persen	-0,13	-3,3	Kurang
8	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	148.399	Orang	100.875	68	Cukup
<b>Misi Kelima :Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah</b>							
9	Meningkatnya infrastruktur jaringan jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik	71,16	Persen	73,19	102	Sangat Baik

Sumber : Organisasi Perangkat Daerah Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2020

**c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya**

Pengukuran capaian kinerja pada tahun 2019 di Kabupaten Humbang Hasundutan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 sedikit lebih baik dikarenakan adanya beberapa indikator sasaran yang mengalami penurunan tetapi, di tahun 2020 ada indikator sasaran atau program yang mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian kinerja tahun 2019. Berikut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.3**  
**Perbandingan Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 dengan Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi		Capaian Kinerja (%)	Interprestasi
				2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Misi Pertama: Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</b>							
1	Terpeliharanya toleransi antar umat beragama	Jumlah konflik antar umat beragama	0	0	0	100	Baik
<b>Misi Kedua : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam</b>							
2	Meningkatnya akses pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (ARLS)	10,30	9,58	9,54	92,62	Baik
3	Meningkatnya derajat kesehatan	Angka harapan hidup	70	69,12	69,52	99,3	Baik

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi		Capaian Kinerja (%)	Interprestasi
				2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8
	masyarakat						
4	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penurunan angka kemiskinan	8,90	8,7	9,36	105	Sangat Baik
<b>Misi Ketiga : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik</b>							
5	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Peringkat LPPD	3	Peringkat 3	-	n/a	Masih dalam proses penilaian
		Nilai evaluasi AKIP	BB	BB	-	-	Masih dalam proses penilaian
		Opini BPK	WTP	WTP	-	-	Masih dalam proses penilaian
		Persentase Implementasi e-Government	2.2	1,9	2,6	118	Sangat Baik
<b>Misi Keempat : Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan</b>							
6	Meningkatnya produksi bahan pangan utama	Persentase pertumbuhan produksi pertanian	5	30,90	-4,199	-83,98	Kurang
		Persentase pertumbuhan produksi peternakan dan perikanan	3	-5,43	-8,25	-275	Kurang
7	Meningkatnya pertumbuhan PDRB	Persentase pertumbuhan PDRB	3.90	4,94	-0,13	-3,3	Kurang
8	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	148.399	131.137	100.875	68	Cukup
<b>Misi Kelima :Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah</b>							
9	Meningkatnya infrastruktur jaringan jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik	71,16	65,31	73,19	102	Sangat Baik



**d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah**

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020 telah melaksanakan kinerja yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 yang terdiri **9 sasaran dan 13 indikator sasaran** yang diharus diwujudkan pada tahun 2020. Pengukur capaian kinerja Tahun 2020 jika dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah ada beberapa indikator sasaran yang telah mencapai atau melewati target RPJMD tahun 2021 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD 2021	Tahun 2020		Capaian Kinerja (%)	Interprestasi
				Satuan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Misi Pertama: Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</b>							
1	Terpeliharanya toleransi antar umat beragama	Jumlah konflik antar umat beragama	0	Jumlah	0	100	Baik
<b>Misi Kedua : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam</b>							
2	Meningkatnya akses pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (ARLS)	10,35	Tahun	9,54	92	Baik
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	70,5	Tahun	69,52	98,6	Baik
4	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penurunan angka kemiskinan	8,85	Persen	9,36	105	Sangat Baik
<b>Misi Ketiga : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik</b>							
5	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Peringkat LPPD	2	Peringkat (Provinsi)	-	n/a	Masih dalam proses penilaian
		Nilai evaluasi AKIP	BB	Predikat	-	-	Masih dalam proses penilaian
		Opini BPK	WTP	Opini	-	-	Masih dalam proses penilaian

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD 2021	Tahun 2020		Capaian Kinerja (%)	Interprestasi
				Satuan	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Implementasi e-Government	2.5	Nilai	2,6	104	Sangat Baik
<b>Misi Keempat : Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan</b>							
6	Meningkatnya produksi bahan pangan utama	Persentase pertumbuhan produksi pertanian	26,8	Persen	-4,199	-15,66	Kurang
		Persentase pertumbuhan produksi peternakan dan perikanan	17	Persen	-8,25	-48,5	Kurang
7	Meningkatnya pertumbuhan PDRB	Persentase pertumbuhan PDRB	4	Persen	-0,13	-3,25	Kurang
8	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	163.239	Orang	100.875	62	Cukup
<b>Misi Kelima :Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah</b>							
9	Meningkatnya infrastruktur jaringan jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik	71,91	Persen	73,19	101	Sangat Baik

**e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.**

Penggunaan sumber daya dala, rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. APBD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2019 perbub nomor 54 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, untuk anggaran Belanja langsung dan tidak langsung Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar **Rp. 1.021.828.914.351.**

**Tabel 3.38**  
**Belanja Tidak Langsung**  
**Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020**

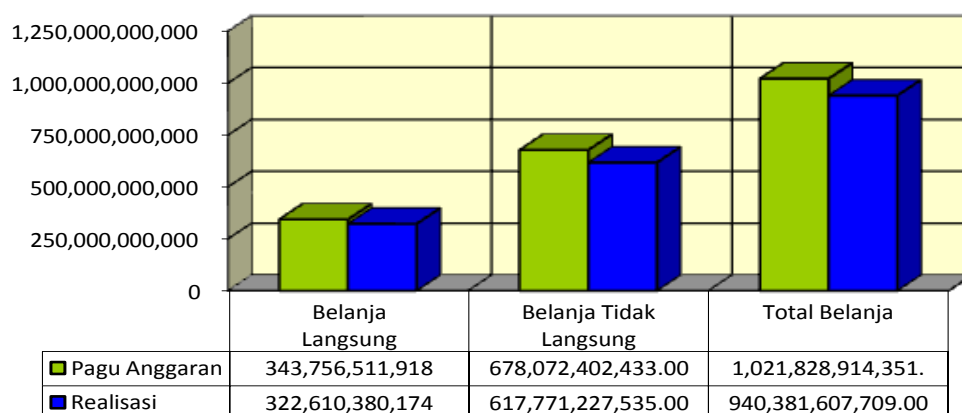
NO	BELANJA TIDAK LANGSUNG	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	411.866.855.232	377.185.042.213	91
2	Belanja Hibah	42.728.915.200	41.207.643.200	96
3	Belanja Bantuan Sosial	430.080.000	365.080.000	84
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	175.203.643.593	175.203.643.565	100
5	Belanja Tidak Terduga	47.842.908.408	23.809.818.557	49
<b>JUMLAH</b>		<b>678.072.402.433</b>	<b>617.771.227.535</b>	<b>91</b>

**Tabel 3.39**  
**Belanja Langsung**  
**Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020**

NO	BELANJA LANGSUNG	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	22.479.425.000	21.472.916.012	95
2	Belanja Barang dan Jasa	189.666.178.834	182.672.528.563	96
3	Belanja Modal	131.610.908.084	118.464.935.599	90
<b>JUMLAH</b>		<b>343.756.511.918</b>	<b>322.610.380.174</b>	<b>93</b>

Sehingga total realisasi anggaran Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020 adalah **Rp 940.381.607.709** dengan target **Rp 1.021.828.914.351** dengan capaian realisasi anggaran adalah **92,02%**, dan dapat dilihat pada grafik berikut

**Grafik 3.1**  
**Realisasi Anggaran Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020**



**f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja**

Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan Kabupaten Humbang Hasundutan tidak terlepas dari Visi dan Misi Kabupaten Humbang Hasundutan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020 telah melaksanakan kinerja yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 yaitu terdiri dari 9 sasaran yang memiliki 13 program yang harus diwujudkan pada tahun 2020.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020, sesuai dengan perencanaan kinerja perubahan yang telah ditetapkan berupa Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020, serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan bersama segenap komponen masyarakat telah berupaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Analisis atas capaian indikator-indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

***Misi Pertama***

***Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa***

Dalam meningkatkan capaian kinerja dalam mewujudkan Misi I diatas, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan Pengembangan Program Pembangunan dengan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun-tahun berikutnya , seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan. Adapun Tujuan dan Sasaran itu dicapai dengan Program dan Kegiatan sebagaimana dijelaskan, dengan tujuan terciptanya kehidupan umat beragama yang harmonis. Dengan indikator tujuan jumlah konflik antar umat

beragama. Dimana pada misi in iterdapat 1 (satu) sasaran yang mendukung.

### **3.2.1 SASARAN 1 : Terpeliharanya Toleransi Antar Umat Beragama**

Istilah toleransi mencakup banyak bidang. Salah satunya adalah toleransi beragama, yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar umat penganut agama lain, seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama, dan tidak mencela / menghina agama lain dengan alasan apapun. Dalam mendukung Mewujudkan Visi Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu Humbang Hasundutan Yang Hebat dan Bermentalitas Unggul serta mewujudkan Misi Kabupaten Humbang Hasundutan terutama Misi I yaitu “Meningkatkan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Dengan tujuan terciptanya kehidupan umat beragama yang harmonis dengan indikator sasaran Jumlah konflik antar umat beragama.

Kabupaten Humbang Hasundutan adalah berpenduduk mayoritas beragama Kristen Protestan. Namun, terdapat juga penduduk dengan agama lainnya, seperti Islam, Katholik dan Aliran kepercayaan (parmalim). Dimana terdapat gereja dan mesjid di daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Secara keseluruhan, masyarakat kabupaten Humbang Hasundutan hidup rukun dan damai antar umat beragama walaupun terjadi perbedaan agama hal ini terjadi karena tingginya toleransi antar umat beragama yang berlaku di masyarakat. Pengalaman nilai – nilai agama, sosial budaya dengan meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan sosial masyarakat yang ditandai dengan jumlah konflik antar umat beragama. Hal ini menjadi hal yang penting bagi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka menciptakan masyarakat yang religius sehingga terciptanya kesejahteraan dalam bermasyarakat.

Dalam kehidupan sehari – hari masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan bersifat religius. Hal ini terlihat dari kegiatan dan tindakan sehari – hari yang selalu dikaitkan dengan agama baik dalam acara perberkatan, peresmian maupun terkait dengan rezeki. Masyarakat cukup antusias membangun rumah-

rumah ibadah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat maupun bantuan dari Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Berbicara tentang kebudayaan dan suku yang beragam tidak akan pernah habis habisnya karena selalu ada saja hal yang unik dan berbeda antara suku dengan suku lainnya. Suku Batak mengangkat Topik Falsafah hidup suku batak dalam kehidupan sosial dan falsafah menekankan bagaimana kita harus berpikir, bertindak, berlogika, beretika dan estetika falsafah batak yang sudah umum dikenal adalah “**Dalihan na Tolu**” yang dalam bahasa indonesia bisa diartikan “Dalihan = Tungku, “Natolu = Tiga atau “Tiga Tungku” yang berarti tiga kedudukan fungsional yang saling menopang satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan

Ketiga kedudukan tersebut adalah 1. *Somba Marhula*/Hormat kepada pihak istri keluarga 2. *Manat Mardongan Tubu*//Hormat kepada pihak istri keluarga 2. *Manat Mardongan Tubu*/bersikap hati hati kepada saudara, baik kandung atau semarga 3. *Elek Marboru*/bersikap membujuk terhadap putri atau pihak keluarga atau suami putri kita.

Upaya dalam memelihara toleransi antar umat beragama, pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan program peningkatan kehidupan beragama, Program pembinaan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dan program pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan melibatkan 3 (tiga) OPD di Kabupaten Humbang Hasundutan yakni Setdakab, Badan Kesbangpol, dan Satpol PP. Analisis capaian sasaran terpeliharanya toleransi antar umat beragama dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.4**  
**Analisis Capaian Sasaran 1 Terpeliharanya Toleransi antar Umat Beragama**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah konflik antar umat beragama	Jumlah	0	0	100%	0	0	100%	Baik

*Sumber data : Setdakab Humbang Hasundutan*

Pada tabel di atas dapat dilihat realisasi pada indikator sasaran ini pada tahun 2019 dan tahun 2020 adalah 0 konflik, dengan target 0 konflik. Dengan capaian kinerja tahun 2019 dan tahun 2020 adalah 100%, dengan interpretasi pada sasaran ini adalah bernilai BAIK.

Hal ini terjadi karena adanya hubungan harmonis antar umat beragama, dan komunikasi yang baik dengan pimpinan agama. Dan komunikasi yang baik dengan FKUB Kabupaten Humbang Hasundutan (Forum Kerukunan Umat Beragama). FKUB berfungsi untuk menyatukan pendapat antar umat beragama di pimpinan agama. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya sosialisasi kepada pelajar pemuda-pemudi untuk tidak melakukan tindakan anarkis (tawuran) di Kabupaten Humbang Hasundutan. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5**  
**Terpeliharanya Toleransi antar Umat Beragama di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 Dibandingkan Target RPJMD Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2021	PERSENTASE Capaian Kinerja (%)
			2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah konflik antar umat beragama	Jumlah	0	0	0	100%

*Sumber data : Setdakab Humbang Hasundutan*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian sasaran pada tahun 2020 mencapai 0 konflik. Sedangkan pada RPJMD target akhir yang dituju adalah 0 konflik, sehingga pencapaian kinerja sampai pada tahun 2020 terhadap RPJMD tahun 2021 adalah 100%, dengan interpretasi pada sasaran ini adalah **BAIK**.

Pada tahun mendatang, dalam rangka mempertahankan agar tidak ada konflik antar umat beragama di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah memperbanyak ramah tamah dengan tokoh – tokoh agama dan tokoh masyarakat dan forkopimda, dalam rangka penegakan aturan bersama di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Memperbanyak sosialisasi penanganan masalah terhadap pemuda-pemudi yang belum terima dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, Kabupaten Humbang Hasundutan diikat dengan falsafah adat Batak dalam kehidupan bersosialisasi.

***Misi Kedua***  
***Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam***

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) adalah suatu harapan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kualitas SDM dapat dicapai dengan adanya langkah-langkah kebijakan, dalam hal ini bidang pendidikan, kesehatan dan pengelolaan potensi Sumber Daya Alam, dengan menetapkan beberapa sasaran sebagai berikut :

**3.2.2 SASARAN 2 : Meningkatkan Akses Pendidikan**

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sejalan dengan Pembukaan UUD 1945, batang tubuh konstitusi tersebut pada pasal 20, pasal 21, pasal 28 c ayat (1), pasal 31 dan pasal 32 mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Penetapan Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 24 tahun 2018 tentang Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019-2021. Salah satu indikator yang menunjukkan peningkatan



akses pendidikan adalah **angka rata-rata lama sekolah (ARLS)**, yang dapat diartikan berapa lama penduduk usia 25 tahun keatas bersekolah dalam suatu daerah. Untuk usia 7-12 tahun adalah Sekolah Dasar, usia 13-15 tahun adalah Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah usia 16-18 tahun dan Sarjana usia 19-24 tahun, artinya lama sekolah SD sampai SMP adalah 9 tahun, SM adalah 3 tahun dan Sarjana adalah 5 tahun. Dengan demikian jika seorang penduduk tamat sarjana maka lama sekolahnya adalah 17 tahun. Pemerintah telah menetapkan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Wajib Belajar Dua Belas Tahun sehingga diharapkan tidak ada lagi penduduk yang tidak tamat Sekolah Menengah (SM). Program ini juga sangat mendukung agar kiranya semua penduduk Humbang Hasundutan sudah melek huruf. Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan target angka rata-rata lama sekolah tahun 2020 sebesar 10,30 sementara target nasional tahun 2024 sebesar 9,18 tahun.

Dalam pencapaian sasaran ini Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan berbagai macam program dengan melibatkan beberapa OPD yakni Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas PKP, Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sasaran ini memiliki indikator sasaran yakni angka rata – rata lama sekolah dengan formula perhotungan kombinas antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang didiuduki dan pendidikan yang ditamatkan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah adalah dengan **peningkatan akses pendidikan**. Melalui akses ini diharapkan seluruh penduduk Humbang Hasundutan rata-rata dapat menempuh sekolah minimal sampai Sekolah Menengah (SM). karena akses pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan sudah hampir tercapai. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Pendidikan menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut. Diantaranya yaitu, program pendidikan anak usia dini, program wajib belajar sembilan tahun, dan program pendidikan

non formal. Perhitungan indikator angka rata – rata lama sekolah dan angka melek huruf, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Capaian Sasaran 2 Meningkatnya Akses Pendidikan**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Angka rata-rata lama sekolah (ARLS)	Tahun	10,25	9,53	93,65	10,30	9,54	92,62	<b>BAIK</b>

*Sumber data : Kabupaten Humbang Hasundutan dalam angka*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, angka rata – rata lama sekolah (ARLS) pada tahun 2019 di Kabupaten Humbang Hasundutan sudah mencapai angka 9.53 tahun dengan target 10.25 tahun, sehingga capaian kinerja pada tahun 2019 sudah mencapai angka 93.65%, pada tahun 2020 pada sasaran ini di Kabupaten Humbang Hasundutan yakni mencapai angka 9,54 tahun dengan target 10.30 tahun, sehingga capaian kinerja pada tahun 2020 sudah mencapai angka 92,62, sehingga persentase hasil penilaian dengan interpretasi **Baik**

Perhitungan angka rata – rata lama sekolah didapat dari jenjang pendidikan terakhir jumlah penduduk berumur 25 tahun keatas di Kabupaten Humbang Hasundutan. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020 adalah 9,54 tahun atau kelas X semester 1 SMA sederajat. Persentase ini dipengaruhi oleh masih banyak penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan yang belum tamat Sarjana (S-1). Dengan adanya Program Wajib belajar 12 Pada dasarnya penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan umur produktif sudah rata-rata tamat SMA, namun umur lansia memang masih banyak yang tamat SMP dan SD.

Capaian sasaran pada tahun 2020 mengalami peningkatan dikarenakan:

1. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
2. Dengan adanya bantuan BOS untuk masyarakat dalam Penduduk Kartu Indonesia Pintar (KIP);
3. Pemberian bantuan beasiswa kepada siswa / mahasiswa yang berprestasi;

4. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan;
5. Pemberian tunjangan sertifikasi guru;
6. Mulai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pendidikan Tinggi.

Salah satu indikator keberhasilan pendidikan dapat diukur melalui hasil Ujian Nasional, Namun dikarenakan Pandemi Covid 19 maka Pemerintah membuat Kebijakan membatalkan pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2020 demi alasan kesehatan sesuai surat edaran Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus atau Covid 19, sehingga indicator ini tidak dapat diukur.

Capaian sasaran meningkatnya akses pendidikan tahun 2020 dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.7**  
**Capaian Sasaran Meningkatnya Akses Pendidikan Tahun 2020**  
**dibandingkan Target RPJMD Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020	Rencana sesuai dengan RPJMD 2021	PERSENTASE Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Angka rata-rata lama sekolah (ARLS)	Tahun	9,54	10,35	92

*Sumber data : Kabupaten Humbang Hasundutan dalam angka*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian kinerja jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2021 untuk sasaran ini adalah 92% Target untuk sasaran ini adalah sebesar 10,35 tahun, sehingga pada sasaran ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021 adalah **BAIK**. Pada tahun mendatang, dalam rangka pencapaian target akhir RPJMD 2021, Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan program dalam rangka pencapaian target akhir RPJMD diantaranya yaitu : peningkatan akses dan mutu pendidikan, pemberian bantuan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa yang berprestasi, karena jika suatu

Kabupaten memiliki jumlah penduduk yang tamat Sarjana maka ARLS nya akan meningkat signifikan.

### 3.2.3 SASARAN 3 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat akan terwujud, jika semua komponen bangsa berperan serta dalam upaya kesehatan dengan memprioritaskan *promotive-preventif* tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Selain itu mengubah pola hidup ke arah *promotive* dan *preventive*. Sehat menurut *World Health Organization* (WHO) adalah suatu keadaan kondisi fisik mental dan kesejahteraan social yang merupakan satu kesatuan yang bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Sedangkan, harapan hidup adalah perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di salah satu wilayah dari sekelompok makhluk hidup tertentu.

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan melibatkan beberapa OPD terkait yakni Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PKP, Dinas PUPR, Dinas P2KB, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kopedagin, Dinas Sosial, Dinas PMDP2A, BPBD dan Satpol PP dengan melakukan 22 program, yakni :

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program standarisasi Pelayanan Kesehatan;
3. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Program Peningkatan Pelayanan dasar, penunjang medik dan sarana prasaran Rumah sakit;
5. Program peningkatan mutu pelayanan BLUD;
6. Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak/hewan;
7. Program peningkatan diversifikasi ketahanan pangan masyarakat;
8. Program lingkungan sehat perumahan;

9. Program pengendalian banjir;
10. Program keluarga berencana;
11. Program penataan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
12. Program pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan hidup;
13. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan;
14. Program pembinaan dan pemsyarakatan olahraga;
15. Program peningkatan sarana dan prasaran olahraga;
16. Program pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan social;
17. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
18. Program penguatan/peningkatan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
19. Program penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
20. Program pencegahan dan kesiapsiagaan;
21. Program kedaruratan dan logistic;
22. Program pencegahan dini dan pemadam kebakaran.

Angka harapan hidup digunakan untuk menilai derajat kesehatan dan secara tidak langsung juga memberi gambaran tentang adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Adanya perbaikan pada pelayanan kesehatan melalui keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan angka harapan hidup. Capaian angka harapan hidup Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2020 adalah 69,52 , dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Angka Harapan Hidup (AHH) per Kecamatan**  
**Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020**

No	KECAMATAN	Jumlah Umur Kematian	Jumlah Kasus Kematian	UHH
1	Doloksanggul	7883	121	65,15
2	Paranginan	3850	55	70,00
3	Bonandolok	2765	37	74,73
4	Onan Ganjang	4780	65	73,54
5	Pollung	7112	103	69,05
6	Tarabintang	2837	41	69,20
7	Baktiraja	3466	50	69,32
8	Parlilitan	5870	78	75,26
9	Lintong nihuta	4846	72	67,31
10	Pakkat	6504	96	67,75
Humbang Hasundutan		49913	718	69,52

*Sumber data : Laporan Kemaitian Puskesmas se- Kabupaten Humbang Hasundutan*

Angka Harapan Hidup (AHH) ini diperoleh dari Jumlah semua umur yang meninggal di bagi jumlah semua yang meninggal. Untuk tahun 2020, diperoleh angka harapan hidup (AHH) Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 69,52 tahun, dalam arti bahwa umur harapan hidup bayi yang lahir di tahun 2020, diharapkan usianya dapat mencapai 69,52 tahun, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 3.9**  
**Analisis Capaian Sasaran 3**  
**Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Humbang Hasundutan**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Tahun 2020		Prsentase Capaian Kinerja Tahun 2020	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	89	9	10
1	Angka harapan hidup	tahun	69.5	69.12	99,45	70	69.52	99,31	<b>BAIK</b>

*Sumber data : Humbang Hasundutan dalam angka*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, Angka harapan hidup di Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2019 adalah 69,12 tahun sedangkan untuk tahun 2020 angka harapan hidup mengalami kenaikan yaitu 69,52 tahun. Sehingga persentase capaian kinerja tahun 2020 adalah 99,31% sehingga kategori penilaian terhadap sasaran ini dengan interprestasi **BAIK**.

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja sasaran ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui OPD terkait yang telah disebutkan diatas dalam melakukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Humbang Hasundutan. Ada 5 (lima) indicator yang mencapai target bahkan melebihi target yang ditetapkan, yaitu angka kematian Bayi ditargetkan sebesar 10/1000 Kelahiran Hidup, capaian Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 8,64/1000 Kelahiran Hidup. Kasus Kematian Ibu ditargetkan sebesar 8 (delapan) kasus, namun kasus kematian ibu pada tahun 2020 hanya sebesar 5 kasus. Prevelensi Baduta Stunting ditargetkan 18%, capaian sebesar 16,04% (Data EPPGM sampai 15 Januari 2021). Dalam ketiga indicator ini, capaian diukur dengan perbandingan terbalik. Yang artinya semakin rendah capaian maka semakin bagus kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah pelayanan dan pengendalian penyakit masih jauh dibawah target yang ditentukan. Hal ini di akibatkan oleh sasaran yang terlalu tinggi yang ditetapkan oleh Pusat data dan Informasi atau PUSDATIN Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tidak sesuai dengan data riil di lapangan, Kemudian karena masih minimnya anggaran dana untuk program pencegahan dan pengendalian penyakit, ketersediaan sarana dan prasana serta kurangnya SDM. Hal inilah yang menjadi penghambat dalam pencapaian indicator Kinerja DInas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasudutan.

Adanya Pandemi Covid-19 ini juga telah mempengaruhi capaian pelayanan dan pengendalian penyakit. Pembatasan aktivitas masyarakat, dan adanya larangan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan di semua wilayah mengakibatkan terkendalanya pelaksanaan beberapa kegiatan di Puskesmas. Sedangkan analisis dalam efisiensi penggunaan Sumber Daya, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memberdayakan Sumber Daya Manusia PNS maupun tenaga non PNS yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Setiap PNS maupun non PNS melaksanakan tugas dan fungsi dengan maksimal, guna menunjang keberhasilan pencapaian sasaran ini.

Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.10**  
**Pencapaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Humbang Hasundutan Tahun 2020 dibandingkan Target RPJMD 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2021	Persen-tase Capaian Kinerja (%)
			2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7
1	Angka harapan hidup	tahun	69,12	69,52	70,5	98,6

*Sumber data : Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi akumulasi pada tahun 2020 terhadap angka harapan hidup adalah 69,5 tahun, sedangkan rencana target pada tahun 2021 adalah 70,5 tahun, sehingga persentase capaian kinerja untuk tahun 2020 terhadap rencana sesuai RPJMD yaitu 98,6% sehingga interpretasi penilaian terhadap sasaran ini adalah **BAIK**.

### **Data COVID 19 di Kabupaten Humbang Hasundutan**

Jumlah kasus terkonfirmasi Positif di Kabupaten Humbang Hasundutan sampai pada tanggal 21 Februari 2021 adalah sebanyak 141 kasus. Dengan tingkat kematian sebanyak 1 (satu) Kasus, 135 kasus sembuh, dan 5 kasus dalam pemantauan. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tetap berupaya untuk menanggulangi pandemic Covid-19 di Kabupaten Humbang Hasundutan. Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai upaya diantaranya:

#### **A. Tahan Deteksi**

1. Mencatat Setiap Pelaku Perjalanan yang masuk ke Kabupaten Humbang Hasundutan by name by Address, by phone
2. Penyediaan alat Rapid Test serta pemeriksaan Rapid Test kepada orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien covid 19



3. Meningkatkan pelaksanaan surveilans dan epidemiologi di 12 wilayah kerja Puskesmas Khusus penyakit ISPA
4. Pelatihan 12 orang Dokter Puskesmas, 3 orang tenaga medis dan 4 orang paramedis RSUD Doloksanggul , 4 Orang petugas surveilans Dinas Kesehatan serta 4 orang dokter dari klinik swasta dalam hal Skrining Covid-19 dengan narasumber dr. Rianti Tarigan, Sp.P
5. Melakukan Pelatihan Rapid Test dan pengambilan spesimen swab kepada 12 orang petugas surveilans dan 12 orang petugas analis Puskesmas
6. Menetapkan Protokol penanganan antara Dinas Kesehatan dan RSUD Doloksanggul dengan membuat SOP system Rujukan Covid-19 di Kab. Humbang Hasundutan.

## **B. Tahap Pencegahan**

1. Melakukan Sosialisasi Peraturan Bupati No 48 Tahun 2020 tentang penegakan disiplin dan protocol kesehatan Edukasi Covid 19 kepada seluruh masyarakat
2. Himbauan penerapan protocol kesehatan dalam pencegahan Covid-19 di tempat-tempat umum (rumah ibadah, pasar tradisional, dan institusi pemerintah) terkait ; Gerakan 5M Protokol Kesehatan yaitu : Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Mengurangi mobilisasi dan interaksi
3. Peningkatan edukasi masyarakat mengenai Covid-19, Germas, PHBS serta pengendalian program prioritas melalui media cetak (Poster, Spanduk), elektronik (Radio Pelita Batak), Sosialisasi dan penyuluhan ke Tempat – Tempat Umum ( Pasar Tradisional), Home Visit dan Home Care melalui program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK),
4. Pemberian multivitamin (C , B-Complex) kepada orang dengan kontak erat dengan konfirmasi Covid 19

5. Penyemprotan desinfektan di rumah pasien yang terkonfirmasi Covid 19

#### **C. Tata Laksana**

Melakukan pelayanan kepada Pasien Terkonfirmasi Positif sesuai dengan SOP Penanganan Covid-19

#### **D. Keselamatan Petugas**

1. Penyediaan APD petugas : Masker N95 dan masker Bedah, Baju Hazmat, Face shield, Sepatu Boot, Handscoon (sterildan Non Sterile), Nurse Cap, Kacamata Google, Hand Sanitizer
2. Pemberian Multivitamin (Vitamin C dan B-Complex)
3. Pelaksanaan Rapid Test secara Berkala bagi seluruh Petugas Kesehatan

### **3.2.4 SASARAN 4 : Menurunnya Angka Kemiskinan**

Kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta – harta. Pengertian lebih luas menurut KBBI kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup (sandang, pangan dan papan). Penurunan angka kemiskinan sebagai salah satu target pembangunan sangat memerlukan kebijakan dan program pembangunan yang berkelanjutan. Tentang kemiskinan di Indonesia bisa dirujuk kepada Undang – undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan fakir miskin. Pada tahun 2019, dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan beberapa program dengan melibatkan OPD terkait yakni : Dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pertanian, dinas peternakan dan perikanan, dinas PKP, dinas PUPR, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kopedagin, Dinas PMDP2A, Dinas Ketapang, Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pendidikan.

Diantara beberapa OPD yang dimaksud, program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka penurunan angka kemiskinan, adalah :

1. Program pelayanan rehabilitasi, perlindungan diri dan jaminan social;
2. Program pemberdayaan dan kelembagaan social;
3. Program standarisasi pelayanan kesehatan;
4. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
5. Program peningkatan produksi hasil peternakan;
6. Program peningkatan produksi perikanan;
7. Program lingkungan sehat perumahan;
8. Program pengendalian banjir;
9. Program peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
10. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
11. Program pengembangan kelembagaan koperasi dan keunggulan kompetitif UMKM;
12. Program pengembangan industry kecil menengah;
13. Program keluarga berencana;
14. Program penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
15. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
16. Program pengembangan pariwisata;
17. Program peningkatan upaya pertumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;
18. Program wajib belajar sembilan tahun.

Bentuk bantuan yang diterima masyarakat dalam rangka penurunan angka kemiskinan, diantaranya yaitu :

1. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat atau KPM dari program bantuan sembako sebesar 14.359 KPM untuk tahun 2020 meningkat dari target tahun 2019 sebesar 10.260 KPM

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang meningkat bantuan program keluarga harapan (PKH) sebanyak 8.438 KPM tahun 2020 meningkat dari target tahun 2019 sebesar 7.276 KPM.

Perhitungan dalam menurunnya angka kemiskinan di Humbang Hasundutan memiliki indikator dalam pencapaiannya yaitu persentase penurunan angka kemiskinan, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.11**  
**Analisis Capaian Sasaran 4**  
**Menurunnya Angka Kemiskinan di Humbang Hasundutan**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Ket.
			Target	Realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase penurunan angka kemiskinan	%	8.95	8.7	97,21	8,90	9.36	105	Sangat Baik

*Sumber : BPS Kabupaten Humbang Hasundutan*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, persentase penurunan angka kemiskinan pada tahun 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan sudah mencapai angka 9,36 dengan target 8.90, sehingga capaian kinerja pada tahun 2020 sudah mencapai angka 105%, sehingga persentase hasil penilaian sudah dikategorikan **SANGAT BAIK**.

Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan dengan :

1. Melakukan seleksi penerima manfaat bantuan sosial agar bantuan tepat sasaran sehingga program bantuan sosial berdampak pada berkurangnya jumlah kemiskinan;
2. Meningkatkan jumlah anggaran bantuan sosial dimana bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar cukup dan memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan. Sehingga meningkatkan kualitas hidup penerima bantuan;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kelompok usaha bersama (KUBE). Dengan adanya bantuan ini, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang mandiri, sejahtera dan menciptakan usaha ekonomi produktif untuk dirinya sendiri dan kelompok

5. Isu strategis berkaitan dengan penanganan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) adalah hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah :
  - a. Pemetaan terhadap kelompok-kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial.
  - b. Kerawanan sosial yang rentan meningkat disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan ketercapaian ekonomi dalam memenuhi kepentingan-kepentingan yang rawan dan mengarah pada patologi social.
  - c. Penduduk usia lanjut terus meningkat dikarenakan oleh tingginya usia harapan hidup (UHH), namun tidak banyak yang dapat di akomodir oleh pemerintah dalam hal penanganannya.

Program penanggulangan kemiskinan dilakukan di Kabupaten Humbang Hasundutan mengikuti klasifikasi program penanggulangan kemiskinan nasional diklasifikasikan dalam beberapa klaster program sebagai berikut :

1. Klaster 1

Klaster 1 adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah individu atau keluarga. Program penanggulangan kemiskinan klaster 1 ini disebut juga sebagai program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga (*Family Centered Integrated Social Assistance*). Klaster 1 melibatkan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial dalam pelaksanaan program ini.

2. Klaster 2

Klaster 2 adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah masyarakat atau komunitas. Klaster 2 melibatkan Dinas PMDP2A, Dinas Sosial, Dinas P2KB, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kopedagin, BPKPAD

3. Klaster 3

Klaster 3 adalah program penanggulangan kemiskinan yang sasarannya adalah usaha mikro dan kecil. Klaster 3 melibatkan

Dinas P2KB, Dinas Tenaga kerja, Dinas Kopedagin, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Ketapang.

#### 4. Klaster 4

Klaster 4 adalah program dan kegiatan dalam klaster ini berbasis pada upaya peningkatan dan perluasan pro rakyat. Klaster 4 melibatkan Dinas PKP, dan Dinas Pariwisata.

Adapun faktor penghambat atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Humbang Hasundutan diantaranya adalah :

1. Kemampuan sumber daya manusia yang masih terbatas.
2. Sampai dengan saat ini pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan belum memiliki panti rehabilitasi atau rumah singgah yang digunakan untuk melayani PMKS.
3. Data PMKS di Kabupaten Humbang Hasundutan belum valid dan Update;
4. Kurangnya pelayanan PMKS di Kabupaten Humbang Hasundutan;
5. Masih minimnya peran serta kelembagaan dan PSKS

Adapun langkah-langkah percepatan penanggulangan kemiskinan atas beberapa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan, adalah:

1. Mengutamakan pemberian bantuan kepada masyarakat yang sudah terdaftar pada data PMKS Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Pendataan PMKS mengacu pada data DTKS;
3. Peningkatan koordinasi dalam rangka verifikasi dan validasi DTKS;
4. Mendorong tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan untuk melakukan pendataan PMKS di setiap Desa

Pencapaian sasaran menurunnya angka kemiskinan masyarakat Humbang Hasundutan tahun 2020 jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.12**  
**Pencapaian Sasaran Menurunnya angka Kemiskinan**  
**Masyarakat Humbang Hasundutan Tahun 2020**  
**dibandingkan Target RPJMD Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2021	Persentase Capaian Kinerja (%)
			2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase penurunan angka kemiskinan	tahun	8.7	9,36	8.85	105

*Sumber data : Dinas Sosial Kab. Humbang Hasundutan*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, persentase penurunan angka kemiskinan pada tahun 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sudah persentase capaian kinerja 105% dengan target 8.85, sehingga persentase hasil penilaian sudah dikategorikan sangat **SANGAT BAIK**.

***Misi Ketiga***  
***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik***

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik adalah prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mewujudkan pelayanan Pemerintah yang prima terhadap masyarakat. Sistem tata kelola pemerintahan yang baik dapat dicapai dengan menetapkan beberapa sasaran sebagai berikut :

**3.2.5 SASARAN 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan**

Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju *good governance* berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya. Perubahan *mindset* dan *cultureset* penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (*output*) menjadi berorientasi kinerja (*outcome*) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Dengan kata lain, akuntabilitas kinerja menjawab pertanyaan untuk apa individu ada, untuk apa organisasi ada, dan untuk apa pemerintah ada. Dengan

melaksanakan sasaran meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dengan melibatkan beberapa OPD yakni Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bappeda, Inspektorat, BPKPAD, Dinas Kominfo, BKD, Dukcapil, Dinas Perpustakaan, Dinas PMP2TSP dan Dinas PMDP2A.

Dalam upaya peningkatan akuntabilitas pemerintahan, Kabupaten Humbang Hasundutan menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut. Diantaranya yaitu, program penyelenggaraan pemerintahan daerah, program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, Program, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, Program e-Government, Program Persandian untuk pengamanan Informasi, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pengembangan Data, Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD, Program Peningkatan Sistem Administrasi, penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, Program penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Perhitungan peningkatan kualitas akuntabilitas pemerintahan, memiliki indikator dalam pencapaiannya yaitu peringkat LPPD, nilai evaluasi AKIP, opini BPK, level maturitas SPIP dan persentase implementasi e-government, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.13**  
**Analisis Capaian Sasaran 5**  
**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peringkat LPPD	Peringkat (Provinsi)	4	3	Peringkat 3	3	-	-	Masih dalam proses



									penilaian
2	Nilai evaluasi AKIP	Predikat	BB	BB	100	BB	-	-	Masih dalam proses penilaian
3	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100	WTP	-	-	Masih dalam proses penilaian
4	Persentase Implementasi e-Government	Nilai	2.0	1.9	95	2,2	2,6	118	Sangat Baik

*Sumber data : Bag. Tata Pemerintahan, Bag. Organisasi, BPKPAD, Diskominfo Kab.Humbang Hasundutan*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dapat dilihat dari 4 (empat) indikator sasaran. Pada indikator sasaran LPPD, pada tahun 2019, Kabupaten Humbang Hasundutan sudah memperoleh peringkat 3 (tiga) dari target peringkat 4 (empat), Sedangkan untuk tahun 2020, masih dalam proses penilaian, sehingga capaian kinerja untuk sasaran ini belum dapat ditentukan (n/a).

Untuk indikator sasaran nilai evaluasi AKIP, Kabupaten Humbang Hasundutan yang pada tahun 2019 memiliki target predikat BB dan realisasi pada tahun 2019 Kabpaten Humbang Hasundutan dapat memenuhi target nilai BB, , namun pada tahun 2020 Kementerian PAN-RB belum memberikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan AKIP Kabupaten/Kota sehingga pada Laporan Kinerja ini belum dapat menyampaikan hasil penilaian AKIP Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Selanjutnya, pada indikator sasaran Opini BPK, pada tahun 2019 untuk pelaporan tahun 2020, Kabupaten Humbang Hasundutan memperoleh Opini dari BPK adalah WTP. Sedangkan untuk pelaporan tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan belum dapat menyampaikan hasil penilaian opini BPK disebabkan masih dalam proses penilaian.

Pada implementasi implementasi e-government pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sudah mencapai Nilai 1.9 dengan target 2.2. dan pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah mencapai nilai 2,6 dari target yang ditetapkan sebesar 2,2 sehingga rata – rata persentase hasil penilaian interprestasi **SANGAT BAIK**.

## **Indikator : 1. Peringkat LPPD**

LPPD adalah Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat melalui Gubernur Sumatera Utara sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. LPPD berisi cakupan kinerja berdasarkan indikator kinerja kunci yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar penilaian tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan LPPD adalah tidak lengkapnya bukti pendukung dari data yang menjadi indikator penilaian dari data yang disampaikan. Faktor keberhasilan dari meningkatnya peringkat nilai LPPD adalah kemampuan OPD dalam mencapai target yang diminta pada indikator kinerja kunci sehingga pada saat tim EKPPD melakukan evaluasi, tim penyusun dari masing – masing OPD mampu memberikan data pendukung dan jawaban terkait capaian kinerja yang dilakukan masing – masing OPD;

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan nilai LPPD kabupaten Humbang Hasundutan , adalah :

1. Membentuk tim penyusunan LPPD pada bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Melaksanakan rapat dalam rangka membahas data pendukung yang dibutuhkan untuk mencapai target dalam IKK;
3. Melaksanakan asistensi untuk finalisasi data yang termuat dalam LPPD sehingga semua data yang disampaikan valid.

**Tabel 3.14**  
**Pelaksanaan Input dan Output Per Program dan Kegiatan**  
**Sasaran 5.1**

No	Program	Input			Output			Nilai Capaian Program
		Target Rp	Realisasi Rp	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	194.279.300	191.137.338	98,38	255	255	100%	100%
2	Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan rakyat daerah	1.562.350.000	1.433.270.280	91.74	206	165	80%	80%

Sumber data : Bag. Tata pemerintahan dan Sekretariat Dewan Kab.Humbang Hasundutan

**Indikator : 2. Nilai Evaluasi AKIP**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Iplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi implementasi SAKIP di suatu instansi baik pemerintah pusat maupun daerah telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) sejak tahun 2014. Melalui hasil evaluasi tersebut, Kementerian PAN-RB membagi instansi pemerintah menjadi tujuh kategori berdasarkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan sasaran perbaikan yang diperlukan. Ketujuh kategori tersebut, yakni :

**Tabel 3.15**  
**Kategori Penilaian SAKIP**

No	Huruf	Kategori	Range Nilai
1	AA	Sangat Memuaskan	90,01-100
2	A	Memuaskan	80,01-90
3	BB	Sangat Baik	70,01-80
4	B	Baik	60,01-70
5	CC	Cukup	50,01-60
6	C	Kurang	30,01-50
7	D	Sangat Kurang	0-30

*Sumber : Kemenpan RB-RI*

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah melakukan perbaikan dalam setiap sistem pemerintahan terutama dalam bidang perencanaan, pelaporan, dan evaluasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kabupaten Humbang Hasundutan. Dengan melakukan berbagai kegiatan seperti sinergitas antar OPD yang saling bekerja sama mendukung baik dari segi pemikiran dan pelaksanaan kegiatan. Hasil yang diperoleh dari berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja yakni dilakukan perubahan dokumen perencanaan kinerja yang tentu saja berorientasi *outcome*.

### **Indikator : 3. Opini BPK**

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui BPKPAD dan Inspektorat berusaha mencapai target indikator kinerja sasaran yang telah disepakati pada awal tahun kerja sampai akhir periode perencanaan strategis yaitu memperoleh opini WTP atas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kecukupan dalam penyajian data sesuai dengan ketentuan dan menindaklanjuti setiap temuan pemeriksaan intern dan terinci oleh pemeriksa dari tahun ke tahun sampai dengan akhir periode perencanaan strategis.

Faktor pendukung pencapaian Opini WTP adalah apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi kriteria penilaian Opini BPK, yaitu :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

2. Kecukupan Pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Bukanlah hal yang mudah dalam Pencapaian Opini WTP, sehingga terdapat kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka Pencapaian Opini WTP, yakni:

1. Kelamahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan (SAP) dimana pejabat yang bertanggungjawab belum optimal memahami akuntansi dan Pelaporan terutama Pejabat Penatausaha Keuangan, penyusun anggaran kurang cermat dalam menelaah penganggaran pendapatan dan belanja, sehingga belum sepenuhnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kelemahan sistem Pengendalian Internal pada OPD;
3. Masih banyak ASN yang belum sepenuhnya paham dan mengerti dengan tugas pokok dan fungsi dalam mengelola keuangan, sesuai peraturan yang ada;
4. Tidak lengkapnya dokumen administrasi dan bukti transaksi keuangan.

Untuk peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik, transparan dan akuntabel ada beberapa hal yang perlu dilakukan dengan memperhatikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun mendatang, adalah:

1. Perbaikan, penyempurnaan sistem/ kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang tepat.
2. Melaksanakan inventarisasi aset daerah.
3. Sistem pengendalian intern pemerintah yang memadai dan diaplikasikan.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

#### **Indikator : 4. Persentase Implementasi e-government**

Dalam era otonomi daerah untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, salah satu upaya yang dilakukan adalah *e-government*. *e-government* didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak – pihak lain yang berkepentingan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemanfaatan *e-government* sebagai salah satu Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan internal pemerintah sendiri. Di era sistem birokrasi yang rumit dan kaku ini, pemanfaatan *e-government* merupakan salah satu upaya mengatasi sistem birokrasi tersebut.

Berbagai keuntungan dan manfaat yang dapat diperoleh melalui pengembangan *e-government*, di antaranya adalah :

- a. *e-government* dapat menciptakan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi interaksi antar instansi/lembaga, masyarakat dan juga masyarakat internasional;
- b. *e-government* mampu menyediakan sistem manajemen jaringan, sehingga mampu memperpendek lini pengambilan keputusan dan memperluas tentang kendali;
- c. *e-government* dapat mendobrak dinding pemisah antara pemerintah dan masyarakat terutama pemerintah dan sektor swasta, *e-government* dapat membantu pemerintah dalam memberikan layanan publik dengan lebih informatif, efisien dan efektif;

Kesimpulannya, pemanfaatan *e-government* adalah untuk mewujudkan *good governance* atau pemerintahan yang baik. Prinsip – prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) yaitu transparansi, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, keterbukaan, tatanan hukum yang baik (*rule of law*), ketanggapan, *equality*, visi strategis. Hal inilah merupakan prinsip – prinsip yang harus dicapai dalam pelaksanaan *good governance*. Dari beberapa daerah yang telah lebih dahulu melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik diperoleh hasil secara nyata mampu

menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel serta sistem pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Penyebab keberhasilan yang dihadapi selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang lancar dan baik;
- b. Tersedianya fasilitas peralatan dan perlengkapan yang memadai;
- c. Tersedianya ASN yang berkompetensi di bidangnya;
- d. Kerja keras, komitmen segenap ASN dalam hal ini Dinas Kominfo Kabupaten Humbang Hasundutan dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternative solusi yang dtelah dilakukan, adalah :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang peliputan, publikasi dan dokumentasi informasi Pemerintah Daerah dan persandian ;
- b. Kurangnya aparatur yang berkompetensi dalam pengelolaan data statistik dan persandian;
- c. Terbatasnya anggaran;
- d. Kurangnya sumber daya manusia dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Langkah – langkah yang diambil untuk mengatasi kendala dan hambatan adalah sebagai berikut :

- a. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana di bidang peliputan, publikasi dan dokumentasi dan persandian;
- b. Mengusulkan penambahan jumlah aparatur yang berkopetensi dalam pengelolaan dara statistik dan persandian;
- c. Mengusulkan penambahan anggaran.

Sistem pemerintahan berbasis elektornik adalah penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media sosial, yakni Youtube, Majalah, website resmi Kabupaten Humbang Hasundutan. Kendala yang dihadapi: kurangnya animo

masyarakat atas informasi yang disampaikan diberbagai media yang disampaikan, belum semua wilayah di Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki akses internet (*blank spot*), namun pada pemerintah Kabupaten Humbag Hasundutan telah dilakukan pembangunan perangkat, website dan aplikasi. Aplikasi dan website yang ada pada pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.16**  
**Tabel Aplikasi dan Website yang ada di Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan**

No.	Nama Aplikasi	OPD	Keterangan	Status	Tahun
1	2	3	4	5	6
1	Sidapeg	BKD	Aplikasi dari Kabupaten Pakpak Bharat untuk menyimpan data kepegawaian	Selesai di copy	2020
2	Sibahanpe	BKD	Aplikasi dari kab. Pakpak Bharat untuk melihat data sinkronisasi Absensi dan	Selesai di copy	2020
3	E-Kinerja	BKD	Aplikasi dari kab, Pakpak Bharat untuk melaporkan kinerja ASN setiap hari	Selesai di copy	2020
4	Sibahanpe/Lokas	BKD	Aplikasi untuk menentukan lokasi Absensi ASN, baik itu kantor, maupun tempat pertemuan lain	Selesai di copy	2020
5	E-Sakip	Organisasi	Aplikasi untuk menyimpan data Program dan Kegiatan dari masing-masing OPD, dan pencatatan hingga PK. Cascading	Sedang Integrasi dengan Perencanaan 2019	2020
6	Absen Android	BKD	aplikasi untuk melakukan absensi masing-masing ASN	selesai di copy	2020
7	E-Warung Web		Portal untuk admin dalam melihat data ewarung	Done	2020
8	E-Warung Penjual		aplikasi mobile untuk penjual di eWarung	Done	2020
9	E-Warung Pembeli		aplikasi mobile untuk pembeli di eWarung	Done	2020
10	PMKS	Dinas Sosial	aplikasi untuk pendataan PMKS di kabupaten HH	Done	2020
11	Sikeren	P2KB	Aplikasi untuk pendataan data masyarakat yang melakukan KB	pending report untuk aplikasi sikeren	2020
12	Covid	Diskominfo	aplikasi untuk publikasi sebaran covid	Done	2020
13	Beasiswa	Diskominfo	aplikasi untuk pemberian beasiswa kepada siswa	Done	2020



No.	Nama Aplikasi	OPD	Keterangan	Status	Tahun
1	2	3	4	5	6
			dan mahasiswa		
14	BMKG	Diskominfo	aplikasi untuk publikasi keadaan cuaca yang digunakan oleh BMKG Silangit	Done	2020
15	Simpeg non pns/ID card	Diskominfo	Penambahan fitur pada aplikasi idcard agar dapat melakukan pencetakan idcard untuk Pegawai Non PNS	Done	2020
16	SISTA	Diskominfo	APlikasi untuk publikasi data statistik yang dapat di publikasikan	Done	2020
17	WORKLOG	Diskominfo	APlikasi pencatatan kerja ASN Bidang informatika	Done	2019
18	SIMENTEL	Diskominfo	penarikan retribusi menara	Done	2019
19	JIDH	Bag. Hukum	kumpulan peraturan daerah	Done	2019
20	Website Kecamatan	Kantor Camat yang bersangkutan	10 website kecamatan	Done	2019
21	Website Desa	Desa yang Bersangkutan	153 website desa	Done	2019
22	SIMPUSKES	Semua Puskesmas	10 aplikasi Sistem Informasi Puskesmas	Done	2019
23	SIMLUHTAN	Pertanian	aplikasi pencatatan kelompok tani	Done	2018
24	SIDAMA	DPMP2A	Aplikasi pencatatan data kelompok Dasa Wisma	Done	2018
25	IDCARD	Diskominfo	Aplikasi pencetakan IDCard untuk ASN di Humbang Hasundutan	Done	2018
26	EPLANNING	DPMP2TSP	Sudah tidak digunakan karena menggunakan pihak ke 3	Done	2018
27	SIPATURE	DPMP2TSP	Sudah tidak digunakan karena menggunakan pihak ke 3	Done	2018
28	Website Kab. Humbahas	Diskominfo			2016

Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.17**  
**Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Tahun 2020 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2021	Persentase Capaian Kinerja (%)
			2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7
1	Peringkat LPPD	Peringkat (Provinsi)	3	-	2	n/a
2	Nilai evaluasi AKIP	Predikat	BB	-	BB	n/a
3	Opini BPK	Opini	WTP	-	WTP	n/a
4	Persentase Implementasi e-Government	nilai	1,9	2,6	2.5	104

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas pemerintahan jika dibandingkan dengan RPJMD 2021, dapat dilihat dari 4 (empat) indikator sasaran. Pada inidkator sasaran LPPD, pada tahun 2019 Kabupaten Humbang Hasundutan sudah memperoleh peringkat 3 (tiga). Sedangkan untuk tahun 2020, masih dalam proses penilaian, namun target akhir RPJMD tahun 2021 adalah peringkat 2. Untuk indikator sasaran nilai evaluasi AKIP, Kabupaten Humbang Hasundutan yang pada tahun 2019 mendapat nilai BB, sedangkan pada tahun 2020 penilaian evaluasi AKIP masih dalam prosees, dan target akhir RPJMD Kabupaten Humbang Hasudutan pada tahun 2021 adalah BB.

Selanjutnya, pada indikator sasaran Opini BPK, pada tahun 2019, Kabupaten Humbang Hasundutan memperoleh Opini dari BPK adalah WTP, Sedangkan untuk tahun 2020, Kabupaten Humbang Hasundutan belum menerima di karenakan masih dalam proses penilaian BPK, sedangkan Target akhir RPJMD adalah WTP. Pada implementasi e-government pada tahun 2019 di Kabupaten Humbang Hasundutan sudah mencapai angka 1,9, sedangkan pada tahun 2020 adalah 2,6 sedangkan target akhir RPJMD adalah 2.5, sehingga capaian sasaran atas target akhir RPJMD tercapai dengan nilai 104 dengan kategori **SANGAT BAIK**.

### 3.2.6 SASARAN 6 : Meningkatnya Produksi Bahan Pangan Utama

Bahan Pangan Utama adalah faktor penting dalam menilai kesejahteraan suatu masyarakat di suatu daerah. Menurut Undang – undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari Hak Azasi Manusia yang dijamin dalam undang – undang dasar Negara Indonesia tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Kabupaten Humbang Hasundutan, memiliki kemampuan untuk memproduksi bahan pangan utamanya sendiri tanpa perlu bantuan atau impor dari daerah lainnya, yang disebut daerah yang mandiri pangan, sehingga sektor pertumbuhan pengembangan wilayah tersebut yang lainnya dapat dilaksanakan dengan maksimal. Dalam upaya peningkatan produksi bahan pangan utama, Kabupaten Humbang Hasundutan menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut dengan melibatkan beberapa OPD terkait yakni Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PUPR, Dinas PMDP2A, Dinas Ketenagakerjaan dan BPBD. Yang dimaksud bahan pangan utama adalah padi, jagung, sapi potong, babi, kerbau, ayam dan itik. Perhitungan peningkatan produksi bahan pangan utama, memiliki indikator dalam pencapaiannya yaitu persentase pertumbuhan produksi pertanian dan persentase pertumbuhan produksi peternakan.

#### **Indikator : 1. Persentase pertumbuhan Produksi Pertanian**

Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan daerah agraris yang sesuai untuk pengembangan komoditi pertanian. Hampir keseluruhan tanaman pangan dan hortikultura di dataran tinggi dapat dikembangkan di daerah. Namun hingga saat ini pengelolannya masih bersifat tradisional dan orientasinya pun masih dalam skala kecil. Selain itu masyarakat telah terbiasa bahkan berbudaya untuk menanam padi sebagai tanaman utama

walaupun hasilnya jauh dari produksi rata – rata. Perhitungan antara realisasai kinerja serta capaian kinerja pada tahun 2019 dan tahun 2020, pada produksi pertanian (padi dan jagung), adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.18**  
**Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dan tahun 2020**

No	Uraian	Satuan	2019		Pencapaian Target (%)	2020		Pencapaian Target (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Produksi Padi	%	2	1	50	2	-13,40	-669
2	Produksi Jagung	%	5	60,80	1.216	5	5,002	100

*Sumber data : Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan*

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa, produksi padi dan belum mencapai dari target yang ditetapkan disebabkan oleh pada tahun 2019 ada bantuan peningkatan IP 2 atau luas tambah tanam (LTT) Padi TA. 2018 yang ditanam di MT pada Bulan Oktober 2018 sampai dengan Bulan maret 2019 sementara hasilnya menunjukkan bahwa IP2 di daerah Dataran tinggi ( lintongnihuta, Paranginan, Doloksanggul, Sijamapolang, Onanganjang, Pollung) tidak dapat dilaksanakan lagi karena factor benih VUB yang belum sesuai dan hama burung karena tidak dilakukan oleh semua petani/pemilik sawah/ pemilik sawah tadah hujan. Sedangkan pada tahun 2020 tidak ada bantuan,

Pada tahun 2020 dengan adanya pandemic Covid 19 yang menyebabkan anggaran kementerian/lembaga dan Provinsi mengalami Refocusing sehingga tidak ada bantuan benih atau bibit Padi dan jagung. Pada tabel dibawah ini akan memperlihatkan perbandingan target dan realisasi produksi tanaman pangan pada tahun 2020 dalam ton, sebagai berikut :

**Tabel 3.19**  
**Perbandingan Target dan realisasi Produksi Tanaman Pangan Tahun 2020**

No	Uraian	Target Nasional	Peternian		Pencapaian Target (%)
			Target 2020 (ton)	Realisasi 2020 (ton)	
1	Produksi Padi	119.030.00	157.304.09	133.585.10	84.92
2	Produksi Jagung	56.877.00	103.980.11	103.982.68	100

*Sumber data : Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan*

Analisa penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja produksi tanaman pangan dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Produksi padi

produksi padi belum mencapai dari target yang ditetapkan disebabkan oleh pada tahun 2019 ada bantuan peningkatan IP 2 atau luas tambah tanam (LTT) Padi TA. 2018 yang ditanam di MT pada Bulan Oktober 2018 sampai dengan Bulan maret 2019 sementara hasilnya menunjukkan bahwa IP2 di daerah Dataran tinggi ( lintongnihuta, Paranginan, Doloksanggul, Sijamapolang, Onanganjang, Pollung) tidak dapat dilaksanakan lagi karena factor benih VUB yang belum sesuai dan hama burung karena tidak dilakukan oleh semua petani/pemilik sawah/ pemilik sawah tadah hujan. Sedangkan pada tahun 2020 tidak ada bantuan.

b. Produksi Jagung

Target produksi jagung tahun 2020 adalah 103.980.11 ton dan realisasi sebesar 103.982.68 ton atau tercapai sebesar 100% dari target. Realisasi ini dapat dicapai karena didukung oleh beberapa faktor yaitu :

1. Program UPSUS PAJALE (Upaya khusus Padi, jagung dan kedelai)
2. Pada tahun 2018 pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mendapat alokasi PAT (Pertambahan Areal Tanam) jagung sehingga masyarakat sudah mampu secara mandiri untuk mengembangkan pertanaman jagung;
3. Adanya bantuan alat dan mesin pertanian berupa traktor dan *excavator* sehingga menambahkan luasan lahan bukaan baru yang diolah untuk pertanaman jagung;
4. Adanya jaminan harga dari pemerintah sebesar Rp 3.150/Kg dengan menjalin kerjasama dengan perusahaan penampung jagung PT. Phokphand dan JAPPA sehingga meningkatkan animo petani dalam membudidayakan jagung.

Faktor pendukung peningkatan produksi pertanian adalah:

1. Tersedianya pengairan yang baik atau irigasi;
2. Tersedianya bibit / benih unggul;

3. Pemupukan yang tepat (tepat waktu, tepat dosis, tepat jenis, tepat cara, tepat tempat);
4. Penerapan teknologi budidaya anjuran yang diberikan oleh penyuluh pertanian kepada masyarakat;
5. Dukungan ALSINTAN (Alat dan mesin pertanian).

Hal – hal yang harus diperhatikan untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya, adalah :

1. Kurangnya sarana, prasarana serta SDM penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pertanian;
2. Sulitnya mengubah sikap dan perilaku petani dari pertanian tradisional menuju pertanian modern;
3. Pengelolaan keuangan harus lebih transparan dan akuntabel
4. Terbatasnya jumlah SDM Dinas Pertanian sehingga pelaksanaan kegiatan kurang maksimal.

**Indikator : 2. Persentase Pertumbuhan Produksi  
Peternakan dan Perikanan**

Analisa program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran ini, adalah :

1. Adanya kerjasama antara seluruh stake holder terkait dalam melaksanakan pencegahan pencurian ternak;
2. Perlunya pembinaan secara berkesinambungan terhadap kelompok tani/peternak sehingga dapat meningkatkan animo masyarakat untuk menggeluti usaha dalam bidang peternakan;
3. Pemanfaatan pakan alternative sebagai sumber bahan pakan dan adanya upaya dari seluruh stakeholder dalam menstabilkan harga;
4. Adanya pengadaan ternak yang dapat menstimulasi kelompok tani/ternak untuk beternak;
5. Adanya upaya khusus dalam pelestarian dan peningkatan populasi ternak kuda di Kabupaten Humbang Hasundutan;

6. Tersedianya dana untuk keperluan pelaksanaan inseminasi Buatan (IB) pada ternak besar dan kecil di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Untuk meningkatkan kinerja OPD terkait dalam mewujudkan sasaran ini, untuk masa mendatang perlu penambahan jumlah dan peningkatan SDM aparatur ASN di lingkungan OPD terkait serta perlu melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat. Laju pertumbuhan populasi ternak juga dapat dilihat dari jumlah populasi ternak jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan tahun 2020, yang dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 3.20**  
**Perbandingan Target dan realisasi Populasi**  
**Sub Sektor Peternakan Tahun 2020**

No	Uraian	Peternakan					Pencapaian Target (%)
		Target 2019 (ekor)	Realisasi 2019 (ekor)	Pencapaian Target (%)	Target 2020 (ekor)	Realisasi 2020 (ekor)	
1	Sapi Potong	1.548	1.627	105,10	1.613	1.701	105
2	Kerbau	11.685	11.736	100,45	12.002	12.088	101
3	Babi	40.147	28.272	70,42	40.858	10.619	26
4	Ayam	243.887	231.609	94,96	251.326	225.524	89,73
5	Itik	32.589	28.617	87,81	34.915	27.015	77,37
Jumlah		<b>329.856</b>	<b>301.861</b>	<b>91.51</b>	<b>340.714</b>	<b>276.947</b>	<b>81,28</b>

*Sumber data : Dinas Peternakan Kabupaten Humbang Hasundutan*

Realiasi Indikator/Sasaran Jumlah Populasi Ternak Tahun 2020 sebesar **81,28 %** atau sebesar **276.947** ekor dari Target yang ditetapkan sebesar **340.714** ekor. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa komoditi ternak yang mengalami penurunan produksi yakni :

1. Mewabahnya kasus penyakit African Swine Fever (ASF) yang menyerang ternak babi di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan tingkat kematian ternak yang besar;
2. Tingginya tingkat kematian ternak babi berakibat pada tingginya permintaan konsumsi daging ayam dan itik. Disisi lain masih merebaknya kasus kematian ternak ayam yang disebabkan oleh penyakit New Castel Disease (ND) di beberapa daerah mengakibatkan pertumbuhan populasi ternak ayam buras kurang maksimal;

3. Berkurangnya bantuan ternak bagi masyarakat baik dari APBD kabupaten Humbang Hasundutan, APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBN T.A 2020 yang diakibatkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB);

Adanya pemotongan anggaran untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Inseminasi Buatan (IB) secara khusus untuk pengadaan hormon PGF2 $\alpha$  yang berakibat berkurangnya ternak akseptor. Hormon yang tersedia hanya mampu mencukupi kebutuhan sampai bulan Nopember 2020.

**Solusi yang ditempuh :**

1. Pelaksanaan Pembinaan dan penyuluhan terhadap petani peternak.
2. Aktif menjalin komunikasi dengan Pihak Provinsi dan Pusat untuk dapat memperoleh Bantuan Ternak, Sarana dan Prasarana Peternakan yang bersumber dana dari APBD Provinsi dan APBN.

**BANTUAN DARI PROVINSI DAN PUSAT**

1. Adapun bantuan dari APBN tahun anggaran 2020 adalah:  
bantuan ternak sapi belgian blue sebanyak 5 (lima) ekor ( 4 betina dan 1 jantan)
2. Adapun bantuan dari Provinsi tahun anggaran 2020 adalah :
  - ternak ayam 400 ekor;
  - ternak itik 600 ekor;
  - ternak kerbau 20 ekor;
  - rumah kompos 2 Unit, dan
  - demplot hijauan pakan ternak 2 Unit.

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja. Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target peningkatan produksi hasil peternakan tahun 2020 adalah :



1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan melalui kegiatan :
  - a. Pengadaan Pakan Ternak;
  - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan
  - c. Pembinaan dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Petani Peternak
2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dengan kegiatan :
  - a. Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Hewan/Ternak
  - b. Pengadaan Vaksin, Obat-obatan dan Perbekalan Kesehatan Hewan

Sasaran Meningkatkan Usaha Perikanan

**Tabel 3.21**  
**Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Produksi Sub Sektor Perikanan Tahun 2020**

No	Uraian	Perikanan (ton)		Pencapaian Target (%)
		Target 2020	Produksi 2020	
1	Produksi Tangkap	164,7	100,45	60,98
2	Produksi Budidaya	1.609,6	1.636,91	101,69
<b>Total</b>		<b>1.774,3</b>	<b>1.737,36</b>	<b>97,92</b>

**Tabel 3.22**  
**Tabel Perbandingan Realisasi Produksi Perikanan Tahun 2019 dan Tahun 2020**

No	Uraian	Sat	Realisasi Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Ket
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1.	Produksi Tangkap	Ton	149,7	145,62	97,27	164,7	100,45	60,98	
2.	Produksi Budidaya	Ton	1.483,10	1.477,60	99,63	1.609,6	1.636,91	101,69	
<b>Total</b>			<b>1.632,8</b>	<b>1.623,22</b>	<b>99,41</b>	<b>1.774,3</b>	<b>1.737,36</b>	<b>97,92</b>	

**Tabel 3.23**  
**Tabel Pencapaian Indikator Sasaran sampai dengan tahun 2020 dengan target RPJMD 2021**

No	Indikator Kinerja / Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2021	Persentase Capaian Kinerja
			2019	2020		
1.	Produksi Tangkap	ton	384,2	484,65	488,08	99,29
2.	Produksi Budidaya	ton	3.975,52	5.585,12	7.335,52	76,13
	<b>Total</b>		<b>4.379,2</b>	<b>6.116,56</b>	<b>7.823,6</b>	<b>78,18</b>

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan guna pengembangan sektor perikanan melalui budidaya ikan nila, ikan mas, ikan lele. Realisasi produksi perikanan yang tercapai tahun 2020 adalah untuk produksi tangkap sebesar 60,98 % atau sebesar 100,45 ton dari target 164,7 ton dan untuk produksi budidaya sebesar 101,69% atau sebesar 1.636,91 ton dari target produksi 1.609,6 ton. Pada tahun 2020 produksi perikanan budidaya dapat mencapai target karena :

1. Bertambahnya usaha budidaya kerambah jaring apung;
2. Adanya bantuan budidaya ikan lele kolam terpal baik melalui bantuan maupun swadaya;

Sedangkan untuk produksi perikanan tangkap tahun 2020 tidak mencapai target karena Menurunnya populasi lobster air tawar, ikan kaca-kaca sudah tidak ada lagi dan ikan nilam dan ikan tawes mengalami penurunan produksi;

Solusi yang di tempuh :

1. Restocking perairan umum danau toba;

Dalam rangka peningkatan populasi ikan endemic di perairan danau toba dilaksanakan kegiatan restocking di desa simangulampe kecamatan Baktiraja berupa:

2. Ikan Nila : 9000 ekor
3. Ikan Mas : 5500 ekor
4. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan terhadap kelompok pembudidaya ikan.

5. Pemberian bantuan benih ikan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Humbang Hasundutan dan APBD Provinsi Sumatera Utara.

Adapun program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun ke gagalannya pencapaian kerja bidang perikanan adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan capaian produksi, bidang perikanan telah melaksanakan kegiatan dengan memaksimalkan sumberdaya manusia dan sumberdaya perikanan yang ada;
2. Pentingnya pembinaan dan monitoring secara berkesinambungan terhadap kelompok pembudidaya ikan sehingga dapat meningkatkan animo masyarakat pembudidaya ikan untuk melakukan usaha budidaya ikan;
3. Adanya usaha pengadaan benih ikan dan pembenihan ikan di Balai Benih Ikan yang nantinya dapat disalurkan ke pembudidaya ikan.

Program yang dilaksanakan adalah peningkatan produksi perikanan dengan melaksanakan kegiatan pengembangan budidaya perikanan. Solusi yang ditempuh pada tahun 2021 dalam menghadapi kendala yang terjadi sehingga ketidak tercapainya target dari indikator sasaran ini yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun mendatang, adalah:

- a. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan terhadap petani peternak;
- b. Pemberian Bantuan ternak yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Humbang Hasundutan, APBD Provinsi dan APBN;
- c. Perlunya pembinaan secara berkelanjutan terhadap kelompok ternak sehingga dapat meningkatkan animo masyarakat untuk menggeluti usaha dalam bidang peternakan dengan serius;
- d. Perlu adanya pengadaan ternak yang dapat menstimulasi kelompok ternak untuk beternak;
- e. Pelaksanaan inseminasi buatan pada ternak besar (kerbau dan sapi);
- f. Pengembangan HPT (Hijauan Pakan Ternak) secara swadana;

- g. Pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan ternak.
- h. Selanjutnya, untuk target RPJMD kedepannya akan dilakukan revisi indikator karena target yang telah ditetapkan terlalu tinggi terhadap capaian. Sehingga data yang disajikan terlalu timpang, sehingga akan dilakukan revisi baik dari komoditinya maupun target per tahunnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, pada tabel dibawah ini akan menampilkan analisa pencapaian sasaran meningkatnya produksi bahan pangan utama per indikator sasaran yakni persentase pertumbuhan produksi pertanian dan persentase pertumbuhan produksi peternakan, adalah :

**Tabel. 3.24**  
**Analisa Pencapaian Sasaran 6**  
**Produksi Bahan Pangan Utama**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Ket.
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pertumbuhan produksi pertanian	%	5	30,90	618	5	-4,199	-83,98	
2	Persentase pertumbuhan produksi peternakan dan perikanan	%	3	(-5,43)	-181	3	-8,25	-275	

*Sumber data : Bag.Organisasi diolah*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pada sasaran produksi bahan pangan utama, pada indikator sasaran persentase pertumbuhan produksi pertanian pada tahun 2019 di Kabupaten Humbang Hasundutan sudah mencapai angka yang jauh dari target yakni 30.90% dengan target 5%, sehingga capaian kinerja pada tahun 2019 sudah mencapai angka 618%, sehingga persentase hasil penilaian sudah dikategorikan Sangat Baik. Sedangkan pada tahun 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan menurun dari pencapaian produksi tahun 2019 sehingga target yang telah ditetapkan tidak dapat di capai yaitu -83,98.

Sedangkan pada indikator sasaran persentase pertumbuhan produksi peternakan dan perikanan pada tahun 2019 di Kabupaten Humbang Hasundutan menurun dari target

yang ditetapkan yakni -5,43% dengan target 3%, sehingga capaian kinerja pada tahun 2019 mencapai angka -181%. Sedangkan pada tahun 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan juga juga menurun yakni -8,25% dengan target 3%, sehingga capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai angka -275%. Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.25**  
**Pencapaian Indikator Sasaran 6 Produksi Bahan Pangan Utama Tahun 2020 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2021	PERSENTASE Capaian Kinerja (%)
			2019	2020		
1	2	3	4		5	6
1	Persentase pertumbuhan produksi pertanian	%	30,90	-4,199	26,8	-15,66
2	Persentase pertumbuhan produksi peternakan dan perikanan	%	(-5,43)	-8,25	17	-48,5

*Sumber data : Dinas Pertanian dan peternakan*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pada sasaran produksi bahan pangan utama, pada indikator sasaran persentase pertumbuhan produksi pertanian realisasi akumulasi pada tahun 2019 di Kabupaten Humbang Hasundutan sudah mencapai target yakni 30,90%, Sedangkan pada tahun 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan belum mencapai target yakni -4,199%. Sehingga jika diperbandingkan dengan target akhir RPJMD yakni dengan target 26,8% sudah mencapai capaian kinerja -15,66%.

Sedangkan pada indikator sasaran persentase pertumbuhan produksi peternakan dan perikanan realisasi akumulasi pada tahun 2019 di Kabupaten Humbang Hasundutan belum mencapai target yakni -5,43%, Sedangkan pada tahun 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan capaian kinerja menurun yakni -8,25%. sehingga jika diperbandingkan dengan target akhir RPJMD yakni dengan target 17%, pada indikator sasaran ini masih belum mencapai target , dengan capaian kinerja -48,5%.

### 3.2.7 SASARAN 7 Meningkatnya Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut BPS adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunann, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Produk Dosmetik Regional Bruto (PDRB) merupakan acuan untuk menunjukkan seberapa besar sumbangan suatu sektor terhadap perekonomian suatu daerah. Semakin besar nilai sumbangan nilai suatu sektor dalam PDRB, diperkirakan sektor tersebut dapat berkembang dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi ini kemudian dapat meningkatkan lapangan pekerjaan yang mempu menyerap tenaga kerja.

Dalam upaya peningkatan PDRB, Kabupaten Humbang Hasundutan menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut dengan melibatkan beberapa OPD dalam pelaksanaannya agar terjadinya sinergisitas dalam pelaksanaan sasaran tersebut, diantaranya yaitu Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kopedagin, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Pemuda dan Olahraga. Program yang dimaksud adalah Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Ekspor, Program Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif UKM, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan menurut Lapangan Usaha Tahun 2018sampai dengan 2020, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.26**  
**Laju Perumbuhan PDRB Kabupaten Humbang Hasundutan menurut**  
**Lapangan Usaha tahun 2018 s.d 2020**

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	4,21	3,82	0,36
2	Pertambangan dan Penggalian	6,4	5,23	2,50
3	Industri Pengolahan	4,33	2,7	0,28
4	Pengadaan listrik dan gas	2,21	5,91	4,78
5	Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah da daur ulang	5,00	6,23	-0,40
6	Kontruksi	6,14	5,23	-5,54
7	Perdagangan besar-eceran, reparasi mobil-sepeda motor	6,8	7,22	2,19
8	Transportasi dan pergudangan	5,44	5,39	-1,75
9	Penyediaan akomodasi makan minum	6,57	6,55	2,09
10	Informasi dan komunikasi	5,7	4,23	5,25
11	Jasa keuangan dan Asuransi	5,42	4,14	-1,20
12	Real Estat	7,06	6,23	1,86
13	Jasa Perusahaan	3,5	2,3	-0,73
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	3,65	5,67	-0,11
15	Jasa pendidikan	4,37	4,23	-2,55
16	Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial	5,08	5,23	2,55
17	Jasa Lainnya	7,7	7,23	3,55
	PDRB	5,04	4,94	-0,13

*Sumber Data : BPS*

Sehingga Analisis pencapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 3.27**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 7 Meningkatnya Pertumbuhan PDRB**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	Persentase pertumbuhan PDRB	%	3.80	4,94	130	3,90	-0,13	-3,3	

*Sumber Data : Humbang Hasundutan dalam angka*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, persentase pertumbuhan PDRB di Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2019 adalah 4,94 dengan target 3,80%. Sehingga pencapaian sasaran pada tahun 2019 adalah sebesar 130%. Selanjutnya pada tahun 2020, realisasi pencapaian sasaran ini adalah -0,13 dengan target 3,90 sehingga capaian kinerja tahun 2020 untuk sasaran ini menurun dengan capaian kinerja -3,3%.

Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel . 3.28**  
**Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Tahun 2020 Dibandingkan Target RPJMD Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun		Rencana sesuai dengan RPJMD 2021	PERSENTASE Capaian Kinerja (%)
			2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase pertumbuhan PDRB	%	4,94	-0,13	4	-3,25

*Sumber Data : Humbang Hasundutan dalam angka*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, persentase pertumbuhan PDRB pada tahun 2019 adalah 4,94%, sedangkan pada tahun 2020 adalah -0,13%. Sedangkan target dari akhir RPJMD 2021 adalah 4,00% sehingga persentase capaian untuk sasaran ini jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021 yakni -3,25%.Upaya yang dilakukan untuk mencapai target RPJMD pada tahun 2021 adalah terus mendorong peningkatan produksi pertanian/ perkebunan, perdagangan dan perindustrian sehingga pendapatan petani, pedagang dan pelaku industri meningkat.

### **3.2.8 SASARAN 8 Meningkatnya Kunjungan Wisatawan**

Pariwisata merupakan faktor yang paling penting dalam peningkatan PAD dalam suatu daerah. Karena pariwisata memiliki faktor domino dalam penerapan program dan kegiatannya yang dirasakan oleh masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966).

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan kunjungan wisatawan, diantaranya yaitu :



- a. Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan mengoptimalkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Humbang Hasundutan, Dinas Pariwisata melakukan penyusunan RIPPARKAB (Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten) Humbang Hasundutan. RIPPARKAB ini menjadi acuan bagi pembangunan kepariwisataan daerah dan menjadi salah satu kebijakan yang bersinergi dengan pengembangan sektor lain di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- b. Ditetapkannya Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai *Pilot Project* Pengembangan Homestay dan *Tour Guide* Kawasan Danau Toba;
- c. Didirikannya Kantor Imigrasi Kelas II Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- d. Peningkatan aksesibilitas menuju daya tarik wisata dan sumber daya wisata, ketersediaan fasilitas pariwisata, fasilitas umum (toilet di lokasi objek wisata), dan prasarana umum yang memenuhi kebutuhan wisatawan serta ramah lingkungan.
- e. Melakukan Sosialisasi dan Implementasi CHSE (*Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability*) ;
- f. Melaksanakan pelatihan bagi pemandu wisata seperti pemandu wisata alam-trekking, pelatihan manajemen homestay/pondok wisata/rumah wisata dan Kegiatan tata kelola destinasi Pariwisata;
- g. Pembuatan bahan promosi pariwisata berupa leaflet, booklet, banner, peta objek wisata dan papan himbauan;
- h. Pembuatan Perencanaan dan Konsultan Supervisi (Pengawas) Kegiatan Fisik Tahun 2020. Kegiatan ini terdiri dari pekerjaan Konsultan Pengembangan Fasilitas Dan Sarana Digital Tourism dan Penyusunan 3 (tiga) *Detail Engineering Design* (DED). Kegiatan Konsultan Pengembangan Fasilitas Dan Sarana Digital Tourism di Kabupaten Humbang Hasundutan ini bertujuan mempermudah pelayanan kepada customer dalam bidang pariwisata secara elektronika dan terhubung;

menyediakan informasi kepada pelanggan mengenai Obyek wisata yang tersedia di dalam maupun di luar negeri; mempromosikan budaya Tapanuli (Kabupaten Humbang Hasundutan) secara langsung melalui elektronika; menyediakan kemudahan kepada pelanggan untuk memperoleh layanan pariwisata sesuai dengan kemampuan dana pelanggan tersebut secara elektronika; dan menyediakan kenyamanan kepada pelanggan dalam menggunakan layanan elektronik. Penyusunan 3 (tiga) DED yaitu Pembuatan DED Pergola dan Pagar Pembatas di Sipinsur dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan sarana bangunan dalam hal rancang bangunnya, mutu maupun bentuk dengan memanfaatkan fasilitas yang ada semaksimal mungkin dan pertimbangan untuk mengadakan perubahan-perubahan pada tata guna ruang tata guna lahan dan fasilitas umum yang diperlukan masyarakat/perangkat kerja sehingga fungsi dan pemanfaatan sarana dan prasarana dapat diperbaiki diperbaiki dan ditingkatkan secara optimal; Pembuatan DED Ruang Ganti dan Rest Area di Lokasi Objek Wisata dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan sarana bangunan dalam hal rancang bangunnya, mutu maupun bentuk dengan memanfaatkan fasilitas yang ada semaksimal mungkin dan pertimbangan untuk mengadakan perubahan-perubahan pada tata guna ruang tata guna lahan dan fasilitas umum yang diperlukan masyarakat/perangkat kerja sehingga fungsi dan pemanfaatan sarana dan prasarana dapat dan ditingkatkan secara optimal; dan Pembuatan DED Lampu Taman dan Lampu Penerangan Objek Wisata dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan sarana bangunan dalam hal rancang bangunnya, mutu maupun bentuk dengan memanfaatkan fasilitas yang ada semaksimal mungkin dan pertimbangan untuk mengadakan perubahan-perubahan pada tata guna ruang tata guna lahan dan fasilitas umum yang diperlukan masyarakat/perangkat kerja sehingga fungsi dan

pemanfaatan sarana dan prasarana dapat diperbaiki dan ditingkatkan secara optimal.

- i. Melakukan Pagelaran Seni Budaya di Objek Wisata. Pagelaran dilaksanakan pada sebanyak 20 kali di objek wisata Sipinsur Kecamatan Paranginan dan Kecamatan Baktiraja melalui pagelaran/pementasan seni tari, seni vocal, pragmen dan alat musik tradisional. Sanggar binaan yang turut serta pada kegiatan ini yaitu Sanggar Martabe, Sanggar Tonggi, Sanggar Tari Nalago, AORS, SRO Matiti, Dalloid, Semubaker, Bakkara Toba, Sanggar Tari Desa Simamora, BThree Production, Sanggar Sitakubang dan Sion Parlilitan.
- j. Memfasilitasi kegiatan promosi dan seni budaya di kalangan masyarakat seperti :
  - Live Streaming “Sanggar Seni Martabe” dalam rangka HUT Humbang Hasundutan Ke-17 pada tanggal 29 Juli 2020 di Kompleks GKPI Tanah Lapang Doloksanggul.
  - Penampilan musik dan lagu tradisional “Sanggar Borsak Bersinar” pada tanggal 29 Agustus 2020 di Onan Sibaganding, Desa Nagasaribu V, Kec. Lintongnihuta.
  - Tradisi Budaya Mangan Indahan Siporhis “Komunitas Budaya Bonapasogit Raja Napitu “ pada tanggal 24 Oktober 2020 di Desa Tipang, Kec. Baktiraja.
  - Online Singing Contest Horas Danau Toba pada tanggal 25 Oktober 2020 di Geosite Sipinsur, Kec. Paranginan.
  - Horja Geopark Kaldera Toba oleh “Rumah Karya Indonesia” pada tanggal 19-21 November 2020 di Kecamatan Baktiraja.
  - Peresmian Wisata Alam Seribu Gua pada tanggal 4 Desember 2020 di Desa Banuarea, Kec. Pakkat

Pencapaian sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 3.29**  
**Analisis Capaian Sasaran 8 Meningkatnya Kunjungan Wisatawan**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah wisatawan	Orang	134.908	131.137	97,21	148.399	100.875	67,98	

*Sumber data : buku tamu di lokasi objek wisata*

Pada tahun 2019, Jumlah wisatawan secara keseluruhan adalah 131.137 orang, dengan wisatawan manca negara 450 orang dari 18 negara; wisatawan domestik 130.687 orang. Pada tahun 2020, Jumlah wisatawan secara keseluruhan adalah 100.875 orang. dengan wisatawan manca negara 72 orang dari 9 negara; wisatawan domestik 100.803 orang. Sehingga capaian kinerja pada tahun 2020 sudah mencapai 67.98 %, sehingga persentase hasil penilaian sudah dikategorikan **CUKUP**.

Pencapaian pada Tahun 2020 menurun dibandingkan pada tahun 2019 disebabkan oleh adanya Pandemi Covid 19 serta adanya maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Mak/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan terhadap kebijakan Pemerintah dalam penanganan penyebaran Virus Corona ( Covid 19) pada nomor 2 ayat a menyebutkan " tidak mengadakan kegiatan social kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Surat Pengumuman Nomor: 556/356/Pariwisata/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penutupan Sementara lokasi wisata untuk umum guna pencegahan Virus Corona ( Covid 19) di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pencapaian Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Humbang Hasundutan mencapai 100.875 wisatawan disebabkan Pembukaan lokasi wisata untuk umum di Kabupaten Humbang Hasundutan dengan tetap menerapkan aturan protocol kesehatan sesuai Surat Edaran Bupati Humbang Hasundutan Nomor: 2222/Pariwisata/SE/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pembukaan Kembali Lokasi wisata untuk umum di Kabupaten

Humbang Hasundutan dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan.

Sesuai kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan, untuk menciptakan kepariwisataan yang maju kompetitif dan berkelanjutan melakukan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sadar wisata dan sapta persona seluruh stakeholder pariwisata dan masyarakat dalam rangka menguatkan citra dalam mewujudkan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai daerah tujuan wisata / destinasi unggulan;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata (produk-produk pariwisata) Kabupaten Humbang Hasundutan yang mempunyai daya banding dan saing tinggi/kompetitif serta berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan berbagai upaya pengautan dan perluasan jaringan kerjasama serta meningkatkan kemitraan kepariwisataan dengan stakeholder lainnya yang strategus dan bermanfaat;
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk mendukung daya tarik wisata (DTW) amenities dan aksesibilitas pada kawasan maupun daerah tujuan wisata;
5. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kepariwisataan yang unggul dan profesional;
6. Meningkatkan partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan dalam pembangunan kepariwisataan.

Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki beberapa destinasi unggulan, yakni; Sipinsur, Tombak Sulu-sulu, Istana Sisingamangaraja, Aek Sipangolu, Makam Sisingamangaraja dan Markas raja sisingamangaraja yang merupakan daya tarik wisatawan mancanegara maupun wisatawan Dosmetik untuk mengunjungi tempat wisata tersebut. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat jumlah peningkatan wisatawan di tempat destinasi yang dimaksud dari tahun 2019 sampai tahun 2020, yaitu :

**Tabel 3.30**  
**Data Kunjungan Wisatawan Domestik**  
**Di Kabupaten Humbang Hasundutan**  
**Tahun 2019 dan Tahun 2020**

Tahun	Kecamatan Paranginan	Kecamatan Baktiraja			Kecamatan Parlilitan		Total Kunjungan
	Dtw - Sipinsur	Dtw - Tombak Sulu-Sulu	Dtw - Istana Sisingamangaraja	Dtw - Aek Sipangolu	Dtw - Makam Sisingamangaraja	Dtw - Markas Raja Sisingamangaraja	
<b>2018</b>	<b>100.122</b>	<b>2.367</b>	<b>2.613</b>	<b>2.873</b>	<b>524</b>	<b>14.081</b>	<b>122.580</b>
<b>2019</b>	<b>121.422</b>	<b>1.759</b>	<b>3.073</b>	<b>3.088</b>	<b>990</b>	<b>355</b>	<b>130.687</b>
<b>2020</b>	<b>79.308</b>	<b>3.757</b>	<b>7.933</b>	<b>9.234</b>	<b>181</b>	<b>390</b>	<b>100.803</b>

*Sumber : Buku Tamu Kunjungan Wisatawan diolah oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan*

**Tabel 3.31**  
**Peningkatan Wisatawan Mancanegara Yang mengunjungi**  
**Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 s.d 2020**

NO	NEGARA	2018 (orang)	2019 (orang)	2020 (orang)
1	AUSTRALIA	15	29	2
2	CEKO	1	33	-
3	CZECH	-	1	-
4	INDIA	-	3	4
5	MALAYSIA	11	300	18
6	USA	8	5	5
7	JERMAN	-	3	-
8	MEXICO	-	10	-
9	BELANDA	-	4	4
10	INGGRIS	-	3	-
11	JEPANG	7	21	20
12	SINGAPURA	-	19	-
13	DENMARK	-	2	-
14	POLANDIA	-	4	-
15	CANADA	-	3	-
16	CINA	12	10	15
17	PERANCIS	8	-	-
18	ITALIA	2	-	-
19	BELGIA	-	-	2
20	FILIPINA	-	-	2
<b>TOTAL</b>		<b>64</b>	<b>450</b>	<b>72</b>

*Sumber : Buku Tamu Kunjungan Wisatawan diolah oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Humbang Hasundutan*

Faktor pendukung dalam terjadinya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tahun 2019 ke tahun 2020, adalah:

- a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi di Kabupaten Humbang Hasundutan;
- b. Adanya kemudahan regulasi dari kementerian terkait untuk pengelolaan kawasan hutan sebagai destinasi wisata;
- c. Dari sisi wisata budaya, Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki nilai pariwisata sejarah yang tinggi secara nasional yaitu peninggalan Raja Sisingamangaraja XII berupa kompleks Istana yang terletak di Kecamatan Baktiraja.
- d. Adanya sosialisasi dan implementasi CHSE bagi para pelaku usaha pariwisata dan masyarakat;

Realisasi akumulasi capaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel.3.32**  
**Pencapaian Indikator Sasaran**  
**Meningkatnya Kunjungan Wisatawan**  
**Tahun 2020 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020	Rencana sesuai dengan RPJMD 2021	PERSENTASE Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah wisatawan	Orang	100.875	163.239	61.80

*Sumber : Dinas Pariwisata*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Tahun 2020 dibandingkan target RPJMD Tahun 2021 adalah sebesar 61.80% dengan target akhir RPJMD adalah 163.239 orang, sehingga persentase hasil penilaian sudah dikategorikan **BAIK**.

Namun, jika dilihat dari target tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh :

- a. Belum tersusunnya masterplan sebagian destinasi wisata;
- b. Belum tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah wisata;

- c. Belum ditetapkannya Calender of Event yang berkelanjutan;
- d. Rentang kendali dan jarak yang tergolong berjauhan antar objek wisata sehingga menyulitkan untuk mengkonsentrasikan destinasi secara utuh;
- e. Belum terintegrasinya secara optimal komponen penunjang infrastruktur pariwisata dalam hal keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahtamahan, dan kenangan untuk mewujudkan Kabupaten Humbang Hasudutan sebagai daerah tujuan wisata;
- f. Belum optimalnya kegiatan atraksi seni dan budaya;
- g. Belum optimalnya upaya promosi pariwisata;
- h. Konflik lahan/pengelolaan pada objek wisata. Sebagian besar lokasi wisata yang akan dikembangkan adalah milik masyarakat, tanah ulayat dan hutan lindung;
- i. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk perilaku Sapta Pesona;
- j. Terbatasnya anggaran

Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun mendatang dalam rangka pencapaian target akhir RPJMD tahun 2021 melakukan beberapa program, yaitu:

1. Program Pengembangan Kebudayaan
2. Program Pelestarian dan Pengelolaan cagar Budaya
3. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Peningkatan daya tarik destinasi Pariwisata
5. Program Pemasaran Pariwisata
6. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



### ***Misi Kelima***

### ***Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah***

Peningkatan infrastruktur transportasi yang handal yang terintegrasi dalam pertumbuhan ekonomi adalah merupakan sasaran Kabupaten Humbang Hasundutan yang ditargetkan dalam RPJMD 2016-2021, bahwa target laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 sebesar 6,30-6,60 % tentunya target ini dapat dicapai melalui salah satu langkah yaitu semakin giatnya perbaikan fasilitas infrastruktur.

#### **3.2.9 SASARAN 9 Meningkatnya Infrastruktur Jaringan Jalan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 03/PRT/M/2012 tentang pedoman penetapan fungsi jalan dan status jalan bahwa jaringan jalan adalah kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hieraki.

Dalam upaya peningkatan Infrastruktur jaringan jalan, Kabupaten Humbang Hasundutan menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas PUPR, Dinas PKP, Dinas Perhubungan, dan BPBD. Yang melaksanakan beberapa program, diantaranya yaitu, Program Pembangunan jalan dan jembatan, program peningkatan pelayanan angkutan, program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, program rehabilitasi dan rekonstruksi, program kedaruratan dan logistik, program pembangunan sarana dan prasarana bangunan.

Pada tahun 2020, Kabupaten Humbang Hasundutan untuk indikator sasaran persentase jalan dalam kondisi baik telah melebihi target, hal ini dikarenakan karena :

1. Pada tahun 2020, Peningkatan Jalan dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) ditambah pembayaran 1 (satu) utang jangka pendek sepanjang 3240m ,pengaspalan jalan 46 ruas dan pembayaran utang jangka jangka pendek sebanyak 6 (enam) ruas dengan panjang 17.058 m, pembangunan jembatan 1 unit jembatan

dan pembayaran utang jangka pendek 3 (tiga) paket, terlaksananya perkerasan jalan 7 (tujuh) ruas jalan sepanjang 2050 m dan pembayaran utang jangka pendek 1 (satu) paket, pembangunan TPT sebanyak 12 Paket sepanjang 1660 m untuk memudahkan sarana transportasi dari sektor – sektor produksi menjadi lancar;

- Selanjutnya, ada program rehabilitasi / pemeliharaan jalan jembatan dimana kegiatan ini mempertahankan kondisi jalan yang tidak mantap menjadi mantap ( baik dan sedang );

**Tabel 3.33**  
**Data Jenis Permukaan Jalan Kabupaten**  
**Kabupaten Humbang Hasundutan**

No	Jenis Permukaan		Tahun					Ket.
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Aspal	Km	656,63	672,10	679,05	684,55	664,51	
		%	71,59%	73,28%	74,04%	74,63%	74,50%	
2	Batu	Km	23,94	26,17	28,98	36,32	34,68	
		%	2,61%	2,85%	3,16%	3,96%	3,89%	
3	Kerikil	Km	17,81	17,11	16,71	23,21	21,21	
		%	1,94%	1,87%	1,82%	2,53%	2,38%	
4	Tanah	Km	218,83	201,81	192,46	173,12	171,56	
		%	23,86%	22,00%	20,98%	18,87%	19,23%	
Total		Km	917,20	917,20	917,20	917,20	891,96	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

**Tabel 3.34**  
**Data Kondisi Jalan Kabupaten**  
**Kabupaten Humbang Hasundutan**

No	Kondisi		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Baik	Km	564,01	582,91	592,34	599,03	585,03
		%	61,49%	63,55%	64,58%	65,31%	65,59%
2	Sedang	Km	126,76	117,59	110,21	109,44	106,44
		%	13,82%	12,82%	12,02%	11,93%	11,93%
3	Rusak Ringan	Km	13,89	14,78	15,45	16,58	12,18
		%	1,51%	1,61%	1,68%	1,81%	1,37%

4	Rusak Berat	Km	212,54	201,91	199,2	192,15	188,31
		%	23,17%	22,01%	21,72%	20,95%	21,11%
Total		Km	917,20	917,20	917,20	917,20	891,96
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

**Tabel 3.35**  
**Data Kondisi Jalan Kabupaten Humbang Hasundutan**

No	Kondisi		Tahun					Ket.
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Mantap	Km	690,77	700,50	702,55	708,47	691,47	
		%	75,31%	76,37%	76,60%	77,24%	77,52%	
2	Tidak Mantap	Km	226,43	216,69	214,65	208,73	200,49	
		%	24,69%	23,63%	23,40%	22,76%	22,48%	
Total		Km	917,20	917,20	917,20	917,20	891,96	
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah minimnya penyedia barang dan jasa yang mempunyai kemampuan dasar untuk sebagai dasar keikutsertaan dalam proses pelelangan, sehingga perlu meningkatkan dan memberi pelatihan kepada penyedia barang dan jasa melalui asosiasi tempat mereka bernaung. Selanjutnya, jumlah ASN yang terbatas dalam hal pengawasan pelaksanaan pekerjaan untuk meningkatkan mutu pekerjaan sangat terbatas sehingga perlu penambahan ASN yang handal.

Pada Tahun 2021 untuk meningkatkan jaringan jalan dalam kondisi baik Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memfokuskan pembangunan Infrastruktur jalan Kabupaten dan jalan lingkungan yang menjadi kewenangan Kabupaten. Untuk peningkatan Produksi bahan pangan utama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jaringan irigasi demi ketersediaan irigasi untuk penunjang peningkatan produksi pertanian.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan, pencapaian sasaran meningkatnya infrastruktur jaringan jalan dengan indikator sasaran Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.36**  
**Analisis Capaian Sasaran 9**  
**Meningkatnya Infrastruktur Jaringan Jalan**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020
			Target	realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	70,41	65,31	92,76%	71,16	73,19	102

*Sumber data : Dinas PUPR Kab. Humbang Hasundutan*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada sasaran ini , pada Tahun 2019 adalah 65,31% dengan target 70,41%, sehingga capaian kinerja pada tahun 2019 adalah 92,76%. Sedangkan pada tahun 2020, realisasi dari capaian kinerja adalah 73,19% dengan target 71,16%, sehingga persentase capaian kinerja adalah 102%, dengan nilai interprestasi **SANGAT BAIK**.

Pada tabel dibawah ini menjelaskan perbandingan capaian sasaran dengan target akhir RPJMD 2021, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.37**  
**Capaian Indikator Sasaran**  
**Meningkatnya Infrastruktur Jaringan Jalan**  
**Tahun 2020 dibandingkan Target RPJMD Tahun 2021**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2020	Rencana sesuai dengan RPJMD 2021	PERSENTASE Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik	%	73,19	71.91	101

*Sumber data : Dinas PUPR Kab, Humbang Hasundutan*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase capaian kinerja Tahun 2020 adalah 73,19% dengan target akhir RPJMD 2021 adalah 71,91% , sehingga persentase hasil penilaian dikategorikan **SANGAT BAIK**. Hal ini disebabkan oleh kolaborasi perangkat Daerah yang bersinergi untuk mendukung sasaran ini antara lain Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang dan Dinas Perumahan Permukiman yang dimana pada Dinas PUPR dalam capaian kinerja dalam sasaran OPD yaitu Meningkatnya

infrastruktur jalan yang baik pada tahun 2020 mencapai target 65,75 % dan Dinas Perkim dalam sasaran OPD yaitu Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik mencapai target tahun 2020 yaitu 80,63 %.

## INDIKATOR KINERJA KUNCI GABUNGAN

### 1. Urusan Wajib Pendidikan

1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				Ket	
Outcome	<b>Jumlah anak usia 5–6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD</b>		10.049	92.63 %	Disdik
	<b>Jumlah anak usia 5–6 tahun pada provinsi yang bersangkutan</b>		10.850		
Output	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)		31	Disdik
	2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		0	Disdik
	3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		0	Disdik
	4	Jumlah Kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)		484	Disdik
	5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)		540	Disdik
	6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini		11	Disdik
	7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah		1	Disdik
2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar					
Outcome	<b>Jumlah anak usia 7–12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar</b>		25.326	99.62 %	Disdik
	<b>Jumlah anak usia 7–12 tahun pada provinsi yang bersangkutan</b>		25.422		
Output	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		253	Disdik
	2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		0	Disdik
	3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		0	Disdik
	4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		27.914	Disdik

	5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	14.485	Disdik
	6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	1.482	Disdik
	7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	742	Disdik
	8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.791	Disdik
	9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	955	Disdik
	10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	426	Disdik
	11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	208	Disdik
	12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	336	Disdik
	13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	215	Disdik
	14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	837	Disdik
	15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	508	Disdik
	16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	165	Disdik
	17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	41	Disdik
	18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	65	Disdik
	19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	148	Disdik
<b>3</b>	<b>Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama</b>			
Outcome	<b><i>Jumlah anak usia 13–15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama</i></b>		15.103	97.97 % Disdik
	<b><i>Jumlah anak usia 13–15 tahun pada provinsi yang bersangkutan</i></b>		15.416	
Output	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	253	Disdik
	2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Disdik

	3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Disdik
	4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	27.914	Disdik
	5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	14.485	Disdik
	6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.482	Disdik
	7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	742	Disdik
	8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.791	Disdik
	9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	955	Disdik
	10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	426	Disdik
	11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	208	Disdik
	12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	336	Disdik
	13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	215	Disdik
	14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D -IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	837	Disdik
	15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D -IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	508	Disdik
	16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D -IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	165	Disdik
	17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	41	Disdik
	18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	65	Disdik
	19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	148	Disdik



4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				Ket	
Outcome	<i>Jumlah anak usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan</i>			1	1.58 %	Disdik
	<i>Jumlah anak usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan</i>			63		
Output	1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)			0	Disdik
	2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			0	Disdik
	3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan			0	Disdik
	4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)			48	Disdik
	5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)			28	Disdik
	6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)			23	Disdik
	7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			0	Disdik
	8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1			3	Disdik

2. Urusan Wajib Kesehatan (Dinas Kesehatan Humbang Hasundutan & RSUD Doloksanggul)

1 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan				Ket	
Outcome	<i>Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan</i>		146	0.0725 %	RSUD
	<i>Jumlah Penduduk di kabupaten/kota</i>		201.321		
Output	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		1	RSUD
2 Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi					
Outcome	<i>Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi</i>		1	100 %	RSUD
	<i>Jumlah RS di kabupaten/kota</i>		1		
Output	1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		1	
3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil					
Outcome	<i>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan</i>		2.349	63.06 %	Dinkes
	<i>Jumlah ibu hamil di kabupaten</i>		3.725		
Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		12	Dinkes
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		302	
4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan					
Outcome	<i>Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan</i>		2.754	77.4 %	Dinkes
	<i>Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota</i>		3.556		
Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		12	Dinkes
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar		302	
5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir					
Outcome	<i>Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i>		2.736	76.94 %	Dinkes
	<i>Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota</i>		3.556		

	Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12	Dinkes
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	302	
<b>6</b>	<b>Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar</b>				
	Outcome	<b><i>Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i></b>		10.951	65.17 %
		<b><i>Jumlah balita di kabupaten/kota</i></b>		16.803	
	Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	182	Dinkes
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	450	
<b>7</b>	<b>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</b>				
	Outcome	<b><i>Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</i></b>		13.700	47.99 %
		<b><i>Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota</i></b>		28.548	
	Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	222	Dinkes
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	47	
<b>8</b>	<b>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</b>				
	Outcome	<b><i>Jumlah orang usia 15–59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</i></b>		71.542	67.46 %
		<b><i>Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota</i></b>		106.050	
	Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	182	Dinkes
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standart	194	
<b>9</b>	<b>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</b>				
	Outcome	<b><i>Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</i></b>		21.660	68.3 %
		<b><i>Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota</i></b>		31.721	
	Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	183	Dinkes

		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	194		
<b>10</b>	<b>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</b>					
Outcome	<i>Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>			28.301	61.63 %	Dinkes
	<i>Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota</i>			45.924		
Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			182	Dinkes
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			194	
<b>11</b>	<b>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</b>					
Outcome	<i>Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>			844	69.46 %	Dinkes
	<i>Jumlah penderita DM di kabupaten/kota</i>			1.215		
Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			182	Dinkes
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			194	
<b>12</b>	<b>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</b>					
Outcome	<i>Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>			154	57.5 %	Dinkes
	<i>Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota</i>			268		
Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			182	Dinkes
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			194	
<b>13</b>	<b>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</b>					
Outcome	<i>Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>			387	74 %	Dinkes
	<i>Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota</i>			522		
Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			12	Dinkes
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			12	
<b>14</b>	<b>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</b>					

Outcome	<b><i>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</i></b>		4.059	73.1 %	Dinkes
	<b><i>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota</i></b>		5.547		
Output	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia			Dinkes
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			

### 3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota				Ket
Outcome	<b><i>Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)</i></b>		15.48 Ha	52.15 %	PUPR
	<b><i>Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)</i></b>		29.68 Ha		
Output	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (ha)		29.68 Ha	PUPR
	2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (m)		3.100 m	PUPR
	3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten (ha)		8.25 Ha	PUPR
	4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kabupaten (m)		7.200 m	PUPR
	5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten		332.98 ltr/detik	PUPR
	6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten		399.58 ltr/detik	PUPR
	7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten		450	PUPR
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten				
Outcome	<b><i>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)</i></b>		30.000 m <sup>2</sup>	36.36 %	PUPR
	<b><i>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)</i></b>		82.500 m <sup>2</sup>		
Output	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (ha)		29.68	PUPR
	2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (m)		3.100 m	PUPR
	3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten (ha)		8.25 Ha	PUPR
	4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kabupaten (m)		7.200 m	PUPR
	5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten		332.98	PUPR

				ltr/detik	
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten	399.58 ltr/detik	PUPR
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten	450	PUPR
<b>3</b>	<b>Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi</b>				
	Outcome	<b><i>Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha)</i></b>		13.554 ha	63.70 %
		<b><i>luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota</i></b>		21.279 ha	
	Output	1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	89%	PUPR
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	14 %	PUPR
		3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	100 %	PUPR
<b>4</b>	<b>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota</b>				
	Outcome	<b><i>Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten</i></b>		38.466 RT	79.60 %
		<b><i>Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten</i></b>		48.326 RT	
	Output	1	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten	ada	Bappeda
		2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kabupaten	0	PKP
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM	0	PKP
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	0	PKP
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	0	PKP
<b>5</b>	<b>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</b>				
	Outcome	<b><i>Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan</i></b>		43.409	90 %

		<b>air limbahnya diolah di IPALD</b>				
		<b>Jumlah rumah di Kabupaten</b>		48.326		PKP
Output	1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S			40.392	PKP
	2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T			820	PKP
	3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T			43.409	Lindung
	4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja			52	Lindung
	5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja			Tidak ada	Lindung
	6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic			Tidak ada	Lindung
	7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\Sigma$ rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septi	40.392	84 %	PKP
			$\Sigma$ rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun	48.362		
	8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\Sigma$ rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	19.366	41 %	Lindung
			$\Sigma$ rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/ha	40.392		
	9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\Sigma$ rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	1.143	2.4 %	PKP
			$\Sigma$ rumah di wilayah pengembangan SPALDT	48.362		
	10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\Sigma$ rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat	15.982	79.84 %	PKP
			$\Sigma$ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	20.017		



	11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\Sigma$ jumlah sarana pengangkutan yang tersedia	1	50 %	Lindup
			$\Sigma$ jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota	2		
	12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\Sigma$ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia	Tidak ada	0 %	Lindup
			$\Sigma$ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan	Tidak ada		
	13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\Sigma$ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD	Tidak ada	0 %	PKP
			$\Sigma$ jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota	Tidak ada	0 %	Lindup
	14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\Sigma$ jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot	52	0 %	Lindup
			$\Sigma$ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	Data dinkes		
<b>6</b>	<b>Rasio kepatuhan IMB Kabupaten</b>					
Outcome	<b>Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya</b>		642	100 %	PKP	
	<b>Jumlah IMB yang berlaku</b>		642			
Output	1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi			0	PKP
	2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting			57	PKP
	3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung			100	PKP
	4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung			Belum ada	PKP
	5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan			Belum ada	PKP
	6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi			1 unt	Imigrasi
	7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota			72 unt	PKP
	8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat			72 unt	PKP

<b>7</b>	<b>Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota</b>				
Outcome	<b>Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap</b>		691.47 km	77.52 %	PUPR
	<b>Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten</b>		891.96 km		
Output	1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota		891.96 km	PUPR
	2	Panjang jalan yang dibangun		2.250 m	PUPR
	3	Panjang jembatan yg dibangun		20 m (I Unit)	PUPR
	4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		17.058 m	PUPR
	5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		0	PUPR
	6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		17.058 m	PUPR
	7	Panjang jembatan yang direhabilitasi		0	PUPR
	8	Panjang jalan yang dipelihara		118.9 m3	PUPR
	9	Panjang jembatan yang dipelihara		98.5 m	PUPR
<b>8</b>	<b>Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi</b>				
Outcome	<b>Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis</b>		10	66.66 %	PUPR
	<b>Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten</b>		15		
Output	1	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota		10	PUPR
	2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota		15	PUPR
	3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota		0	PUPR
	4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		0	PUPR
	5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota		0	PUPR

6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak ada	PUPR
7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak ada	PUPR
8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tidak ada	PUPR
9	Tersedianya data dan profil OPD sub -urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Tidak ada	PUPR
10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Tidak ada	PUPR
11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Tidak ada	PUPR
12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Tidak ada	PUPR
13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	PUPR
14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	PUPR
15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	PUPR
16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	PUPR
17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	PUPR
18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Tidak ada	PUPR

		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Tidak ada	PUPR
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Tidak ada	PUPR
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Tidak ada	PUPR
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	PUPR
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	PUPR
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	PUPR
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	PUPR
<b>9</b>	<b>Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi</b>				
	Outcome	<i>Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi</i>		157	100% PUPR
		<i>Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasan</i>		157	

4. Urusan Wajib Perumahan (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan)

1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota				Ket	
Outcome	<b>Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n</b>		0	0 %	PKP
	<b>Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n</b>		0		
Output	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	0	PKP	
	2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	PKP	
	3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	PKP	
	4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	PKP	
	5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	PKP	
	6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	PKP	
	7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	PKP	
	8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	PKP	
	9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	PKP	
2 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota					
Outcome	<b>Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni</b>		0	0 %	PKP
	<b>Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan</b>		0		
Output	1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	PKP	
	2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	PKP	
	3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	PKP	
	4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana	0	PKP	

			pemenuhan SPM					
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		0	PKP		
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah			PKP		
<b>3</b>	<b>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani</b>							
	Outcome	<b>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)</b>			73.33 ha	88.61 %	PKP	
		<b>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha</b>			82.75 ha			
	Output	1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha			82.75 ha	PKP	
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH			237 unt	PKP	
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh			20.64 ha	PKP	
<b>4</b>	<b>Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)</b>							
	Outcome	<b>Jumlah unit rumah tidak layak huni</b>			8.720	18.04 %	PKP	
		<b>Jumlah total unit rumah kabupaten/kota</b>			48.326			
	Output	1	Jumlah rumah di kab/kota			48.326	PKP	
		2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH			6.490	PKP	
		3	Jumlah rumah tidak layak huni			6.246	PKP	
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni			4.246	PKP	
		5	Rasio rumah dan KK	<b>Jumlah KK</b>		52.000	107 %	Capil
						<b>Jumlah total unit rumah</b>		48.326
	6	Jumlah rumah pembangunan baru			0	PKP		
<b>5</b>	<b>Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)</b>							
	Outcome	<b>Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU</b>			244	0.5 %	PKP	
		<b>Jumlah unit rumah kab/kota</b>			48.326			

Output	1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	5 Perumahan	PKP
	2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	244 Unit	PKP
	3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	244 Unit	PKP
	4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	244 Unit	PKP
	5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	PKP
	6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	56 Unit	PKP
	7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	2 Pengembang	PKP
	8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	2 Pengembang	PKP
	9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	4 Pengembang	PKP

## 5. Urusan Wajib Trantibum Linmas

1 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				Ket		
Outcome	<i>Jumlah pengaduan yang ditangani</i>		7	87.5 %	SatPP	
	<i>Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk</i>		8			
Output	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	7		SatPP	
	2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	0		SatPP	
	3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	7		SatPP	
	4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	1		SatPP	
	5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Ada		SatPP	
	6	Tersedianya sarana prasarana minimal	lengkap		SatPP	
2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan						
Outcome	<i>Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan</i>		6	17.2 %	SatPP	
	<i>Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi</i>		35			
3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana						
Outcome	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		48.078		BPBD	
Output	1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	<i>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</i>	1 Dokumen	100 %.	BPBD
			<i>Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan</i>	1 Dokumen		
	2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	<i>Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</i>	48.078	58.2 %	BPBD
			<i>Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</i>	82.470		



<b>4 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>						
Outcome	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			4.244		BPBD
Output	1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	<i>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</i>	Belum Disusun	Suket	BPBD
			<i>Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan</i>	Belum Disusun		
	2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	<i>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</i>	Tidak ada	Suket	BPBD
			<i>Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan</i>	Tidak ada		
	3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	<i>Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan</i>	4.244	5.2 %	BPBD
			<i>Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana</i>	82.470		
	4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	<i>Jumlah warga negara yang ikut pelatihan</i>	4.169	5.1 %	BPBD
			<i>Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</i>	82.470		
	5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	<i>Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops</i>	32.659	40 %	BPBD
			<i>Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</i>	82.470		
	6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	<i>Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan</i>	32.659	40 %	BPBD
			<i>Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</i>	82.470		
Outcome	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			31		BPBD

Output	1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	<i>Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB</i>	25	100 %	BPBD
			<i>Jumlah seluruh penetapan status KLB</i>	0		
	2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	<i>Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana</i>	25	76 %	BPBD
			<i>Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana</i>	33		
	3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	<i>Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana</i>	13	43 %	BPBD
			<i>Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana</i>	30		
	4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	<i>Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi</i>	31	100 %	BPBD
			<i>Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana</i>	31		
<b>6 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>						
Outcome	<i>Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah</i>			59	100 %	SatPP
	<i>Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota</i>			59		
Output	1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota			3	SatPP
	2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan			4	SatPP
	3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan			12 Per pos kecamatan	SatPP

	4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	SatPP
	5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	14	SatPP
	6	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	0	SatPP
	7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	SatPP
	8	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	0	SatPP
<b>7</b>	<b>Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran</b>			
Outcome		Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	10 Menit	SatPP

## 6. Urusan Wajib Sosial

1				Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Ket	
Outcome	<i>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i>			90	15 %	Sosial
	<i>Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis</i>			1.356		
Output	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki			1.429	Dinsos
	2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM			644	Dinsos
	3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk			0	Dinsos
	4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau			3	Dinsos
	5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki			2	Dinsos
	6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi			0	Dinsos
	7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar			0	Dinsos
	8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang			30	Dinsos
	9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu			60	Dinsos
	10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter			0	Dinsos
	11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia			0	Dinsos
	12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan			0	Dinsos
	13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah			0	Dinsos
	14	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan			67	Dinsos

		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	0	Dinsos	
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	0	Dinsos	
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	Dinsos	
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	335	Dinsos	
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	3	Dinsos	
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	3	Dinsos	
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	0	Dinsos	
<b>2</b>	<b>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</b>					
Outcome	<b><i>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran</i></b>			159	Dinsos	
	<b><i>Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota</i></b>			306		52 %
Output	1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan			59	Dinsos
	2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang			32	Dinsos
	3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki			0	Dinsos
	4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan			0	Dinsos
	5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial			0	Dinsos
	6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia			67	Dinsos

## 7. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja					KET	
Outcome	<b>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD</b>			Tidak Ada	0 %	Naker
	<b>jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota</b>			Tidak Ada		
Output	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota			ada	Naker
	2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100%		0	Naker
	3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota			Tidak ada	Naker
2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi						
Outcome	<b>Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi</b>			96 Org	100 %	Naker
	<b>Jumlah tenaga kerja keseluruhan</b>			96 Org		
Output	1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	<b>Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun n</b>	6 Kegiatan	75 %	Naker
			<b>keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n</b>	8 Kegiatan		Naker
	2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	<b>Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n</b>	10 Org	100 %	Naker
			<b>jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n</b>	10 Org		
	3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	<b>Jumlah instruktur pd tahun n</b>	10	10 %	Naker
			<b>jumlah peserta pelatihan pada tahun n</b>	96		
	4	Persentase LPK yang terakreditasi	<b>Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun</b>	8 LPK	100 %	Naker

			<i>n</i>			
			<i>jmlh seluruh LPK pada tahun n</i>	8 LPK		
	5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	<i>Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n</i>	8 LPK	100 %	Naker
			<i>jumlah LPK yang terdata pada tahun n</i>	8 LPK		
	6	Jumlah penganggur yang dilatih			96 org	
	7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	<i>Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n</i>	96 Org	100 %	Naker
			<i>Jumlah orang yang dilatih pada tahun n</i>	96 Org		
	8	Persentase penyerapan lulusan	<i>Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n</i>	96 Org	100 %	Naker
			<i>jumlah lulusan pada tahun n</i>	96 Org		
	9	Lulusan bersertifikat kompetensi	<i>Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n</i>	96 Org	100 %	Naker
			<i>jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n</i>	96 Org		
	10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	$\Sigma$ CPMI dilatih	Tidak ada	0 %	Naker
			$\Sigma$ CPMI terdaftar	Tida ada		
	11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)			0	Naker
<b>3</b>	<b>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>					
Outcome		<i>PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)</i>		4.135.600.000	1.479.642.22	BPS
		<i>jumlah tenaga kerja</i>		2.795 Org		Naker
Output	1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	<i>Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas tahun n</i>	213 Badan Usaha	63 %	Naker

			<b>jumlah perusahaan pada tahun n</b>	338 Badan Usaha		
	2	Data tingkat produktivitas total	<i>Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja)</i>	BPS	0	BPS
<b>4</b>	<b>Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)</b>					
Outcome	<b>Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak</b>			213	63 %	Naker
	<b>Jumlah perusahaan</b>			338		
Output	1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	<b>Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n</b>	4	13 %	Naker
			<b>Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih</b>	40		
	2	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	<b>Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n</b>	Tidak ada	0 %	Naker
			<b>Jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB</b>	Tidak ada		
	3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan			5	Naker
	4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	<b>Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah</b>	213	473 %	Naker
			<b>jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB)</b>	40		
	5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	<b>Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan</b>	213	63.01 %	Naker
			<b>jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor</b>	338		



	6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	<b>Jumlah perusahaan yang berselisih</b>	Tidak ada	0 %	Naker	
			<b>jumlah perusahaan pada tahun n</b>	Tidak ada			
	7	Jumlah mogok kerja			0	Naker	
	8	Jumlah penutupan perusahaan			0	Naker	
	9	Jumlah perselisihan kepentingan			0	Naker	
	10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan			0	Naker	
	11	Jumlah perselisihan PHK			1	Naker	
	12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK			1	Naker	
	13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite			0	Naker	
	14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan			0	Naker	
	15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	<b>Jumlah Perjanjian Bersama</b>	0	0 %	Naker	
			<b>Jumlah kasus perselisihan</b>	0			
	<b>5</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota</b>					
	Outcome	<b>Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan</b>			275	100 %	Naker
		<b>Jumlah pencaker yang terdaftar</b>			275		
Output	1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota			0	Naker	
	2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota			275	Naker	
	3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota			0	Naker	
	4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota			0	Naker	
	5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja			0	Naker	
	6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota			0	Naker	
	7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota			0	Naker	

8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		0	Naker
9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\Sigma$ CPM/CTKI yang mendapatkan sosialisasi	0	0 % Naker
		$\Sigma$ CPMI/CTKI	0	
10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		0	Naker
11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\Sigma$ fasilitasi PMI yang dipulangkan	0	0 % Naker
		$\Sigma$ PMI yang pulang	0	
12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\Sigma$ PMI TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	0 % Naker
		$\Sigma$ PMI/TKI	0	
13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\Sigma$ PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan	0	0 % Naker
		$\Sigma$ PMI/TKI purna dan keluarganya	0	
14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\Sigma$ LTSA yang terbentuk	0	0 % Naker
		Jumlah daerah kantong PMI/TKI	0	

## 8. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PMDP2A)

1				Persentase ARG pada belanja langsung APBD		Ket	
Outcome	<i>Jumlah ARG pada belanja langsung APBD</i>		Refocusing	0 %	PMDP2A		
	<i>Jumlah seluruh belanja langsung di APBD</i>		Refocusing				
Output	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		0	PMDP2A		
	2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota		0			
2				Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota			
Outcome	<i>Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi</i>		6	0.0079 %	PMDP2A		
	<i>Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)</i>		75.046				
Output	1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		0	PMDP2A		
	2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		1	PMDP2A		
	3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani		<i>jumlah korban kekerasan anak yang dilayani</i>	6	100 %	PMDP2A
				<i>jumlah korban kekerasan anak di tingkat Kabupaten</i>	6		
	4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		0	PMDP2A		
5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)		0	PMDP2A			
3				Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)			
Outcome	<i>Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan</i>		5	0.0049 %	PMDP2A		
	<i>Jumlah penduduk perempuan</i>		100.101				
Output	1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan		1	SADA AHMO		
	2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih		0	PMDP2A		

		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		0	PMDP2A
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		1	PMDP2A
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		0	PMDP2A
		6	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi		0	PMDP2A
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	<b>Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan</b>	11	100 % PMDP2A
				<b>jumlah korban kekerasan terhadap perempuan</b>	11	

## 9. Urusan Wajib Pangan

1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)				Ket
Outcome		<b>Jumlah cadangan pangan</b>	170.330 ton	685.3 %	Ketapang
		<b>Jumlah kebutuhan pangan</b>	24.855 ton		
Output	1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan		1	Ketapang
	2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya		0	Ketapang
	3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal		0	Ketapang
	4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang		0	Ketapang
	5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan		0	Ketapang
	6	Tertanganinya kerawanan pangan		0	Ketapang
	7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan		0	Ketapang
	8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar		0	Ketapang

## 10. Urusan Wajib Pertanahan

1 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan					Ket	
Outcome	<b>Luas tanah sesuai peruntukkan ijin lokasi</b>			10 ha	100 %	Data Izin yg diterbitkan
	<b>Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi</b>			10 ha		
Output	1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati	<b>Jumlah izin lokasi yang diterbitkan+ jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)</b>	1	100 %	Data Izin yg diterbitkan
			<b>Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun</b>	1		
	2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	<b>Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan makimum absente</b>	Tidak ada	100 %	Data Izin yg diterbitkan
			<b>Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform</b>	Tidak ada		
	3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	<b>Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absentee</b>	Tidak ada	100 %	Data Izin yg diterbitkan
			<b>Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subye</b>	Tidak ada		
	4	Dokumen Izin membuka tanah	<b>Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui+jumlah Izin Membuka Tanah yang ditolak</b>	Tidak ada	100 %	Data Izin yg diterbitkan
			<b>Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun</b>	Tidak ada		
	5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	<b>Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik</b>	Tidak ada	100 %	Data Izin yg diterbitkan
			<b>Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun</b>	Tidak ada		

<b>2</b>	<b>Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum</b>			
Outcome	<i>Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum</i>	7	100 %	Data Izin yg diterbitkan
	<i>Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum</i>	7		
<b>3</b>	<b>Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal</b>			
Outcome	<i>Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi</i>	250.300	44.60 %	PKP
	<i>Luas izin lokasi yang diterbitkan</i>	561.14		
<b>4</b>	<b>Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee</b>			
Outcome	<i>Jumlah penerima tanah obyek landreform dngan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha</i>	Tidak ada	100 %	PKP
	<i>Jumlah penerima tanah obyek landreform</i>	Tidak ada		
<b>5</b>	<b>Tersedianya tanah untuk masyarakat</b>			
Outcome	<i>Luas tanah yang telah dimanfatatkan berdasarkan izin membuka tanah</i>	Tidak ada	100 %	Data Izin yg diterbitkan
	<i>Luas izin membuka tanah yang diterbitkan</i>	Tidak ada	100 %	
<b>6</b>	<b>Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi</b>			
Outcome	<i>Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani</i>	Tidak ada	100 %	Data Izin yg diterbitkan
	<i>Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan</i>	Tidak ada	100 %	

## 11. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi				Ket	
Outcome	IKLH Kabupaten = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%) IKA = Indeks Kualitas Air IKD = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan		80+85.68+64.51	75.51 %	Lindung
Output	1	Hasiil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks Kualitas Air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)		80 85.68 64.51	Lindung
2 Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota					
Outcome	<b>Total volume sampah yang dapat ditangani</b>		12.650.381	60.75 %	Lindung
	<b>total volume timbunan sampah kabupaten</b>		20.825.367		
Output	1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	<b>Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah</b>	1 TPA	Lindung
			<b>Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah</b>	1 TPST	Lindung
			<b>Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan</b> 1 PDU, 1 Bank Sampah, 7 Truk sampah, 2 Truk Armroll, 19 Motor sampah roda 3 10 Counteiner sampah 1 mobil tinja 1 mobil tangki air	42 Unit	Lindung
3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota					
Outcome	<b>Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan,dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kabupaten</b>		0	100 %	Lindung
	<b>usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan</b>		10		



Output	1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	<i>Izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten</i>	10	91 %	Lindung
			<i>jumlah usulan permohonan yang teregrasi</i>	11		
	2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	<i>Jumlah PPLHD yang ada</i>	Tidak ada	0 %	Lindung
			<i>jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten</i>	3		
	3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten	<i>Jmlh MHA yg diakui</i>	1	33.3 %	Lindung
			<i>jmlh usulan MHA</i>	3		
	4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	<i>Jmlh MHA yg mendapatkan pelatihan</i>	0	0 %	Lindung
			<i>jmlh MHA yg ada</i>	0		
	5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	<i>jmlh lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat/rencana</i>	0	0 %	Lindung
			<i>target lembaga kemasyarakatan yg akan diberikan diklat</i>	0		
	6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	<i>Pengaduan masyarakat yg ditangani</i>	1	100 %	Bag. Hukum
			<i>total jumlah pengaduan masyarakat yang teregristrasi (Bagian Hukum)</i>	1		

## 12. Urusan Wajib Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil

1	Perekaman KTP Elektronik					Ket
Outcome	<i>jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP</i>			126.662	96.88 %	Dukcapil
	<i>Jumlah penduduk 17 tahun ke atas</i>			130.747		
Output	1	Penerbitan akta perkawinan	<i>Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan</i>	2.057	98.88 %	Dukcapil
			<i>Peristiwa perkawinan yang dilaporkan</i>	2.081		
Output	2	Penerbitan akta perceraian	<i>Jumlah akta perceraian yang diterbitkan</i>	25	83.33 %	Dukcapil
			<i>Peristiwa perceraian yang dilaporkan</i>	30		
Output	3	Penerbitan Akta Kematian	<i>Jumlah akta kematian yang diterbitkan</i>	1.277	98.22 %	Dukcapil
			<i>Peristiwa kematian yang dilaporkan</i>	1.300		
Output	4	Penyajian Data Kependudukan	<i>Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten kota dalam satu tahun</i>	81.563	40.78 %	Dukcapil
			<i>2 tahun</i>	156.214		
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA					
Outcome	<i>Jumlah anak usia 0–17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA</i>			18.919	27.60 %	Dukcapil
	<i>Jumlah anak usia 0–17 tahun</i>			72.090		
3	Kepemilikan akta kelahiran					
Outcome	<i>jumlah anak usia 0–18 tahun yang sudah memiliki akta lahir</i>			51.088	67.87 %	Dukcapil
	<i>Jumlah anak usia 0–18 tahun</i>			75.272		
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama					
Outcome	<i>Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama</i>			12	34.28 %	Dukcapil
	<i>Jumlah OPD</i>			35		

### 13. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 Persentase Pengembangan Desa Tertinggal					Ket	
Outcome	Jumlah desa tertinggal yang memiliki kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun			66	91 %	PMDP2A
	Jumlah desa tertinggal (per awal tahun - n)			72		
Output	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa			29	PMDP2A
	2	Jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun sebelumnya			124	PMDP2A
	3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan			369	PMDP2A
	4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			53	PMDP2A
2 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri						
Outcome	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun			81	100 %	PMDP2A
	Jumlah desa berkembang (per awal tahun - n)			75		
Output	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa			0	PMDP2A
	2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya			124	PMDP2A
	3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan			369	PMDP2A
	4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			53	PMDP2A

14. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1 TFR (Angka Kelahiran Total)				Ket		
Outcome	$TFR \equiv 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i \quad ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total                      ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur                      bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu                      pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama                      I = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok Umur 45-49                      k = Bilangan Konstanta biasanya 1000</p>		5 (3,18 + 61,59 + 155,10 + 162,98 + 103,96 + 29,61 + 6,45) 2614,3 per 1000 wanita usia 15-49 thn	2.61 %	P2KB	
Output	1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di Perda kan		Ada	Perbup	
	2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun		23.65	P2KB	
	3	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ <p>ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun</p>	3.18	P2KB	
	4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	<i>Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)</i>	6.240 Orang (1.560 x 4 Orang)	39.65%	P2KB
			<i>Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)</i>	15.739 Orang		
5	Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program KKBPK		28	P2KB		

2		Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR))					
Outcome	Jumlah peserta KB aktif modern			18.215	67.5 %	P2KB	
	Jumlah pasangan usia subur			26.982			
Output	1	Persentase fasilitasi kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	<i>Jumlah Faskes yang siap melayani KB MKJP</i>	21	84 %	P2KB	
			<i>Jumlah Faskes</i>	25			
	2	Persentase peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	<i>Jumlah peserta KB Aktif</i>	10.054	55.2 %	P2KB	
			<i>Jumlah PUS</i>	18.215			
	3	Pemerintah daerah kabupaten yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif		13	P2KB	
	4	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	<i>Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern</i>	623	22.5 %	P2KB	
			<i>Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan</i>	2.763			
	3		Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need)				
Outcome	Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani			5.050	18.7 %	P2KB	
	Jumlah Pasangan Usia Subur			26.982			
Output	1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		1.504	8.24 %	P2KB	
				18.200			
	2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	<i>Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI</i>	2.652	32.7 %	P2KB	
			<i>Jumlah keluarga PBI</i>	8.093			

## 15. Urusan Wajib Perhubungan

1 Rasio Konektivitas Kabupaten					Ket	
Outcome	<p><b>Rasio Konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</b></p> <p><b>1. Rasio Konektivitas Kabupaten :</b></p> <p>(IK1 x bobot angkutan jalan)+ ( IK2 x bobot angkutan sungai,danau)</p> <p>* IK1 = Jumlah trayek yang perintis ditambah trayek AKAP</p> <p>Jumlah trayek perintis 7 dan trayek AKAP 2</p> <p>* bobot angkutan jalan = wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan ( bobot SDP = 70.</p> <p>* IK2 = Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi 3</p> <p>* bobot angkutan sungai,danau = wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan ( bobot SDP = 70.</p> <p>Jadi Rasio Konektivitas Kabupaten = ( 9 x 70 ) + ( 3 x 70) = 780</p> <p>Persentase = 780/100 = 78 %</p>			780	7.8 %	Dishub
Output	1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan Tipe C	<i>Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia</i>	1	100 %	Dishub
			<i>Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan angkutan jalan</i>	1		
	2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	<i>Jumlah kendaraan yang diuji per tahun</i>	0	0 %	Dishub
			<i>Jumlah kendaraan wajib uji</i>	1.124		
	3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam	<i>Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan</i>	0	0 %	Dishub

		Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	<b>Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten</b>	3		
	4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	<b>Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota</b>	1.162	27 %	Dishub
			<b>Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota</b>	4.340		
<b>2</b>	<b>V/C Ratio di Jalan Kabupaten</b>					
Outcome	V/C Ratio di Jalan Kabupaten					
	<p><b>a. Kapasitas Jalan</b></p> <p>Faktor yang mempengaruhi kapasitas jalan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebar jalur atau Lajur</li> <li>Untuk jalan Kabupaten lebar jalur jalan 3 s.d 4,5 m</li> <li>- Median/pemisah jalan</li> <li>Untuk pemisah jalan hanya ada dipusat kota dengan menggunakan pulo-pulo jalan dan marka jalan.</li> <li>- Hambatan bahu/kerb jalan</li> <li>Lebar bahu jalan sangat mempengaruhi kapasitas pengguna jalan, karena bahu jalan bisa digunakan untuk parkir.</li> </ul> <p><b>b. Tipe Jalan</b></p> <p>Jalan yang ada di Kabupaten Humbang semuanya dua jalur</p>			20/116.64	17.2	Dishub
Output	1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten	<b>Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten</b>	1.162	27 %	Dishub
			<b>Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten</b>	4.340		

## 16. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo					Ket	
Outcome	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			30 OPD	100 %	Kominfo
	Jumlah OPD			30 OPD		
Output	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	<i>Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo</i>	30 OPD	100 %	Kominfo
			<i>Jumlah Perangkat Daerah</i>	30 OPD		
	2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	<i>Jumlah perangkat daerah yang menggunakan internet yang berkualitas yang disediakan oleh Dinas Kominfo</i>	30 OPD	100 %	Kominfo
			<i>Jumlah Perangkat Daerah</i>	30 OPD		
	3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah			Ada	Kominfo
	2 Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi					
Outcome	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi			16	100 %	Kominfo
	Jumlah layanan publik			16		
Output	1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	<i>Jlh kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemda yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No. 5/2015</i>	11	100 %	Kominfo
			<i>Jlh kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah</i>	11		
	2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	<i>Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar</i>	30 OPD	100 %	Kominfo



			<i>Jumlah perangkat daerah</i>	30 OPD		
	3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	<i>Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</i>	30 OPD	100 %	Kominfo
			<i>Jumlah perangkat daerah</i>	30 OPD		
	4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	<i>Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik</i>	4	100 %	Kominfo
			<i>Jumlah layanan</i>	4		
	5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	<i>Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik</i>	2	6 %	Kominfo
			<i>Jumlah layanan</i>	30		
	6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	<i>Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</i>	0	0 %	Kominfo
			<i>Jumlah sistem elektronik</i>	0		
	7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	<i>Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah</i>	0	0 %	Kominfo
			<i>Jumlah layanan publik dan layanan administrasi</i>	0		
	8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	<i>Jumlah OPD yang menggunakan layanan pusat data pemerintah</i>	11 OPD	34 %	Kominfo
			<i>Jumlah perangkat daerah</i>	30 OPD		
	9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	<i>Jumlah PD yang menyimpan data di pusat data pemerintah</i>	11 OPD	34 %	Kominfo
			<i>Jumlah perangkat daerah</i>	30 OPD		
	10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra	<i>Jumlah PD yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya</i>	11 OPD	34 %	Kominfo

		kominfo)	<i>Jumlah perangkat daerah</i>	30 OPD		
	11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	<i>Jumlah data yang dapat berbagi pakai</i>	0	0 %	Kominfo
			<i>Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah</i>	0		
	12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	<i>Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city</i>	18 OPD	60 %	Kominfo
			<i>Jumlah perangkat daerah</i>	30 OPD		
	13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	<i>Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo</i>	0	0 %	Kominfo
			<i>Jumlah ASN pengelola TIK</i>	24 Orang		
	14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government			Tdk ada	Kominfo
<b>3</b>	<b>Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten</b>					
Outcome	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Kabupaten			85.852	45.14 %	Kominfo
	Jumlah penduduk			190.186		
Output	1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	<i>Komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemda Provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah</i>	89	100 %	Kominfo
			<i>Komunitas masyarakat atau mitra komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten</i>	89		
	2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	<i>Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (Strakom)</i>	524	62.60 %	Kominfo
			<i>Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten</i>	837		
	3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	<i>Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (Strakom) dan SOP</i>	524	62.60 %	Kominfo
			<i>Diseminasi dan layanan informasi publik</i>	837		

17. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1 Meningkatkan koperasi yang berkualitas						Ket
Outcome	<i>Jumlah kopeasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset</i>			99	63.78 %	Kopedagin
	<i>Jumlah seluruh koperasi</i>			155		
Output	1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan</i>	3	33.33 %	Kopedagin
			<i>Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai ijin usaha simpan pinjam</i>	9		
	2	Persentase fasilitasi penerbitan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah penerbitan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan</i>	0	0 %	Kopedagin
			<i>Jumlah permohonan ijin pembukana kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan</i>	0		
	3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi</i>	99	63.87 %	Kopedagin
			<i>Jumlah koperasi yang ada</i>	155		
	4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya</i>	10	83.33 %	Kopedagin
			<i>Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada</i>	12		
	5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	5	3.23 %	Kopedagin
			<i>Jumlah koperasi yang ada</i>	155		
	6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoeprasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian</i>	8	0.01 %	Kopedagin
			<i>Jumlah anggota koperasi yang ada</i>	40.856		

	7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah koperasi yang telah menyelenggaraakn pendidikan dan pelatihan</i>	7	4.52 %	Kopedagin
			<i>Jumlah koperasi yang ada</i>	155		
	8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		Tidak ada		Kopedagin
	9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat nomor induk koperasinya</i>	14	9.03 %	Kopedagin
			<i>Jumlah koperasi yang ada</i>	155		
	10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan</i>	0	0 %	Kopedagin
			<i>Jumlah koperasi yang ada</i>	155		
	11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran</i>	3	1.94 %	Kopedagin
			<i>Jumlah koperasi yang ada</i>	155		
	12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha</i>	4	2.58 %	Kopedagin
			<i>Jumlah koperasi yang ada</i>	155		
	13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah kabupaten	<i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan</i>	3	1.93 %	Kopedagin
			<i>Jumlah koperasi yang ada</i>	155		
	<b>2</b>	<b>Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha</b>				
Outcome	<i>Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha</i>			705	56.99 %	Kopedagin
	<i>Jumlah usaha kecil keseluruhan</i>			1.237		
Output	1	rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	<i>Jumlah pertumbuhan wirausaha baru</i>	16	1.29 %	Kopedagin
			<i>Jumlah wirausaha yang ada</i>	1.237		
	2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam	<i>Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem</i>	Tidak Ada	0 %	Kopedagin

		sistem online data system (ODS)	<i>data online (ODS)</i>			
			<i>Jumlah usaha mikro yang ada</i>	Tidak Ada		
	3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	<i>Jumlah usaha mikro yang bermitra</i>	1	0.08 %	Kopedagin
			<i>Jumlah usaha kecil yang ada</i>	1.237		
	4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi</i>	8	0.65 %	Kopedagin
			<i>Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk</i>	1.229		
	5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran</i>	21	1.70 %	Kopedagin
			<i>Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran</i>	1.229		
	6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan</i>	12	0.97 %	Kopedagin
			<i>Jumlah usaha mikro yang ada</i>	1.237		
	7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan Melalui Lembaga Pendampingan	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha</i>	0	0 %	Kopedagin
			<i>Jumlah usaha mikro yang ada</i>	1.237		

18. Urusan Wajib Penanaman Modal

1 Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten					Ket	
Outcome	(Jumlah investasi tahun n – jumlah investasi tahun n-1) di Kabupaten			954.044.717.500.00	9.49 %	DPMP2TSP
	jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten			90.955.058.736.00		
Output	1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten	<i>Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor</i>	0	DPMP2TSP	
	2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	<i>Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal (ada/tidak)</i>	0	DPMP2TSP	
	3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	<i>Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun</i>	0	DPMP2TSP	
	4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	<i>Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting</i>	0	DPMP2TSP	
	5	Kegiatan pameran penanaman modal	<i>Jumlah kegiatan pameran penanaman modal</i>	0	DPMP2TSP	
	6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	<i>Jumlah Kegiatan penerimaan misi penanaman modal</i>	0	DPMP2TSP	
	7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	<i>Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal</i>	402 Pemohon	DPMP2TSP	
	8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	<i>Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan</i>	316	DPMP2TSP	
	9	Laporan realisasi penanaman modal	<i>Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten</i>	3,780,092,844 ,944.00	DPMP2TSP	
	10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	<i>Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal</i>	2 Orang	DPMP2TSP	
	11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	<i>Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal</i>	92	DPMP2TSP	
	12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	<i>Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/jumlah permintaan data dan informasi yang diterima</i>	19/23 82%	DPMP2TSP	

## 19. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

1 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri				Ket	
Outcome	<i>Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten</i>		274	0,6 %	PORA
	<i>Jumlah pemuda (16-30 tahun) di Kabupaten</i>		43.362		
Output	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		0	PORA
	2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		0	
2 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan					
Outcome	<i>Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten</i>		2.150	4,9 %	PORA
	<i>Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kabupaten</i>		43.362		
Output	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		0	PORA
	2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		0	
3 Peningkatan Prestasi Olahraga					
Outcome	<i>Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional</i>			0	PORA
Output	1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan		14	PORA
	2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		0	



## 20. Urusan Wajib Statistik

1					Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah					Ket
Outcome	<i>Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</i>				30 OPD	100 %	Koinfo			
	<i>Jumlah OPD</i>				30 OPD					
Output	1	Tersedianya buku profil daerah					tidak	Koinfo		
	2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan					tidak	Koinfo		
	3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan					2	Koinfo		
	4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS					2	Koinfo		
	5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS					tidak	Koinfo		
	6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	<i>Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral</i>			1	100 %	Koinfo		
			<i>Jumlah kegiatan statistik sektoral</i>			1				
7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	<i>Jumlah metadata indikator statistik sektoral</i>			2	100 %	Koinfo			
		<i>Jumlah indikator statistik sektoral</i>			2					
2					Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah					
Outcome	<i>Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah</i>				30 OPD	100 %	Koinfo			
	<i>Jumlah OPD</i>				30 OPD					



## 21. Urusan Wajib Persandian

1 Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah					Ket	
Outcome	<i>Jumlah nilai area per keamanan informasi</i>			1 Wilayah	100 %	Koinfo
	<i>Jumlah area penilaian</i>			1 Wilayah		
Output	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	<i>Jumlah kegiatan strategis teramankan</i>	1 Kegiatan	100 %	Koinfo
			<i>Jumlah kegiatan strategis yang ada</i>	1 Kegiatan		
	2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	<i>Jumlah SE yang menerapkan SMK 1 dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian</i>	1 Sertifikat Elektronik	100 %	Koinfo
			<i>Jumlah SE yang ada</i>	1 Sertifikat Elektronik		
	3	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	<i>Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah</i>	1 Sertifikat Elektronik	100 %	Koinfo
			<i>Jumlah SE yang ada</i>	1 Sertifikat Elektronik		
	4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	<i>Jumlah titik teramankan</i>	30 OPD	100 %	Koinfo
			<i>Jumlah titik pada PHKS</i>	30 OPD		

## 22. Urusan Wajib Kebudayaan

1 Terlestarikannya Cagar Budaya				Ket		
Outcome	<i>Jumlah cagar budaya yang dilestarikan</i>			17	34 %	Dispar
	<i>Jumlah cagar budaya yang terdata</i>			50		
Output	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	<i>Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)</i>	17	Dispar	
	2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	<i>Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)</i>	17	Dispar	
	3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	<i>Jumlah objek dimanfaatkan</i>	17	Dispar	
	4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	<i>Jumlah SDM ditingkatkan kompetensi + Jumlah SDM disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola</i>	0	Dispar	
	5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	<i>Jumlah CB ditetapkan - Jumlah CB dihapuskan</i>	0	Dispar	
	6	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	<i>Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar</i>	0	Dispar	
	7	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	<i>Jumlah CB diberikan izin ke luar provinsi</i>	0	Dispar	
	8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	<i>Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)</i>	0	Dispar	
	9	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	<i>Jumlah CB dimanfaatkan</i>	0	Dispar	
	10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	<i>Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)</i>	0	Dispar	

	11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	<i>Jumlah pengunjung museum</i>	0	Dispar
	12	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		0	Dispar
	13	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	<i>Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan museum</i>	0	Dispar
	14	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		0	Dispar
	15	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	<i>Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk</i>	0	Dispar
	16	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten	<i>Jumlah pembentukan tim ahli CB</i>	0	Dispar
	17	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	<i>Jumlah ahli CB yang disertifikasi</i>	0	Dispar
	18	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	<i>Jumlah sdm CB + Jumlah sdm Museum</i>	0	Dispar
	19	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	<i>Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)</i>	0	Dispar
	20	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	<i>Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)</i>	0	Dispar
	21	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	<i>Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat</i>	0	Dispar

### 23. Urusan Wajib Perpustakaan

1 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat						Ket
Outcome	<i>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat</i>			0	0	Perpusip
Output	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	<i>Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)</i>	7.040	4 %	Perpusip
			<i>Jumlah penduduk di wilayahnya</i>	177.140		
	2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	<i>Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite</i>	2.935	1.7 %	Perpusip
			<i>Jumlah penduduk di wilayahnya</i>	177.140		
	3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	<i>Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya</i>	65	0.03 %	Perpusip
			<i>Jumlah penduduk di wilayahnya</i>	177.140		
	4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	<i>Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan</i>	40	20.30 %	Perpusip
			<i>Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya</i>	197		
	5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat			0	Perpusip
	2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat					
Outcome	<i>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)</i>					
	UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan			Belum dilaksanakan	0 %	Perpusip

		UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan  Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\sum \frac{\square\square\square\square}{\square\square\square} \times 100$			
Output	1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Perpusip	
	2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Perpusip	
	3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0	Perpusip	

## 24. Urusan Wajib Kearsipan

1 Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan 59 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)						Ket
Outcome	$T = (a + I + s + j) / 4$ <p>T = Tingkat ketersediaan arsip            a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip            i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip            s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik            j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p>				41.675	Perpusip
Output	1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	<i>Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</i>	200	66.70 %	Perpusip
			<i>Jumlah seluruh arsip aktif</i>	300		
	2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	<i>Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip</i>	800	66.70 %	Perpusip
			<i>Jumlah seluruh arsip inaktif</i>	1200		
	3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	<i>Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik</i>	50	33.30 %	Perpusip
			<i>Jumlah seluruh arsip statis</i>	150		
	4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	<i>Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</i>	0	0 %	Perpusip
			<i>Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi</i>	1500		
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat					Perpusip
Outcome	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$				55%	Perpusip

		<p>T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban</p> <p>m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK</p> <p>b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK</p> <p>g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK</p> <p>a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK</p> <p>c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK</p> <p>I = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>			
Output	1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	Perpusip	
	2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	70	Perpusip	
	3	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	80	Perpusip	
	4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	50	Perpusip	
	5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	50	Perpusip	
	6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	80	Perpusip	

## 25. Urusan Pilihan Perikanan

1 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari Kabupaten				Ket
Outcome	<i>Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) di kabupaten</i>		1.737,36	Disnakkan
Output	1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)		Tidak Ada Disnakkan
	2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	<i>Jumlah TPI yang operasional</i>	Tidak Ada Disnakkan
			<i>Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten</i>	Tidak Ada
	3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota yang diterbitkan		Tidak Ada Disnakkan
	4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)		208 Pembudidaya Disnakkan
5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi		400.000 ekor/Benih Disnakkan	



## 26. Urusan Pilihan Pariwisata

1					Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		Ket
Outcome	<b>Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n – 1</b>			72-450 = -378	0 %	Dispar	
	<b>Jumlah wisatawan tahun n – 1</b>			450			
Output	1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi			38	Dispar	
	2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata			38	Dispar	
	3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota			Tidak ada	Dispar	
	4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			72	Dispar	
	5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri			25	Dispar	
	6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota			Tidak ada	Dispar	
	7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri			266	Dispar	
	8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (120/tenaga kerja)*100			928	Dispar	
	9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	<b>Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan</b>		120	100 %	Dispar
			<b>Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan</b>		120		
10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat			5 Kec	Dispar		
2					Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota		
Outcome	<b>Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n – 1</b>			0	0%	Dispar	
	<b>Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)</b>			100.803			
3					Tingkat Hunian Akomodasi		
Outcome	<b>Jumlah kamar yang terjual</b>			4.626	7,7 %	Dispar	
	<b>Jumlah kamar yang tersedia</b>			59.495			

<b>4</b>	<b>Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku</b>			
Outcome	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	BPS	141.60	BPS
<b>5</b>	<b>Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD</b>			
Outcome	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	BPS	11.4	BPS

## 27. Urusan Pilihan Pertanian

1 Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun							Ket
Outcome	<i>Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (ton)</i>			251.172.59	6,2 ton/Ha	Distan	
	<i>Luas panen (ha)</i>			40.866.20			
Output	1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan		34 Jenis	Distan	
	2	Prasaran pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana pertanian yang digunakan		145 unit	Distan	
	3	Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian		21	Distan	
	4	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan		142	100 %	Distan
			Jumlah prasarana yang dibangun		12		
	5	Persentase jumlah usulan usaha pertanian	Jumlah usulan yang difasilitasi		21	100 %	Distan
Jumlah usulan usaha pertanian			21				
2 Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular							
Outcome	<i>Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya</i>			2.798 – 4.007 = 1.209	43.20 %	Disnakan	
	<i>Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)</i>			2.798			
Output	1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	<i>Jumlah area yang dapat ditanggulangi</i>		10 Kecamatan	100 %	Disnakan
			<i>Luas area terkena bencana</i>		10 Kecamatan		

## 28. Urusan Pilihan Kehutanan

1 Urusan Kehutanan yang ada di Kabupaten					
Output	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	.....	
	2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	.....	
	3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	.....	
	4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	.....	

29. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral

1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten			
Outcome	<i>Jnmlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin</i>		.....	..... %
	<i>Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi</i>		.....	
Output	1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota		Ada/Tidak

### 30. Urusan Pilihan Perdagangan

1 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)						
Outcome	<b>Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan</b>			0	0 %	Kopedagin
	<b>pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten</b>			0		
Output	1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	<b>Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja</b>	0	0 %	Kopedagin
			<b>Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar</b>	0		
			<b>Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja</b>	0	0 %	Kopedagin
			<b>Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar</b>	0		
	2	Persentase penerbitan TDG	<b>Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja</b>	0	0 %	Kopedagin
			<b>Jumlah permohonan penerbitan TDG</b>	0		
	3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	<b>Jumlah penerbitan TDG</b>	0	0 %	Kopedagin
			<b>Jumlah gudang yang ada di Kab Kota</b>	0		
	4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :				
		a	Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	<b>Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</b>	0	0 %
<b>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri</b>				0		

		b	Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	<b>Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</b>	0	0 %	Kopedagin
				<b>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri</b>	0		
		c	Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	<b>Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</b>	0	0 %	Kopedagin
				<b>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri</b>	0		
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	<b>Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kab Kota</b>	0	0 %	Kopedagin
				<b>Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer</b>	0		
		6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	<b>Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1 x 24 jam)</b>	0	0 %	Kopedagin
				<b>Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar</b>	0		

		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ <p>K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya  a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)  b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)</p>	0.5+0.5	100 %	Kopedagin
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	<i>Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok</i>	0	0 %	Kopedagin
<b>2 Persentase Kinerja Realisasi Pupuk</b>							
Outcome	Realisasi			9261	23.18 %	Distan	
	RDKK			39.950.77			
Output	1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = a/b \times c \times 100\%$ <p>X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan  a = Jumlah pupuk yang disalurkan  b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK)  c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)</p>	$X = \frac{9.261}{10.328} \times 100\%$	89.66%	Distan	
<b>3 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku</b>							
Outcome	<i>Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan</i>			254	51.2 %	Kopedagin	
	<i>Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten</i>			496			
Output	1	Persentase alatalat ukur, takar, timbang dan	<i>Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan</i>	254	51.2 %	Kopedagin	



		perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	<b>Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab Kota</b>	496		
	2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	<b>Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku</b>	0	0 %	Kopedagin
			<b>Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan</b>	0		

### 31. Urusan Pilihan Perindustrian

1					Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota		Ket
Outcome	<i>Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n–jumlah industri kecil dan menengah tahun n–1</i>			687	0.145 %	Kopedagin	
	<i>Jumlah indutri kecil dan menengah tahun n–1</i>			686			
Output	1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	<i>Jumlah realisasi izin yang diterbitkan</i>	Tidak ada	0 %	Data Izin yang terbit	
			<i>Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk</i>	Tidak ada			
2					Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator		
Outcome	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah $(100/N)\%$ Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali $(100/N)\%$ Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut			Tidak ada	0 %	Kopedagin	
Output	1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK		0	Kopedagin	

<b>3</b>						
<b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait</b>						
Outcome		<b><i>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</i></b>		1	100 %	Kopedagin
		<b><i>Jumlah izin yang dikeluarkan</i></b>		1		
Output	1	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	<b><i>Jumlah realisasi izin yang diterbitkan</i></b>	1	100 %	Data Izin
			<b><i>Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk</i></b>	1		
<b>4</b>						
<b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait</b>						
Outcome		<b><i>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</i></b>		1	100 %	Data Izin
		<b><i>Jumlah izin yang dikeluarkan</i></b>		1		
Output	1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	<b><i>Jumlah realisasi izin yang diterbitkan</i></b>	1	100 %	Data Izin
			<b><i>Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk</i></b>	1		
<b>5</b>						
<b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota</b>						
Outcome		<b><i>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</i></b>		1	100 %	Data Izin
		<b><i>Jumlah izin yang dikeluarkan</i></b>		1		
<b>6</b>						
<b>Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini</b>						
Outcome		1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)				Ada

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)</li> </ul> <p>2) Kelengkapan informasi industri meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)</li> <li>- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)</li> </ul> <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)</p>				
Output	1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	<b><i>Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota di SIINas</i></b>	0	0 %	Kopedagin
			<b><i>Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota</i></b>	687		

### 32. Urusan Pilihan Transmigrasi

	Output	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi	.....
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Satuan Pemukiman berupa satu kesatuan pemukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga	.....
		3	Jumlah satuan pemukiman yang dibina		.....

33. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)

1 Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan				Ket
Outcome	<i>Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan</i>	586.982.890.832.24	69.3 %	BPKPAD
	<i>Jumlah APBD</i>	846.625.270.758.24		
2 Rasio PAD				
Outcome	<i>Jumlah PAD</i>	12.420.998.774	30.1 %	BPKPAD BPS
	<i>Jumlah PDRB Non Migas</i>	41.356.000.000		
3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)				
Outcome	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2		INSP
4 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)				
Outcome	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3		INSP
5 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)				
Outcome	<i>Jumlah belanja urusan pemerintahan–transfer expenditures</i>	42.029.180.617	4.96 %	BPKPAD
	<i>Jumlah belanja APBD</i>	846.625.270.758.24		
6 Opini Laporan Keuangan				
Outcome	Opini Laporan Keuangan	WTP		INSP

### 34. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)

1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama			Ket
Outcome	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	Tidak ada	0 %	UKPBJ
	Jumlah kontrak keseluruhan tahun n	Tidak ada		
2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif			
Outcome	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	114	31.4 %	UKPBJ
	Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	363		
3	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan			
Outcome	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	200,923,000,000.00	42.14 %	UKPBJ
	Total belanja langsung	476836050756.97		

### 35. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)

1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			Ket
Outcome	<i>Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas</i>	825	1.95 %	BKD
	<i>Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah</i>	423		
2	Rasio pegawai Fungsional (%) PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan			
Outcome	<i>Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)</i>	28	0.02 %	BKD
	<i>Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</i>	1.257		
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			
Outcome	<i>Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi</i>	28	100 %	BKD
	<i>Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</i>	28		



### 36. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)

1	Budget Execution : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD				Ket
	Outcome	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi	765.177.964.144.50	90.38 %	BPKPAD
		Total belanja APBD dikurangi satu	846.625.270.758.24		
2	Revenue Mobilization : Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD				
	Outcome	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	9.011.203.725	87.59 %	BPKPAD
		Total PAD dalam APBD dikurangi satu	10.287.602.000		
3	Assets Management				
	Outcome	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		YA	BPKPAD
4	Cash Management : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya				
	Outcome	Nilai realisasi SiLPA	139.666.646.699	15.70 %	BPKPAD
		Total belanja anggaran tahun sebelumnya	889.421.437.951		

**37. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)**

1	Informasi Ketersediaan Informasi tentang Sumber Daya yang Tersedia Untuk Pelayanan (Information on Resources Available to Frontline Service Delivery Units)			Ket
Outcome	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses website Pemda	772.500.000	98 %	Kominfo
	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses website Pemda	761.215.762		
2	Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah (Public Access to Fiscal Information)			
Outcome	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	59	100 %	Kominfo
	Total jumlah dokumen yang telah dirinci	59		

## **BAB III**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

#### **1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**

Dasar hukum tentang penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan antara lain:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

#### **2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten Humbang Hasundutan;**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang telah ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan

semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan memperoleh alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan sebesar Rp. 316.382.338.200,-. Dana tersebut terbagi dalam 5 (lima) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) yang dilaksanakan oleh 5 (lima) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

### **3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan**

#### **3.1. Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga yang ditugaskan kepada Kabupaten Humbang Hasundutan;**

1. Pemberian dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa yang diperuntukkan bagi 153 desa se-Kabupaten Humbang Hasundutan dengan alokasi Rp. 50.334.355.200.
2. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian menerima alokasi sebesar Rp. 3.000.000.000 untuk Program Revitalisasi Pasar Rakyat Doloksanggul yang merupakan Penugasan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
3. Dinas Pertanian menerima alokasi sebesar Rp. 3.673.000.000 untuk Peningkatan Produksi dan Nilai tambah Hortikultura yang merupakan Penugasan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menerima alokasi sebesar Rp. 35.000.000.000 yang merupakan penugasan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerima alokasi sebesar Rp. 124.374.983.000 untuk disalurkan sebagai Dana Desa ke 153 Desa se-Kabupaten Humbang Hasundutan yang merupakan Penugasan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

**Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Kabupaten Humbang Hasundutan:**

No	K/LPNK/P	Dasar Pelaksanaan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana (TP)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	SP-DIPA Nomor 090.02.4.071632/2020	Revitalisasi Pasar Rakyat Doloksanggul	Kecamatan Doloksanggul	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Humbang Hasundutan	3.000.000.000	2.855.712.444	95,2	Terlaksananya Revitalisasi Pasar Raktat Doloksanggul	100
2	Kementerian Pertanian	SP-DIPA Nomor 018.04.4.071602/2020	Peningkatan Produksi dan Nilai tambah Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan Lintongnihuta</li> <li>- Kecamatan Doloksanggul</li> <li>- Kecamatan Onan Ganjang</li> <li>- Kecamatan Pollung</li> <li>- Kecamatan Paranginan</li> <li>- Kecamatan Sijamapolang</li> </ul>	Dinas Pertanian Kabupaten Humbang Hasundutan	3.673.000.000	3.635.560.223	99	Terbangunnya sarana dan prasarana pertanian untuk peningkatan produksi dan nilai tambah Hortikultura	100
3	Kementerian	Tugas	Pembinaan	153 Desa	Dinas Pemberdayaan	124.374.983.000	129.576.159.758	100	Meningkatnya	100

No	K/LPNK/P	Dasar Pelaksanaan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana (TP)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
	Keuangan dan Kemendes PDTT	Pembantuan Penyaluran Dana Desa bersumber dari APBN	dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		(Termasuk SiLPA thn 2019)		keberdayaan Masyarakat dan kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Memfasilitasi Proses Pengelolaan Pembangunan yang partisipatif dan demokratis di 153 Desa.	
4	SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,	SP-DIPA Nomor 033.07.401651/2020	BSPS Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Latak Huni	Kabupaten Humbang Hasundutan	Satker SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Utara	35.000.000.000	35.000.000.000	100	Terbangunya Rumah yang Layak Huni sebanyak 2.000 Unit	100

No	K/LPNK/P	Dasar Pelaksanaan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana (TP)	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
5	Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	Penyaluran Alokasi dana desa	Alokasi Dana Desa	153 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	50.334.355.200	53.597.321.118 (Termasuk SiLPA thn 2019)	100	Tersalurkannya Alokasi Dana Desa kepada 153 Desa	100



## BAB IV

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### 4.1 Urusan Pendidikan

##### 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar;
3. Pendidikan Kesetaraan.

##### 4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

1. Pendidikan Anak Usia Dini 10.850 orang ;
2. Pendidikan Dasar 40.838 orang;
3. Pendidikan Kesetaraan 63 orang.

##### 4.1.3 Realisasi

1. Pendidikan Anak Usia Dini 10.049 orang;
2. Pendidikan Dasar 40.429 orang;
3. Pendidikan Kesetaraan 1 orang.

##### 4.1.4 Alokasi Anggaran

No.	Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 5.656.459.900
2.	Pendidikan Dasar	Rp. 77.396.124.027
3.	Pendidikan Kesetaraan	Rp.97.200.000

##### 4.1.5 Dukungan Personil

- a. PNS: 2.438 orang
- b. Non PNS: 989 orang

##### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

###### a. Permasalahan

1. Pada jenjang Sekolah Dasar (SD) masih banyak anak usia sekolah dibawah 7 tahun;
2. Masih cukup banyak Angka putus sekolah SD dan SMP sebanyak 38 siswa;
3. Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan masih rendah.

###### b. Solusi

1. Memberikan paradigma baru kepada masyarakat bahwa usia anak Sekolah Dasar (SD) yang normal adalah usia 7 tahun ;
2. Peran orangtua murid dan lingkungan masyarakat sangat diharapkan dalam memperhatikan kelangsungan pendidikan anaknya agar jangan putus sekolah serta peran guru untuk selalu memotivasi siswa dan juga mengontrol perilaku siswa dan tetap menjalin komunikasi dengan orangtua siswa;

3. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan agar memperluas akses pendidikan kesetaraan dengan membina PKBM untuk membuka program Paket A, B dan C sehingga siswa yang putus sekolah dapat melanjutkan pendidikannya ke kesetaraan.

## 4.2 Urusan Kesehatan

### 4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif ;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

### 4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 3.725 Orang;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3.556 Orang;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 3.556 Orang;
4. Pelayanan Kesehatan Balita 16.803 Orang;
5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar 28.548 Orang;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 106.050 Orang;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 31.721 Orang;
8. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi 45.924 Orang;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus 1.115 Orang;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 268 Orang;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi 522 Orang;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 5.547 Orang.

### 4.2.3 Realisasi

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 63.06%;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 77.4 %;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 76.94 %;
4. Pelayanan Kesehatan Balita 65.17 %;
5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar 47.99 %;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 67.46 %;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 68.3 %;
8. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi 61.63 %;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus 69.46 %;

10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 57.5 %;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis 74 %;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 73.1 %.

#### 4.2.4 Alokasi Anggaran

No.	Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran
<b>I</b>	<b>Pengelolaan pelayanan Ibu Hamil</b>	<b>Rp. 370.299.400</b>
1.	Pengadaan PMT Ibu Hamil/ Menyusui susu bubuk 200 gr	Rp.135.000.000
2.	Pelayanan Ibu Hamil (BOK Dinkes)	Rp. 51.144.400
3.	Pelayanan Ibu Hamil (BOK Puskesmas)	Rp. 184.155.000
<b>II</b>	<b>Pengelolaan pelayanan Ibu bersalin</b>	<b>Rp. 1.252.690.400</b>
1.	Pengadaan Apron	Rp. 35.000.000
2.	Jaminan Persalinan	Rp. 1.176.375.000
3.	Pelayanan Ibu Bersalin (BOK Dinkes)	Rp. 10.000.400
4.	Pelayanan Ibu Bersalin (BOK Puskesmas)	Rp. 31.315.000
<b>III</b>	<b>Pengelolaan pelayanan Bayi Baru Lahir</b>	<b>Rp. 114.346.600</b>
1.	Pelayanan Bayi Baru Lahir (BOK Dinkes)	Rp. 23.000.000
2.	Pelayanan Bayi Baru lahir (BOK Puskesmas)	Rp. 91.346.600
<b>IV</b>	<b>Pengelolaan pelayanan Balita</b>	<b>Rp. 1.282.606.137</b>
1.	Pengadaan PMT Balita Susu Bubuk	Rp. 132.000.000
2.	Pengadaan Buku Imunisasi	Rp. 50.011.300
3.	Pelayanan kesehatan Balita (BOK Dinkes)	Rp. 73.965.000
4.	Pelayanan kesehatan Balita (BOK Puskesmas)	Rp. 737.065.000
1.	Pengadaan Obat Gizi (Vitamin A dan Tablet Tambah Darah, mineral Mix)	Rp. 289.564.837
<b>V</b>	<b>Pengelolaan pelayanan Anak Usia Pendidikan Dasar</b>	<b>Rp. 294.314.800</b>
1.	Pengelolaan pelayanan Anak Usia Pendidikan Dasar ( BOK Dinkes)	Rp. 48.000.000
2.	Pengelolaan pelayanan Anak Usia Pendidikan Dasar (BOK Puskesmas)	Rp. 246.314.800
<b>VI</b>	<b>Pelayanan kesehatan pada usia produktif</b>	<b>Rp. 119.616.400</b>
1.	Pengadaan Buku Monitoring posbindu	Rp. 48.550.400

2.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif (BOK Dinkes)	Rp. 25.950.000
3.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif (BOK Puskesmas)	Rp. 45.116.000
<b>VII.</b>	<b>Pelayanan kesehatan pada usia lanjut</b>	<b>Rp. 125.157.800</b>
1.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (BOK Puskesmas)	Rp. 87.157.800
2.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (BOK Dinkes)	Rp. 38.000.000
<b>VIII.</b>	<b>Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi</b>	<b>Rp. 176.412.000</b>
1.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi (BOK Puskesmas)	Rp. 124.602.000
2.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi (BOK Dinkes)	Rp. 51.810.000
<b>IX.</b>	<b>Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus</b>	<b>Rp. 112.838.000</b>
1.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus (BOK Puskesmas)	Rp. 61.828.000
2.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus (BOK Kabupaten)	Rp. 51.010.000
<b>X</b>	<b>Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat</b>	<b>Rp. 149.938.400</b>
1.	DAU	Rp. 48.550.400
2.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (BOK Puskesmas)	Rp. 91.888.000
3.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (BOK Kabupaten)	Rp. 9.500.000
<b>XI</b>	<b>Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis</b>	<b>Rp. 372.920.300</b>
1.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis (BOK Kabupaten)	Rp. 30.000.000
2.	Pengadaan PMT TB	Rp. 260.335.300
3.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis (BOK Puskesmas)	Rp. 82.585.000

<b>XII</b>	<b>Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b>	<b>Rp. 172.900.000</b>
1.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) (BOK Dinkes)	Rp. 20.000.000
2.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) (BOK Puskesmas)	Rp. 152.900.000

#### 4.2.5 Dukungan Personil

- a. PNS: 531 orang
- b. Non PNS: 43 orang

#### 4.2.6 Permasalahan dan Solusi

##### a. Permasalahan

Belum terpenuhinya SDM Kesehatan di Puskesmas sesuai Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas yaitu Puskesmas minimal memiliki lima jenis ketenaagaan yaitu Kesehatan masyarakat, Analisis Laboratorium, Sanitarian, Apoteker/asisten apoteker, dan Nutrisionis.

##### b. Solusi

Melakukan perekrutan SDM kesehatan kontrak dengan perjanjian kerja melalui Dana BOK dan DAU

### 4.3 Urusan Pekerjaan Umum

#### 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik;
3. Persentase RLH.

#### 4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 80 %;
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 75,5 %;
3. Persentase RLH 87,10 %

#### 4.3.3 Realisasi

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 79,59 %;
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 75,11 %;
3. Persentase RLH 91,34 %.

#### 4.3.4 Alokasi Anggaran

No.	Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran
1.	Persentase Rumah Tangga memiliki Air Minum layak	Rp. 6.282.972.801,34
2.	Persentase Rumah Tangga memiliki Akses Layak Sanitasi (limbah)	Rp. 4.201.162.200,00
3.	Persentase RLH	Rp. 4.929.824.600,00

#### 4.3.5 Dukungan Personil

- a. PNS: 23 orang
- b. Non PNS: 3 orang

#### **4.4 Urusan Perumahan Rakyat**

##### 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

##### 4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

##### 4.4.3 Realisasi

1. Tidak ada rumah yang terkena korban bencana, sehingga tidak ada penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana
2. Tidak ada rumah yang terkena relokasi di Kabupaten Humbang Hasundutan



## 4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

### 4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

### 4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

- 1 Terlaksananya Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2 Pelayanan informasi rawan bencana kepada usia remaja, dewasa dan orang tua
- 3 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kepada usia remaja, dewasa dan orang tua
- 4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kepada usia remaja, dewasa dan orang tua
- 5 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi kepada seluruh korban kebakaran.

### 4.5.3 Realisasi

- 1 Terlaksananya Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum berupa:
  - Operasional Penegakan
  - Operasi Kasih Sayang
  - Operasional Patwal dan Patroli
  - Operasional Pengamanan Hari-hari Besar
- 2 Pelayanan informasi rawan bencana kepada 48.078 Orang
- 3 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kepada: 4.244 Orang
- 4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana: 43.421 Orang
- 5 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi kepada seluruh korban kebakaran: 100%.

### 4.5.4 Alokasi Anggaran

No.	Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;	Rp. 10.435.632.140.00
2.	Pelayanan informasi rawan bencana;	Rp. 640.175.000.00
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;	Rp. 481.832.560.00
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;	Rp. 36.969.800.00
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	Rp. 77.107.000.00

#### 4.5.5 Dukungan Personil

a. Non PNS: 28 Orang

b. PNS: 22 Orang

## 4.6 Urusan Sosial

### 5.1.2 Jenis Pelayanan Dasar

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

### 5.1.3 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti 60 orang.
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar panti belum dilaksanakan.
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti 30 orang.
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti belum dilaksanakan.
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota 100 %.

### 5.1.4 Realisasi

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti 100 %.
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar panti belum dilaksanakan.
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti 100 %.
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti belum dilaksanakan.
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota 100 %.

### 5.1.5 Alokasi Anggaran

No.	Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;	Rp. 70.616.000,-

No.	Pelayanan Dasar	Alokasi Anggaran
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar diluar panti;	-
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;	Rp. 56.825.000,-
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti;	-
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.	Rp. 167.805.000,-

#### 5.1.6 Dukungan Personil

- a. PNS: 22 orang
- b. Non PNS: 67 orang

#### 5.1.7 Permasalahan dan Solusi

##### a. Permasalahan

- Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Humbang Hasundutan belum tertata dengan baik sehingga tidak bisa menjadi acuan untuk perencanaan kegiatan.
- Peraturan Daerah terkait dengan PMKS belum diterbitkan.
- Kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM belum sepenuhnya tertampung di DPA.

##### b. Solusi

- Tahun 2020 akan dilaksanakan Pendataan, Verifikasi dan Validasi Data PMKS Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mendapatkan data yang terpilah dan akurat yang bisa digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan.
- Koordinasi dengan OPD terkait dalam hal penerbitan Peraturan Daerah tentang PMKS dan Pencapaian SPM.
- Kegiatan 2021 direncanakan untuk peningkatan pencapaian SPM dengan mengacu kepada hasil Pendataan, Verifikasi dan Validasi Data PMKS Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 telah disusun dan disesuaikan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 120.04/6931/Otda tanggal 18 Desember 2020 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020.

Penyusunan LPPD Kabupaten Humbang Hasundutan telah disesuaikan dengan pedoman penyusunan yang disampaikan oleh pemerintah, termasuk diantaranya penggabungan dokumen laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai Surat Edaran Menpan RB Nomor: 05 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan LPPD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020 merupakan hasil capaian yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang bersinergi dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan.

Kami menyadari bahwa capaian kinerja yang tersaji dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 masih belum sepenuhnya memenuhi harapan Pemerintah Atasan serta kebutuhan dan harapan masyarakat karena berbagai keterbatasan baik sarana dan prasarana, sumber daya manusia, sumber daya finansial dan berbagai faktor lain. Namun kami akan tetap berusaha dengan segala daya upaya yang ada untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan pada masa yang akan datang.

Kami berharap Pemerintah dapat melakukan evaluasi dan memberikan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada tahun-tahun yang akan datang.



**VISI**

**MEWUJUDKAN HUMBANG HASUNDUTAN YANG HEBAT DAN BERMENTALITAS UNGGUL**

**MISI**

1. Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam

3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

4. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan

5. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah

**TUJUAN**

1. Terciptanya kehidupan umat beragama yang harmonis

2. Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Manusia

3. Meningkatkan profesionalisme birokrasi

4. Mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Humbang Hasundutan

5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

6. Meningkatkan konektivitas antar wilayah

**INDIKATOR TUJUAN**

Jumlah konflik antar umat beragama

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Reformasi Birokrasi

Persentase pertumbuhan produksi bahan pangan

Laju pertumbuhan ekonomi

Persentase jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah dalam kondisi baik

**SASARAN**

1. Terpeliharanya toleransi antar umat beragama

2. Meningkatnya akses pendidikan

3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

4. Menurunnya angka kemiskinan

5. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan

6. Meningkatnya produksi bahan pangan utama.

7. Pertumbuhan Ekonomi

8. Meningkatkan Kunjungan Wisatawan

9. Meningkatnya infrastruktur jaringan jalan

**INDIKATOR SASARAN**

Jumlah konflik antar umat beragama

Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)

Angka harapan hidup

Persentase menurunnya angka kemiskinan

Peringkat LPPD

Nilai Evaluasi AKIP

Opini BPK

Persentase Implementasi e-Government

Persentase pertumbuhan produksi pertanian

Persentase pertumbuhan produksi peternakan dan perikanan

Persentase pertumbuhan PDRB

Persentase wisatawan yang berkunjung

Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap

**OPD**

3 OPD

8 OPD

14 OPD

14 OPD

2 OPD

3 OPD

2 OPD

9 OPD

4 OPD

7 OPD

6 OPD

11 OPD

4 OPD

**PROGRAM**

3 Program

12 Program

21 Program

19 Program

2 Program

3 Program

3 Program

11 Program

7 Program

10 Program

11 Program

15 Program

5 Program



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR  
23 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021;
- b. bahwa dalam rangka penyelarasan indikator kinerja utama dengan target kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu mengubah indikator kinerja utama Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016-2021.



Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 23), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
  - a. IKU Pemerintah Daerah;
  - b. IKU SKPD.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal 26 September 2019

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul  
pada tanggal 26 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019  
NOMOR 44.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.  
NIP. 19620624 198602 1 001

LAMPIRAN A :  
 PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
 NOMOR : 44 TAHUN 2019  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2018  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2016-2021

No.	Kinerja/Tujuan/ Sasaran/Hasil	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan IKU		Sumber Data	OPD Penanggungjawab
			Alasan dipilih	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akses pendidikan	1 Angka rata-rata lama sekolah (ARLS)	Untuk mendukung visi "Humbang Hasundutan HEBAT dan bermentalitas unggul". Akronim Hebat: H=Humbang Hasundutan na mar Tuhan jala Maduma (peningkatan keimanan, kesejahteraan dan kualitas SDM dan SDA). Meningkatkan kualitas SDM dengan pemerataan akses pendidikan untuk semua warga baik di desa dan kota. Mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sebagai dasar melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA sampai dengan Perguruan Tinggi. Dengan akses pendidikan yang lebih luas dan merata di setiap desa akan berdampak positif meningkatkan angka lulusan SLTA dan Perguruan tinggi yang dapat mendorong Indeks Pembangunan manusia (IPM).	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Data pokok pendidikan	Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas PKP, Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2 Angka harapan hidup	untuk mendukung visi "Humbang Hasundutan HEBAT dan bermentalitas unggul". Akronim Hebat: H=Humbang Hasundutan na mar Tuhan jala Maduma (peningkatan keimanan, kesejahteraan dan kualitas SDM).	Jumlah umur yang meninggal/Total orang yang meninggal	BPS	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Doloksanggul, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PKP, Dinas PUPR, Dinas P2KB, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kopedagin, Dinas Sosial, Dinas PMDP2A, BPBD, Satpol PP.
3	Menurunnya angka kemiskinan	3 Persentase penurunan angka kemiskinan	Karena tingkat kemampuan dan kemauan masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dalam pemberdayaan sosial masih rendah, hal ini mendukung Visi Humbang Hasundutan melalui Misi Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam.	Jumlah penduduk miskin /Jumlah penduduk x 100%	BPS	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas PKP, Dinas PUPR, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kopedagin, Dinas PMDP2A, Dinas P2KB, Dinas Ketapang, Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pendidikan.

No.	Kinerja/Tujuan/Sasaran/Hasil	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan IKU		Sumber Data	OPD Penanggungjawab
			Alasan dipilih	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7
4	Meningkatnya produksi bahan pangan utama	4 Persentase pertumbuhan produksi pertanian  5 Persentase pertumbuhan produksi peternakan	<p>Untuk mendukung visi "Humbang Hasundutan HEBAT dan bermentalitas unggul". Akronim Hebat: E=Eme na godang tano na bidang (mewujudkan ketahanan pangan), B=Bahen murah arga ni pupuk (penyediaan Saprodi dan Alsintan), A=Asa sinur napinahan gabe na niula (peningkatan ekonomi kerakyatan). Peningkatan Produksi bahan pangan dan Penganeka Ragaman Pangan merupakan hal yang penting untuk menjamin berlangsungnya kehidupan karena tanpa bahan pangan yang mencukupi tidak mungkin meningkatkan kualitas SDM. Produksi bahan pangan (padi, jagung, ubi) perlu didukung dengan ketersediaan pupuk yang murah dan alsintan sehingga pendapatan meningkat sekaligus mencapai Peningkatan ekonomi kerakyatan.</p> <p>Untuk mendukung visi "Humbang Hasundutan HEBAT dan bermentalitas unggul". Akronim Hebat: E=Eme na godang tano na bidang (mewujudkan ketahanan pangan), B=Bahen murah arga ni pupuk (penyediaan Saprodi dan Alsintan), A=Asa sinur napinahan gabe na niula (peningkatan ekonomi kerakyatan). Peningkatan Produksi bahan pangan dan Penganeka Ragaman Pangan merupakan hal yang penting untuk menjamin berlangsungnya kehidupan karena tanpa bahan pangan yang mencukupi tidak mungkin meningkatkan kualitas SDM. Produksi peternakan perlu didukung dengan ketersediaan bibit unggul dan bantuan sarana prasarana peternakan sehingga pendapatan meningkat sekaligus mencapai Peningkatan ekonomi kerakyatan.</p>	<p>(Jumlah produksi komoditi bahan pangan tahun n) - (Jumlah produksi komoditi bahan pangan tahun n-1)/Jumlah produksi tahun n-1 x 100%</p> <p>(Jumlah produksi peternakan tahun n) -(Jumlah produksi peternakan tahun n-1)/Jumlah produksi tahun n-1 x 100%</p>	Dinas Pertanian  Dinas Peternakan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Ketapang, Dinas PUPR, Dinas PMDP2A, Dinas Ketenagkerjaan, BPBD.  Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Ketapang, Dinas PMDP2A, Dinas Ketenagakerjaan.
5	Meningkatnya PDRB	6 Persentase pertumbuhan PDRB	Untuk mendukung visi "Humbang Hasundutan Hebat dan bermentalitas unggul". Akronim Hebat: B=Bahen murah arga ni pupuk (penyediaan Saprodi dan Alsintan), A=Asa sinur napinahan gabe na niula (peningkatan ekonomi kerakyatan).	(PDRB tahun n)-(PDRB n-1)/PDRB tahun n-1 x 100%	BPS	Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kopedagin, Dinas Perhubungan, Dinas PMP2TSP, Dinas Lingkungan Hidup.

No.	Kinerja/Tujuan/ Sasaran/Hasil	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan IKU		Sumber Data	OPD Penanggungjawab
			Alasan dipilih	Formulasi		
1	2	3	4	5	6	7
6	Meningkatnya kunjungan wisatawan	7 Jumlah wisatawan	Karena Humbang Hasundutan memiliki potensi pariwisata yang dapat diandalkan, namun belum dikelola dengan baik, sehingga ke depan diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan baru bagi masyarakat.	Jumlah wisatawan tahun n	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas PKP, Dinas Kopedagin, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Pemuda dan Olah Raga.
7	Meningkatnya infrastruktur jaringan jalan	8 Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik	Belum memadainya penyediaan kualitas layanan jalan, hal ini mendukung pencapaian Visi Humbang Hasundutan Hebat akronim T = Ture dalam tu huta sahat tu balian asa langku na niula dohot tiga-tiga (peningkatan kualitas infrastruktur). Kata "Ture" memiliki arti "Bagus/Berkualitas" Huta = Kampung/Desa, Balian = lahan pertanian/perkebunan, langku na ni ula dohot tiga-tiga artinya hasil panen dan penjualannya laku di pasaran	Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik/Total panjang jaringan jalan x 100%	Dinas PUPR	Dinas PUPR, Dinas PKP, Dinas Perhubungan, BPBD.

**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.  
NIP. 19620624 198602 1 001

ttd

**DOSMAR BANJARNAHOR**



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR  
24 TAHUN 2018 TENTANG TARGET KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah ditetapkan target kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019-2021 berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019-2021;
- b. bahwa untuk penajaman tujuan, sasaran dan indikator target kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019-2021, perlu mengubah Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019-2021 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 24).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG TARGET KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019-2021.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019-2021 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 24) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Target kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 4, tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal 20 Agustus 2019

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,  
ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul  
pada tanggal 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019 NOMOR 38.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.  
NIP. 19620624 198602 1 001

LAMPIRAN A  
 PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
 NOMOR 38 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 24  
 TAHUN 2018 TENTANG TARGET KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN  
 HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019-2021

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Formula Penghitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target Sasaran					Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggungjawab	Program		
										2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Misi Pertama: Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	1.1	Terciptanya kehidupan umat beragama yang harmonis	Jumlah konflik antar umat beragama					Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	0		
					1.1.1	Terpeliharanya toleransi antar umat beragama	1.1.1.1	Jumlah konflik antar umat beragama	Jumlah konflik antar umat beragama tahun n	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	Setdakab, Bakesbangpol, Satpol PP	Program Peningkatan Kehidupan Beragama, Program Pembinaan Masyarakat dalam Bangsa dan Bernegara, Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat
2	Misi Kedua : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam	2.1	Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					Indeks	66.56	66.8	67.96	68.5	69.0	70	70			
					2.1.1	Meningkatnya akses pendidikan	2.1.1.1	Angka rata-rata lama sekolah (ARLS)	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Tahun	10.17	10.17	10.20	10.25	10.30	10.35	10.35	Dinas Pendidikan, Dinas Perpusip, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas PKP, Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Bangunan dan Pemukiman, Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pengembangan Data.
					2.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1.2.1	Angka harapan hidup	Jumah umur yang meninggal/Total orang yang meninggal	Tahun	68.26	68.5	69.0	69.5	70	70.5	70.5	Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas PKP, Dinas PUPR, Dinas P2KB, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kopedagin, Dinas Sosial, Dinas PMDP2A, BPBD, Satpol PP	Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Program Peningkatan Pelayanan Dasar, Penunjang Medik Dan Sarana Prasarana Rumah Sakit, Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan, Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Pengendalian Banjir, Program Keluarga Berencana, Program Penataan dan Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan Hidup, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, Program Pelayanan, Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Penguatan/Peningkatan Kapasitas Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Program Kedaruratan dan Logistik, Program Pencegahan Dini dan Pemadam Kebakaran.



No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Penghitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target Sasaran					Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggungjawab	Program			
									2017	2018	2019	2020	2021						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					2.1.3	Menurunnya angka kemiskinan	2.1.3.1	Persentase penurunan angka kemiskinan	Jumlah Penduduk miskin/Jumlah Penduduk x 100%	Persen	9,78	9,85	9,00	8,95	8,90	8,85	8,85	Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas PKP, Dinas PUPR, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kopedagin, Dinas PMDP2A, Dinas P2KB, Dinas Ketapang, Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan	Program Pelayanan Rehabilitasi, Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Program Pemberdayaan Dan Kelembagaan Sosial, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Program Peningkatan Produksi Perikanan, Program Lingkungan Sehat Perumahan, Program Pengendalian Banjir, Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan Keunggulan Kompetitif UMKM, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan, Program Keluarga Berencana, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Pengembangan Pariwisata, Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, Program Wajib Belajar Sembilan Tahun.
<b>3</b>	<b>Misi Ketiga : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik</b>	<b>3.1</b>	<b>Meningkatkan profesionalisme birokrasi</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>							<b>C</b>	<b>CC</b>	<b>B</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>		
					3.1.1	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	3.1.1.1	Peringkat LPPD	Hasil Penilaian Kemendagri	Peringkat (Provinsi)	9	6	5	4	3	2	2	Setdakab dan Setwan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
							3.1.1.2	Nilai evaluasi AKIP	Hasil evaluasi Kemen PANRB	Predikat	C	CC	B	BB	BB	BB	BB	Setdakab, Bappeda, Inspektorat	Program Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
							3.1.1.3	Opini BPK	Hasil Opini BPK atas Lapkeu	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPAD, Inspektorat	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
							3.1.1.4	Persentase Implementasi e-Government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	N/A	1.7	1.9	2.0	2.2	2.5	2.5	Dinas Kominfo, BKD, BPKPAD, Bappeda, Dukcatpil, Dinas Perpusip, Dinas PMP2TSP, Dinas PMDP2A	Program E-Government, Program Persandian untuk Pengamanan Informasi, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pengembangan Data, Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD, Program Peningkatan Sistem Administrasi, Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
<b>4</b>	<b>Misi Keempat : Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan</b>	<b>4.1</b>	<b>Mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Humbang Hasundutan</b>	<b>Persentase pertumbuhan produksi bahan pangan</b>						<b>Persen</b>	<b>1.8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>21.8</b>		

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula Penghitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target Sasaran					Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggungjawab	Program			
									2017	2018	2019	2020	2021						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					4.1.1	Meningkatnya produksi bahan pangan utama.	4.1.1.1	Persentase pertumbuhan produksi pertanian	(Jumlah produksi komoditi bahan pangan tahun n) - (Jumlah produksi komoditi bahan pangan tahun n-1)/Jumlah produksi tahun n-1 x 100%	Persen	1.8	5	5	5	5	5	26.8	Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Ketapang, Dinas PUPR, Dinas PMDP2A, Dinas Ketenagakerjaan, BPBD	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Program Peningkatan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Kedaruratan dan Logistik, Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
							4.1.1.2	Persentase pertumbuhan produksi peternakan dan perikanan	(Jumlah produksi ternak tahun n) - (Jumlah produksi ternak tahun n-1)/Jumlah produksi ternak tahun n-1 x 100%	Persen	2	3	3	3	3	3	17.0	Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Ketapang, Dinas PMDP2A, Dinas Ketenagakerjaan	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Program Peningkatan Produksi Perikanan, Program Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
		4.2	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Laju pertumbuhan ekonomi						Persen	5.02	5.05	5.06	5.07	5.08	5.09	5.09		
					4.2.1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB	4.2.1.1	Persentase pertumbuhan PDRB	(PDRB tahun n) - (PDRB tahun n-1)/PDRB tahun n-1 x 100%	Persen	3.47	3.57	3.67	3.80	3.90	4.00	4.00	Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kopedagin, Dinas Perhubungan, Dinas PMP2TSP, Dinas Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Program Peningkatan Produksi Perikanan, Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi Dan Keunggulan Kompetitif UMKM, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Pariwisata, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
					4.2.2	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	4.2.2.1	Jumlah wisatawan	Jumlah wisatawan tahun n	orang	50,763	100,174	122,644	134,908	148,399	163,239	163,239	Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas PKP, Dinas Kopedagin, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Pemuda dan Olahraga	Program Pengembangan Pariwisata, Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Bangunan dan Permukiman, Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan Keunggulan Kompetitif UMKM, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan, Pelayanan Angkutan, Program E-Government, Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga.

No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Formula Penghitungan	Satuan	Kondisi Awal	Target Sasaran					Kondisi Akhir RPJMD	OPD Penanggungjawab	Program		
										2017	2018	2019	2020	2021					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Misi Kelima : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah	5.1	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Persentase jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah dalam kondisi baik					Panjang jaringan jalan penghubung desa ke kecamatan dengan kondisi baik/Total jalan desa x 100%	Persen	68.01	68.91	69.66	70.41	71.16	71.91	71.91		
					5.1.1	Meningkatnya infrastruktur jaringan jalan	5.1.1.1	Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik	Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik/Total Panjang jaringan jalan x 100%	Persen	68.01	68.91	69.66	70.41	71.16	71.91	71.91	Dinas PUPR, Dinas PKP, Dinas Perhubungan, BPBD, Dinas PKP	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan, Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Program Kedaruratan dan Logistik, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Bangunan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHUT SILABAN, S.H.

NIP. 19620624 198602 1 001

**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**

**DOSMAR BANJARNAHOR**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DOSMAR BANJARNAHOR, S.E.**  
Jabatan : **BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Doloksanggul, Januari 2021

  
**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**  
  
**DOSMAR BANJARNAHOR, SE**

## PERJANJIAN KINERJA BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Satuan
1	2	3	4	
<b>Misi Pertama: Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</b>				
1	Terpeliharanya toleransi antar umat beragama	Jumlah konflik antar umat beragama	0	Jumlah
<b>Misi Kedua : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam</b>				
2	Meningkatnya akses pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (ARLS)	10,35	Tahun
3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	70,5	Tahun
4	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penurunan angka kemiskinan	8,85	Persen
<b>Misi Ketiga : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik</b>				
5	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan	Peringkat LPPD	2	Peringkat (Provinsi)
		Nilai evaluasi AKIP	BB	Predikat
		Opini BPK	WTP	Opini
		Persentase Implementasi e-Government	2.5	Nilai
<b>Misi Keempat : Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan</b>				
6	Meningkatnya produksi bahan pangan utama	Persentase pertumbuhan produksi pertanian	5	Persen
		Persentase pertumbuhan produksi peternakan dan perikanan	3	Persen
7	Meningkatnya pertumbuhan PDRB	Persentase pertumbuhan PDRB	4.00	Persen
8	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah wisatawan	163,239	Orang
<b>Misi Kelima :Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah</b>				
9	Meningkatnya infrastruktur jaringan jalan	Persentase jaringan jalan dalam kondisi baik	71.91	Persen



NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pengelolaan Pendidikan	75.721.112.345
2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	30.000.000
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	88.130.067.962
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.163.563.000
5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	197.149.500
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	262.231.750
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	17.160.784.320
8	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	3.530.998.800
9	Program Penyelenggaraan Jalan	52.255.993.725
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.249.999.200
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	11.516.252.273
12	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	3.014.111.250
13	Program Pengembangan Permukiman	5.746.137.389
14	Program Penataan Bangunan Gedung	7.395.086.099
15	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	899.997.536
16	Program Kawasan Permukiman	3.338.249.110
17	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.517.639.790
18	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.012.440.560
19	Program Penanggulangan Bencana	12.033.755.650
20	Program Pemberdayaan Sosial	1.065.193.400
21	Program Rehabilitasi Sosial	1.235.358.500
22	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	361.474.950
23	Program Penanganan Bencana	798.662.000
24	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	966.637.600
25	Program Penempatan Tenaga Kerja	183.913.000
26	Program Hubungan Industrial	427.831.930
27	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	114.610.170
28	Program Perlindungan Perempuan	179.551.062
29	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	992.069.198
30	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	51.405.500
31	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	329.795.988
32	Program Perlindungan Khusus Anak	89.807.570
33	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	105.000.000
34	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	974.850.850
35	Program Penanganan Kerawanan Pangan	268.226.000
36	Program Pengawasan Keamanan Pangan	117.448.909
37	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	250.000.000
38	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	389.945.000
39	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	82.170.000
40	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	152.782.300



41	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	110.413.500
42	Program Pengelolaan Persampahan	7.100.310.620
43	Program Pendaftaran Penduduk	351.749.600
44	Program Pencatatan Sipil	494.616.000
45	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	526.069.000
46	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	29.750.000
47	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.546.507.675
48	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	558.958.092
49	Program Pengendalian Penduduk	320.490.200
50	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	5.132.848.850
51	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	846.738.984
52	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	7.037.109.761
53	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	640.968.400
54	Program Aplikasi Informatika	1.548.079.500
55	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	60.714.700
56	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	109.930.800
57	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	38.670.000
58	Program Pengembangan Umkm	580.542.520
59	Program Promosi Penanaman Modal	469.897.575
60	Program Pelayanan Penanaman Modal	211.146.000
61	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	325.982.000
62	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	882.332.772
63	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.920.932.262
64	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	250.000.000
65	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	101.103.000
66	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	97.506.619
67	Program Pengembangan Kebudayaan	885.271.600
68	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	185.903.500
69	Program Pembinaan Perpustakaan	931.635.200
70	Program Pengelolaan Arsip	144.384.628
71	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.110.000.000
72	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.922.726.154
73	Program Pemasaran Pariwisata	801.499.800
74	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.012.577.000
75	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	20.479.661.800
76	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.415.735.450
77	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	376.049.000
78	Program Perizinan Usaha Pertanian	39.999.150
79	Program Penyuluhan Pertanian	1.692.021.200
80	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	8.107.585.000
81	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	969.996.700
82	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	715.688.620
83	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	51.480.800
84	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	118.495.200

85	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.340.935.030
86	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	45.176.800
87	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	5.921.029.921
88	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.864.446.342
89	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	12.097.333.970
90	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.576.046.600
91	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	967.415.850
92	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	185.651.445.056
93	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	903.913.690
94	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	891.754.550
95	Program Kepegawaian Daerah	2.132.330.450
96	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	776.688.000
97	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	114.630.900
98	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.748.062.000
99	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	346.453.500
<b>TOTAL</b>		<b>599.944.046.077</b>



**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**

**DOSMAR BANJARNAHOR, SE**